

PEKERJA BINADAMAI DARI TANAH PASUNDAN

Editor: Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi



Ali Nursahid • Husni Mubarak • Irsyad Rafsadi
Siswo Mulyartono • Siti Nurhayati

Pekerja Binadamai
dari Tanah Pasundan

Pekerja Binadamai dari Tanah Pasundan

Editor:

Rizal Panggabean

Ihsan Ali-Fauzi

Pusat Studi Agama dan Demokrasi

Yayasan Wakaf Paramadina

2017

Pekerja Binadamai dari Tanah Pasundan

Penyunting: Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi

Kontributor: Ali Nursahid, Husni Mubarak, Irsyad Rafsadi,
Siswo Mulyartono, Siti Nurhayati.

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi
Yayasan Wakaf Paramadina

Sebagai bagian dari Program Respect and Dialogue (READY)
di Jawa Barat

Didukung oleh

Hivos
European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR)

Alamat Penerbit:

Bona Indah Plaza Blok A2 NO. D12
Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta 12440
Telp. (021) 765 5253
<http://paramadina-pusad.or.id>

ISBN: 978-979-772-056-8

Pengantar Penerbit

Berbagai laporan pemantauan tentang kebebasan beragama atau survey mengenai tingkat toleransi sering menyebut wilayah Jawa Barat sebagai *hot spot*, titik panas, di mana berbagai jenis ekspresi diskriminasi agama atau intoleransi banyak ditemukan. Bentuknya bermacam-macam: antar-agama, misalnya terkait kontroversi mengenai pembangunan rumah ibadat, khususnya gereja; intra-agama, misalnya diskriminasi terhadap sekte-sekte tertentu di dalam Islam seperti Ahmadiyah; atau terbitnya berbagai peraturan pemerintah – di tingkatan yang berbeda – yang memihak kepada kelompok agama tertentu, yang sering disebut sebagai “perda-perda Syariah”.

Ada banyak pertanyaan yang masih perlu dijawab terkait pandangan umum di atas mengenai Jawa Barat. Misalnya, mengingat wilayah Jawa Barat sangat luas (penduduknya

terbesar dibanding provinsi lain di Indonesia), apakah ekspresi diskriminasi atau intoleransi itu berlangsung secara merata di seluruh pelosok wilayah itu atau hanya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu saja? Karena jawaban yang terakhirlah yang lebih masuk akal, pertanyaan berikutnya: mengapa tempat-tempat tertentu di Jawa Barat, misalnya Bogor atau Bekasi, atau Banten (yang dulu masuk ke wilayah ini) yang menjadi *hot spot*? Salahkah jika kita mengajukan hipotesis bahwa hal itu terkait dengan geografinya yang dekat dengan Jakarta, pusat hampir segala hal di Indonesia, khususnya uang dan kekuasaan?

Lepas dari itu semua, yang memerlukan telaah lebih lanjut, kesan umum di atas telah mengabaikan dan mengaburkan fakta bahwa ada orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu di Jawa Barat yang bekerja dalam arah yang berbanding terbalik dengan kesan umum di atas. Mereka, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan dalam bidangnya masing-masing, justru bekerja untuk menegakkan dan memperkokoh kebersamaan di antara berbagai kelompok agama.

Buku sederhana ini kami maksudkan untuk mengungkap kisah personal dan peran sosial mereka – dan seraya menghargai mereka, kami mengajak Anda semua, para pembaca, untuk mengambil pelajaran dari mereka dan memperluas panggilan mereka ke tempat-tempat lain. Karena mereka orang-orang biasa seperti kita, kita perlu mengenal mereka lebih jauh, mengapresiasi sumbangan mereka, menjadikan mereka sumber inspirasi kita, dan

sebisa mungkin mendakwahkan hasrat, cita-cita dan langkah-langkah aktual mereka, dengan segala kekuatan dan keterbatasannya. Di tengah tantangan yang tak kecil dan dengan sumberdaya seadanya, mereka terus membangun jembatan, tanpa kenal lelah.

Penerbitan buku ini adalah satu dari rangkaian kegiatan kami di PUSAD Paramadina yang dengan *sengaja* ingin melihat, menampilkan dan mengambil inspirasi dari berbagai aspek agama yang dapat menopang cita-cita binadamai (*peacebuilding*) dan nirkekerasan (*nonviolence*). Ke arah ini, kami sudah (dan akan terus) melakukan berbagai riset dan penerbitan, menyelenggarakan ceramah-ceramah ilmiah, dan bekerjasama antara lain dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menyelenggarakan “Sekolah Agama dan Bina Damai” (SABDA) – bahkan, kami mendukung pembuatan film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*, yang memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik (2014).

Kata “sengaja” di atas perlu kami garisbawahi. Sementara kami mengakui bahwa ada aspek-aspek tertentu dari agama yang mengajarkan dan mengamalkan cita-cita kekerasan dan kehancuran, seperti tampak dalam langkah-langkah Negara Islam di Irak dan Syam (ISIS), kami sudah lelah dengan penekanan aspek-aspek itu saja dari agama, sedang aspek-aspek lainnya diabaikan. Di sisi yang lain, kami juga sudah capek dengan tokoh-tokoh agama yang mendakwahkan agama sebagai jalan kedamaian dan keadilan, tetapi sehari-harinya mengamalkan yang sebaliknya.

Kelima orang yang kisahnya kami ungkap dalam buku ini (Ahmad Syafi'i Mufid, Yoyoh Indayah, Rahmat Syukur Maskawan, Nisya Wargadipura serta suaminya Ibang Lukmanurdin, dan Dewi Kanti) berada di luar dua ekstrem di atas. Pada aksi sehari-hari merekalah kita temukan ekspresi wajah agama yang damai dan mendamaikan; agama yang tidak membangun tembok, tapi jembatan.

Kisah mereka kami peroleh dan kumpulkan ketika kami bekerjasama dengan berbagai lembaga di Jakarta dan Jawa Barat dalam program yang kami namakan Respect and Dialogue (READY). Dengan usainya program ini, kami ingin menghaturkan banyak terimakasih atas kemitraan mereka: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, The Wahid Foundation, Fahmina Institute dan Hivos Kantor Regional Asia Tenggara atas kemitraannya selama ini dalam konsorsium bersama program ini; Uni Eropa yang telah mendukung seluruh program ini; Lembaga Kajian Agama dan HAM (LKaHAM), Tasikmalaya, Pemuda Lintas Agama (Pelita), Cirebon, dan Lembaga Penelitian Sosial dan Agama (Lensa), Sukabumi, yang selama ini menjadi mitra pelaksanaan riset dan advokasi di lapangan.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Semoga kisah-kisah yang kami angkat ini betul-betul menginspirasi kita semua dan mendorong kita untuk membangun jembatan yang lebih banyak dan kokoh lagi di masa depan.***

Jakarta, 10 Mei 2017

Ihsan Ali-Fauzi

Daftar Isi

<i>Pengantar Penerbit</i>	i
Jalan-jalan Binadamai	1
Polwan Pelindung Minoritas: Kombes Yoyoh Indayah	9
Mengagungkan Tuhan, Memuliakan Manusia: Kiprah Ahmad Syafi'i Mufid dalam Binadamai	31
Pekerja Profesional, Perawat Binadamai: Kisah Rahmat Syukur Maskawan	53
Merawat Alam, Menjaga Damai: Kiprah Nisya Wargadipura dan Ibang Lukmanuridin di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, Garut	81
Merawat Tradisi, Menggugat Diskriminasi: Profil Dewi Kanti Setyaningsih	113
<i>Tentang Penulis</i>	133

Jalan-jalan Binadamai

Buku ini memuat lima tulisan tentang binadamai dan orang-orang yang mengabdikan hidup mereka kepada binadamai. Mereka berasal dari latarbelakang yang berbeda-beda. Masing-masing menunjukkan kemungkinan binadamai datang dari jalan yang berbeda-beda.

Selain itu, para pekerja binadamai menunjukkan dua jenis binadamai yang sama-sama penting. Kadang-kadang mereka dengan sengaja melakukan aksi binadamai – misalnya dengan mengadakan pelatihan binadamai, membangun jaringan masyarakat pembela lingkungan, dan lain-lain. Dalam hal ini, binadamai ada karena para pekerja binadamai *dengan sengaja* melakukan aksi atau program binadamai.

Tetapi, kadang-kadang binadamai bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, melainkan implikasi dari kiprah dan relasi aktor di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, hubungan dan kontak yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat lama-kelamaan menghasilkan suasana damai,

kerjasama sosial, dan penanganan masalah dengan cara-cara nirkekerasan. Suasana damai dan kerjasama sosial tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Binadamai ada sebagai hasil dari interaksi dan kerjasama berbagai pihak yang terlibat.

Selanjutnya, istilah “binadamai” digunakan dalam konteks masyarakat yang berbeda-beda. *Pertama*, binadamai digunakan dalam konteks masyarakat yang sedang atau baru saja keluar dari perang dan kekerasan. Di masyarakat ini, binadamai mencakup aneka proses dan pendekatan yang tujuannya adalah supaya situasi damai bertahan dan kekerasan tidak terulang. Fokus dan tantangan binadamai dalam konteks ini adalah bagaimana mentransformasi masyarakat pascaperang menuju masyarakat yang memiliki hubungan damai yang berkelanjutan.

Ini menunjukkan bahwa, ketika perang berhenti, keadaan tidak otomatis berubah menjadi damai dan stabil, dengan ekonomi yang tumbuh dan sistem politik yang demokratis. Harus ada proses dan kegiatan binadamai supaya kekerasan berhenti dan tidak terulang lagi. Pembangunan dan demokratisasi menjadi bagian dari binadamai ini. Tetapi ada banyak kegiatan lain di berbagai bidang, seperti keamanan, politik dan pemerintahan, kemanusiaan, reformasi hukum, rekonsiliasi, dan lain-lain.

Kedua, binadamai dalam konteks masyarakat yang tidak mengalami perang atau kekerasan yang meluas. Dalam masyarakat yang relatif normal ini, binadamai menjadi proses dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terhindar dari kekerasan dan perang, walaupun ada

masalah dan ketegangan. Dalam kata-kata Johan Galtung, pengkaji studi-studi perdamaian senior, binadamai adalah proses menciptakan struktur mandiri “yang meniadakan sebab-sebab perang dan menawarkan alternatif terhadap perang dalam situasi ketika perang dapat terjadi.” Itu berarti, struktur mandiri mengandung banyak mekanisme resolusi konflik yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai keperluan. Serupa tubuh sehat yang memiliki kemampuan menumbuhkan antibodi sehingga tidak memerlukan penggunaan obat secara ad hoc.

Sesuai dengan pengertian yang disebutkan Galtung, binadamai tak terbatas ke situasi pasca perang. Binadamai bukan suatu fase atau tahapan waktu, tetapi proses yang dinamis yang melibatkan banyak kegiatan baik dalam keadaan normal maupun sesudah perang dan kekerasan berhenti. Selain itu, binadamai tidak terbatas kepada tingkat nasional atau internasional. Seperti tampak dalam tulisan-tulisan yang ada di buku ini, binadamai dapat berlangsung pada tingkat subnasional, khususnya kota dan kabupaten.

Para pekerja binadamai yang kisahnya diterakan di buku ini tidak berasal dari masyarakat yang mengalami atau baru saja mengalami kekerasan terbuka dalam bentuk perang atau kekerasan komunal. Mereka hidup di masyarakat yang pada umumnya stabil, tetapi mengandung ketidakselarasan dan potensi kekerasan. Semuanya menyadari ada ketidakselarasan di lingkungan masing-masing, kemudian berusaha mengelolanya secara langsung sehingga tidak berubah menjadi kekerasan terbuka. Selain

itu, semuanya menjalin kontak dan kerjasama, khususnya melalui asosiasi dan organisasi, dengan berbagai pihak di lingkungan mereka.

Pak Ukun dihadapkan kepada konflik dan ketidakselarasan yang menyangkut beberapa aspek kehidupannya – sebagai warga aliran minoritas keagamaan maupun sebagai pengusaha yang ingin, menurut istilahnya, profesional. Dalam kondisi yang dia hadapi, Pak Ukun menunjukkan unsur-unsur binadamai yang nyata. Pertama, apa pun konflik dan masalahnya, dia menanganinya dengan cara-cara nirkekerasan – melalui perundingan, rembukan, atau persuasi. Setiap pekerja binadamai seharusnya terikat dengan asas berkonflik tanpa menggunakan cara-cara kekerasan seperti yang ditunjukkan Pak Ukun.

Selain itu, dia dengan sengaja dan bersungguh-sungguh mengurangi bentuk-bentuk kekerasan – menjauhi praktik-praktik negatif dalam dunia usaha seperti pelacuran, sogok-menyogok, korupsi, dan lain-lain. Ia juga menghindari benturan dalam relasi antar aliran keagamaan, dan berusaha menjalin hubungan damai dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dengan demikian Pak Ukun mengurangi kekerasan dan bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya.

Bu Yoyoh adalah anggota Polri yang setia kepada profesinya, yang ia tekuni sambil terus mengikuti jenjang pendidikan yang dapat ia ikuti walau dengan susah payah. Sepintas, Ibu Yoyoh tampak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Polri, termasuk ketika

menjadi Kapolres Kuningan. Tapi, dibandingkan dengan banyak anggota polri lain yang dihadapkan kepada situasi serupa yang dihadapi Yoyoh, polisi wanita ini menonjol jauh melebihi yang lain. Dia menjadi pejuang binadamai karena setia kepada profesinya dan, bertolak dari situ, menciptakan perdamaian di masyarakat. Ibu Yoyoh mengerti kapan dia harus mengambil alih kendali dan memutuskan, sehingga tak ada kesempatan yang terbuang sia-sia dalam rangka menghindari timbulnya kekerasan.

Polisi sering menghadapi kasus konflik antaragama dan antarsekte dalam suatu agama. Termasuk di dalam jenis konflik antarsekte ini adalah konflik Ahmadiyah-Sunni di Manislor, Kuningan, yang dihadapi Yoyoh sebagai Kapolres. Ketika menghadapi konflik sejenis, Polisi kadang gagal dan kadang berhasil. Polisi di Kuningan pun dalam episode konflik sektarian sebelumnya beberapa kali mengalami kegagalan (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014).

Dari sudut binadamai, Yoyoh berhasil menangani konflik sektarian di Kuningan sehingga tidak menjadi kekerasan langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai. Dengan pemolisian yang tepat, pihak-pihak yang bertikai dapat menghindari timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang meluas. Dia sering menemui pengunjuk rasa dan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka berunding dan berkoordinasi. Ia juga bisa melumpuhkan pihak-pihak yang bertikai sebelum mereka memasuki arena konfrontasi terbuka. Tetapi, Yoyoh juga dapat menggunakan represi ketika dia menilai itu harus dilakukan.

Pak Syafi'i giat di berbagai bidang. Tetapi dia punya prioritas yang mendesak, yaitu menjalin hubungan antarkelompok masyarakat yang berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda. Tujuannya adalah supaya hubungan di antara mereka mengalami transformasi menuju hubungan yang ditandai dengan suasana saling percaya, toleransi, dan, yang lebih penting, kerjasama. Lembaga yang menjadi fokus perhatiannya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, disingkat FKUB. Pendekatan yang dia gunakan adalah melalui pendidikan, baik dalam bentuk pelatihan dan lokakarya, seperti Sekolah Agama dan Binadamai, disingkat SABDA. Melalui SABDA, tokoh-tokoh agama, dapat bertemu, membicarakan masalah bersama, dan membangun jaringan.

Pak Syafi'i percaya bahwa pendidikan adalah proses penting yang dapat mengubah keadaan suatu masyarakat. Ini pelajaran yang juga ia tarik dari perjalanan hidupnya sebagai mahasiswa, peneliti, dan pegiat sosial. Pesantren yang dia bangun di Purwakarta akan membekali santri dengan ilmu agama dan semangat wirausaha. Dengan kata lain, pendidikan menjadi bagian penting binadamai karena membina kapasitas masyarakat.

Pendidikan sebagai binadamai juga menjadi perhatian penting Nisya dan suaminya, Ibang. Keduanya berawal sebagai aktivis di bidang agraria dan pertanian, yang di masa Orde Baru hampir selalu menjadi kegiatan berbahaya. Regim tersebut biasa menggunakan kekerasan terhadap segala protes yang timbul dari masyarakat – dari nelayan,

petani, mahasiswa, buruh, ibu-ibu pedagang, dan lain-lain.

Selaras dengan hal di atas, aktivisme dan advokasi dipandang tak lebih dari bentuk agresi yang, menurut penguasa Orde Baru, harus dihadapi dengan agresi yang lebih besar. Namun, masalah yang mendasari berbagai ketidakselarasan di masyarakat tidak dipecahkan. Karenanya, kegiatan Nisya dan Ibang menangani konflik agraria dengan cara nirkekerasan, dan mengurangi kekerasan langsung di sektor pertanian, menjadi sangat relevan walau dihadapkan kepada represi yang lebih besar dalam bentuk kekerasan negara.

Seperti pekerja binadamai lain, kedua pekerja binadamai ini sangat menekankan arti penting pendidikan. Mereka mendidik para petani supaya menyadari hak mereka dan menghindari tindakan-tindakan yang merusak alam. Selain itu, mereka membangun apa yang dinamakan pesantren ekologi Ath-Thaariq di Garut. Dalam hal ini, kekerasan yang menjadi fokus adalah kekerasan terhadap alam. Tindakan nirkekerasan yang ditekankan adalah berupa aksi petani yang secara langsung memulihkan alam. Transformasi konflik yang diperjuangkan adalah merawat alam, dan menjalin hubungan yang seimbang antara manusia dengan alam. Ayat-ayat kitab suci dan berbagai kearifan lokal menjadi dasar bagi binadamai di sektor pertanian dan agraria ini.

Kanti berasal dari penganut Sunda Wiwitan, minoritas yang identitasnya telah lama ditindas negara – dipaksa pindah ke agama tertentu, mengalami stigmatisasi, tidak

mendapatkan layanan pemerintah yang semestinya, dan lain-lain. Memperjuangkan hak kelompok Sunda Wiwitan, dan dengan demikian berusaha mentransformasi hubungan antara komunitas Sunda Wiwitan dan negara dan masyarakat pada umumnya, menjadi panggilan binadamai Kanti. Kanti memperjuangkan transformasi ini bersama suaminya dan kawan-kawan seperjuangan, yaitu kelompok agama tradisional dan masyarakat adat yang senasib dan sepenanggungan.

Bidang binadamai lainnya yang digeluti Kanti adalah pertanian, masyarakat pedesaan, dan kearifan lokal – yang juga menjadi fokus Nisya dan Ibang. Binadamai adalah sesuatu yang tertanam dalam aktivitas Kanti di sektor-sektor ini. Dari situlah muncul beberapa dampak penting, yaitu hubungan yang terjalin dengan berbagai kelompok masyarakat lain, proses saling meningkatkan kapasitas, dan usaha-usaha mencegah berbagai bentuk kekerasan.

Singkatnya, baik dengan sengaja maupun sebagai dampak kiprah mereka, binadamai sebagai proses yang berkelanjutan dapat terjadi di berbagai bidang. Yang terpenting di antaranya, sebagaimana tampak dari kisah-kisah yang ada dalam buku ini, adalah mengurangi kekerasan, menyelesaikan masalah dengan cara-cara nirkekerasan, membina kapasitas masyarakat, dan mentransformasi hubungan sosial menuju hubungan sosial yang ditandai dengan sikap saling menghargai dan kerjasama.

Rizal Panggabean
Yogyakarta 14 Mei 2017

Polwan Pelindung Minoritas: Kombes Yoyoh Indayah

Irsyad Rafsadi

Malam itu Yoyoh Indayah membulatkan hatinya untuk berangkat ke Bandung mengikuti ujian masuk polisi. Dia yakinkan kedua orang tuanya yang cemas bahwa dia akan baik-baik saja. Padahal dia sendiri tak yakin dan sebelumnya belum pernah jauh dari orang tua. Ketika bis malam yang ditumpanginya baru separuh perjalanan, seorang pria paruh baya duduk di sampingnya lalu menggoda dan menawarinya kerja di sebuah salon kecantikan. Yoyoh menolak dan menegaskan bahwa dia sedang sekolah polwan. Pria itu pun tak berani menggodanya lagi.

Penggalan adegan ini terjadi pada 1982 ketika Yoyoh Indayah belia mengikuti tes ujian masuk Sekolah Bintara

Militer Sukarela (Seba Milsuk). Perempuan kelahiran desa Babatan, Kadugede, Kuningan pada 9 Maret 1963 ini tak pernah bercita-cita menjadi polisi. Tapi dia ingat dulu ketika di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kadugede, dia selalu kagum jika melihat orang berbaris dan berseragam. Dia juga membayangkan bisa berbuat lebih untuk keluarga dan lingkungannya jika dia menjadi polisi.

Keluarga Yoyoh sendiri tidak ada yang berprofesi sebagai polisi. Ayahnya, alm. Suwandi, adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Ibunya, alm. Ruhinah, adalah ibu rumah tangga. Tapi mereka mengajarkannya disiplin dan tanggungjawab sejak dini. Terlebih sebagai anak pertama, Yoyoh dituntut untuk mengayomi kedua adiknya. Yoyoh juga dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat dan ini terus berpengaruh di sepanjang kariernya.

Saat itu jarang sekali wanita yang berprofesi sebagai polisi dan Yoyoh sebenarnya masih ragu. Dia baru saja masuk di jurusan hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, setelah lulus dari SMAN 1 Kuningan. Orang tuanya pun sempat tak merestui karena tidak tega, khawatir terjadi apa-apa kepadanya. Tapi tetangganya yang polisi terus meyakinkannya dan ketika itu seorang staf di Polres Kuningan turut membantunya menyiapkan dokumen persyaratan tes yang lumayan merepotkan itu.

Benar saja, sekolah polisi pada masa itu sangat berat sehingga dia beberapa kali sempat memikirkan untuk mundur. Tapi orang tuanya yang awalnya khawatir justru malah semakin mendukungnya dengan memperbanyak

salat malam dan mendoakannya agar mampu melewati ujian. Yoyoh akhirnya lulus pada 1983 dengan berpangkat Sersan Dua (Serda Pol). Namun pada saat pelantikan pun dia masih membatin, apakah dia sungguh-sungguh ingin berkarier sebagai polisi.

Berkeluarga dan Melanjutkan Pendidikan

Selepas lulus Yoyoh langsung ditugaskan di Sabhara Poltabes Bandung, lalu setelah mengikuti sekolah kejuruan Unit Intel, pindah ke Direktorat Intelijen Pengamanan (Dit Intelpam) Polda Jawa Barat. Ketika berdinasi di Polda pada 1984 itulah dia bertemu dengan belahan jiwanya, pria asal Bali bernama I Nyoman Sudana yang juga berpangkat Sersan Dua. Setelah berteman dan berdinasi bersama sekitar 4 tahun lamanya, mereka akhirnya menikah pada 1987 di Kuningan. Saat itu mereka sama-sama berpangkat Sersan Satu.

Setahun kemudian anak pertama mereka, Dewi Avianti, lahir pada 1988. Dewi yang masih menyusu sering dibawa Yoyoh berdinasi jika tidak ada pengasuh. Waktu itu kantor Sandi Dit Intelpam sangat luas dan sepi sehingga dia cukup leluasa membawa Dewi. Yoyoh berdinasi di sana sampai 1992 dan berpangkat Sersan Kepala (Serka Pol.). Perjuangan Yoyoh makin berat ketika dia melanjutkan pendidikan polisi untuk beralih menjadi perwira. Satu tahun dia lalui di Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) Polri (1992-1993). Setelah itu, selama lima tahun berikutnya dia mengikuti D3 Ilmu Kepolisian, penyeteraanan dengan AKPOL (1994-1997), dan S1 (1997-1999), di Perguruan Tinggi Ilmu

Kepolisian (PTIK). Yoyoh mesti berpisah dengan Dewi kecil yang masih balita dan suaminya.

Selama tahun-tahun itu mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali di saat libur. Ketika Yoyoh harus kembali ke sekolah, Dewi sering menangis tak mau ditinggal. Yoyoh kadang mengendap-endap pergi di malam hari agar tak diketahui Dewi. Tapi lama-lama Dewi mulai mengerti. Pergi jalan-jalan mengantar ibunya ke terminal bersama sang ayah sudah menjadi rutinitas Dewi. Tapi Dewi kini telah tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri dan pemberani. Dia misalnya tak segan menggugat atasan dan mempertaruhkan pekerjaannya untuk memprotes ketidakadilan dan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerjanya.

Yang membesarkan hati Yoyoh untuk terus melanjutkan pendidikan adalah dorongan sang suami sendiri. Mereka bahkan mengikuti SETUKPA bersama-sama. Yoyoh di SEPOLWAN Ciputat sedangkan Sudana di SETUKPA Sukabumi. Yoyoh bercita-cita untuk menjadi perwira dan berkarier sebagai manajer atau pemimpin di kepolisian. Karena itu Yoyoh senang sekali ketika dia dan suaminya diterima di D3 Ilmu Kepolisian di PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan. Selepas lulus D3 pada 1997, Yoyoh sempat mengikuti Pusdik Brimob di Watukosek, Jawa Timur sebelum melanjutkan S1 PTIK dan lulus pada 1999. Saat itu pangkat Yoyoh naik dari Letnan Dua (Letda Pol.), menjadi Letnan Satu (Lettu Pol.).



Yoyoh Indayah bersama Dewi dan Devin pada 2012 (Foto Dokumentasi Pribadi)

Selain mendukung karier istrinya, I.N. Sudana adalah sosok ayah yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Dia tak canggung melaksanakan piket malam sambil mengasuh Dewi. Keadaan mulai berangsur ringan setelah Yoyoh menyelesaikan pendidikan dan pindah ke Cirebon. Pada saat itulah, tepatnya pada 2000, anak kedua mereka, Devin Arya Wighata, lahir.

Tempat dinas Yoyoh juga kini lebih dekat dengan kampung halamannya. Pertama, dia menjabat Kasubbag Prograr Bagbin Polwil Cirebon (1999) dengan pangkat Kapten Pol., lalu menjadi Kapolsekta Cirebon Utara Barat (2001), dan terakhir Kabag Bina Mitra Polresta Cirebon

(2003) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol.). Upacara serah terima jabatannya yang terakhir ini cukup unik karena Kabag Bina Mitra sebelumnya yang digantikan Yoyoh adalah Sudana, suaminya sendiri. Kolega-koleganya ketika itu menggoda mereka sambil bercanda agar mereka melakukan serah terima di rumah saja.

Kemesraan mereka berlanjut ketika sama-sama kuliah pascasarjana di Universitas 17 Agustus Cirebon. Yoyoh di Administrasi Negara, sedangkan suaminya di Fakultas Hukum. Malang tak berbau, ketika Yoyoh sekeluarga sedang dekat-dekatnya sang suami tercinta dipanggil Yang Maha Kuasa pada 2005 di usia 48 tahun. Almarhum yang ketika itu menjabat Kasat Intel Polres Majalengka mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat dinas dari Cirebon. Saat itu Idul Fitri 1426 H tinggal dua minggu lagi.

Menjadi Kapolres Kuningan

Di tengah perkabungan Yoyoh bertekad menunaikan amanat mendiang suaminya untuk terus melanjutkan pendidikan. Setelah menyelesaikan S2 pada 2005, dia diterima di Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Polri angkatan 43. Yoyoh yang saat itu menjabat Wakapolres Kuningan ditugaskan menjadi tenaga pendidik di SPN Cisarua, Polda Jabar, lalu pamen Polwil Cirebon. Selepas lulus pada 2006, Yoyoh mendapat penempatan tugas sebagai tenaga pendidik madya dan kemudian perwira penuntun di Pusdikmin Lemdiklat Polri. Sejak 2007 dan 2008 titelnya bertambah dengan Hajjah dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Setelah tiga tahun bertugas di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Yoyoh dilantik menjadi Kapolres Kuningan pada 29 Desember 2009. Ini adalah pertama kalinya Polres Kuningan dipimpin perempuan. Di lembaga yang didominasi laki-laki seperti Polri, capaian Yoyoh ini cukup luar biasa. Saat itu polisi wanita yang menjabat Kapolres masih bisa dihitung dengan jari dan yang menjabat pun biasanya tak bertahan lama. Kapolres Depok, Ratnawati Hadiwijaya, misalnya, hanya menjabat tiga bulan (Mei-Agustus 2005). Selain diperebutkan, jabatan Kapolres biasanya hanya untuk perwira alumni Akademi Kepolisian (AKPOL). Yoyoh yang berlatarbelakang Bintara tidak termasuk karena dulu AKPOL hanya menerima laki-laki.

Sebagai Kapolres, Yoyoh membawahi 20 polsek, 600-an personel, dan bertanggungjawab atas keamanan satu juta lebih warga Kuningan. Jabatan Kapolres ini diduduki Yoyoh selama kurang lebih dua tahun, sampai November 2011. Meski hanya penggalan kecil dari karier panjang Yoyoh, tapi periode inilah yang melambungkan nama Yoyoh menjadi perhatian nasional. Ini karena dia dianggap berhasil menangani protes anti-Ahmadiyah di Manis Lor pada 2010 dan menghentikan siklus kekerasan yang selalu berulang sejak sepuluh tahun sebelumnya. Di tengah gencarnya tekanan anti-Ahmadiyah dan lemahnya dukungan politik, polisi biasanya tunduk pada tekanan publik. Tapi di sini Yoyoh lagi-lagi membuat heran banyak pihak dengan bertindak tegas melindungi warga Ahmadiyah dari serangan.

Penanganan Protes Anti-Ahmadiyah Manis Lor

Protes anti-Ahmadiyah di Manis Lor mencuat sejak 2001-2002 dan beberapa kali bereskalasi menjadi kekerasan, misalnya pada 2007. Masjid, musala dan puluhan rumah warga Ahmadiyah berulang kali menjadi sasaran aksi perusakan dan vandalisme. Tapi alih-alih hukuman bagi pelaku, setiap protes dan kekerasan biasanya diikuti dengan kebijakan pemerintah daerah untuk melarang kegiatan Ahmadiyah dan menutup masjidnya.

Ketegangan pada 2010 juga adalah kelanjutan dari konflik tersebut. Serangkaian protes anti-Ahmadiyah menjelang Ramadan 1431 H ditindaklanjuti pemma dengan memerintahkan penyegelan masjid. Tapi kali ini warga Ahmadiyah yang sudah jengah menghalau petugas Satpol PP dan polisi yang hendak menyegel. Mereka bersemangat karena menyaksikan di televisi dan surat kabar beberapa bulan sebelumnya bagaimana warga Koja di Jakarta berhasil menghalau Satpol PP yang berusaha menggusur makam mbah Priok.

Sementara itu, provokasi dan seruan mobilisasi ke Manis Lor melalui acara istigash pada 29 Juli 2010 mulai beredar melalui pesan pendek dan telpon. Mengetahui informasi ini, Yoyoh segera menyusun rencana tindakan dan berkoordinasi dengan berbagai instansi. Dia mengupayakan dialog antara para pihak serta mendekati pemuka agama dan pemimpin ormas agar membantu meredakan ketegangan. Saat itu Habib Ali Al-Kaff (alm.) membantu Yoyoh dengan menyurati Kakanwil Kemenag dan Ketua MUI Provinsi Jawa

Barat agar mengeluarkan imbauan supaya umat Muslim di kota lain tidak bergerak ke Kuningan.

Tak cukup dengan pencegahan, upaya pengamanan tetap dilakukan sejak beberapa hari sebelum dan sesudah istigash, totalnya sepuluh hari. Kawat berduri, *water cannon* dan ratusan anggota Dalmas dan Brimob bersiaga di Manis Lor. Sementara itu anggota TNI diarahkan agar bersiaga di Koramil. Semua di bawah instruksi Yoyoh. Pada puncak aksi istigash, Yoyoh memimpin sekitar 1.500 personel selama tiga hari.

Yoyoh harus memutar otak karena Polres tidak punya anggaran untuk operasi sebesar itu. Untuk konsumsi personel pengamanan, misalnya, dia sampai mengebon dari beberapa warung makan. Semuanya dilunasi dengan mencicil setiap bulan dari anggaran untuk operasional kesatuan. “Prinsip saya ambil langkah dulu, urusan dana belakangan. Yang penting jangan menganggap enteng,” kata Yoyoh.

Pada saat memimpin Acara Pimpinan Pasukan (APP), dia tegaskan bahwa dialah satu-satunya yang memegang komando. Dia juga berkomitmen akan memimpin langsung di tempat istigash dan tidak boleh ada yang memukul atau menembak tanpa aba-abanya. Yoyoh percaya bahwa kunci keberhasilan operasi ada pada rincian prosedurnya, siapa di titik mana, berapa, apa langkahnya, dan bagaimana cara bertindaknya. Tapi di atas semua itu, yang paling menentukan menurutnya adalah pertolongan Yang Maha Kuasa.



*Suasana Istigasah di Masjid Al-Huda, Balai Desa Manis Lor, 29 Juli 2010
(Sumber: Pikiran Rakyat).*

Pada hari istigasah massa pemrotes yang hadir sekitar 1.000 orang. Mereka tidak hanya berasal dari Kuningan, tapi juga dari Cirebon, Majalengka, Karawang, Indramayu, Bandung, Tasikmalaya, Garut, sampai Cianjur. Yoyoh mengaku bisa membedakan mana orang Kuningan dan mana yang bukan. Dia bahkan mengetahui nama dan orang tua beberapa peserta protes.

Dalam istigasah tersebut, tokoh ormas dan kiai bergiliran menyampaikan orasi. Ketika orasi makin menjurus ke arah provokasi, Yoyoh mengambil alih mikrofon dan menenangkan. “Mari sama-sama menyejukkan hati. Bapak sesepuh lebih tahu dari saya, lebih paham tentang agama. Sambil menunggu bapak bupati mari kita bersama-sama lantunkan salawat”, kata Yoyoh di depan para ulama dan massa yang semakin gelisah.

Situasi sempat mereda tapi kembali memanas setelah

bupati datang dan berpidato. Massa pemrotes kecewa dengan pernyataan bupati yang dianggap tidak tegas terhadap Ahmadiyah. Di tengah kekisruhan itu, Yoyoh mengambil semua mikrofon agar tidak ada yang memprovokasi, sampai ada mikrofon yang lupa terbawa pulang di sakunya. Tokoh-tokoh yang agak keras pernyataannya dia dekati dan ajak bicara. Koordinator aksi juga dia peringatkan agar bertanggung jawab. Bupati sendiri ketika itu sudah meninggalkan lokasi.

Massa yang tak terbendung mulai bergerak ke arah perkampungan Ahmadiyah. Sementara itu, warga Ahmadiyah sudah bersiap mempertahankan diri dengan menyiapkan batu, ulekan cabai dan blokade ban bekas di tengah jalan. Warga Ahmadiyah juga memobilisasi dukungan dari tempat lain tapi informasi ini dirahasiakan Yoyoh. “Kita pura-pura tak tahu saja. Kalau informasi ini terekspos, takutnya nanti malah menambah ketegangan. Kita berdiri di tengah-tengah saja supaya di sini reda, di sana juga reda”, kata Yoyoh.

Yoyoh memerintahkan pasukan Brimob membentuk barikade di antara kedua kelompok. Massa anti-Ahmadiyah terus merangsek dengan menendang dan melempari polisi sehingga barikade itu pun akhirnya bobol. Gas air mata mulai ditembakkan. Anak buah Yoyoh yang khawatir karena dia perempuan sudah menariknya agar meninggalkan lokasi. Tapi Yoyoh malah memarahinya, “memangnya kamu bisa menjamin dapat mengendalikan situasi jika saya tak ada di tempat?” tantangnya.



Yoyoh dengan wajah diolesi odol memimpin langsung pengamanan di lokasi kejadian pada 29 Juli 2010. Dalam foto ini, dia bersama Buldan Burhanudin, Mubalig Ahmadiyah Wilayah III Cirebon, berusaha menenangkan warga (sumber: Video JAI Manis Lor)

Dengan mata perih terkena gas air mata bercampur odol dia menyeru massa penyerang agar mundur. Pertumpahan darah sudah terbayang di benaknya. Tapi untungnya massa penyerang yang hanya tinggal berjarak sepuluh meter dari barikade warga Ahmadiyah tak berani maju dan hanya melempar batu atau mengacung-acungkan pedang dan balok kayu. Yoyoh lalu memerintahkan anak buahnya mengatur strategi untuk mengambil senjata-senjata itu satu per satu ketika mereka lengah dan anggota Brimob dapat membentuk barikade kembali.

Yoyoh juga mendatangi dan mengimbau warga

Ahmadiyah agar tenang dan membubarkan diri. Dia menjamin akan melindungi dan meminta warga agar mempercayakan urusan pengamanan kepada polisi. Ini terekam dalam video dokumentasi Ahmadiyah Manis Lor yang dapat dilihat di <https://youtu.be/Raet2YLo2jA>.

Lama-kelamaan massa penyerang rupanya lelah juga dan menjelang sore ketegangan semakin mereda. Sambil memberi arahan, Yoyoh tidak segan memunguti batu dan kayu bersama anak buahnya untuk diamankan. Dia menginstruksikan satuan lalu lintas untuk menyetop truk guna memulangkan massa. “Kalau perlu bayar saja. Kawal terus sampai perbatasan”, perintahnya jelas.

Hari itu Yoyoh berada di lokasi kejadian hingga jam 2 pagi. Setelah melayani wawancara dengan beberapa stasiun televisi nasional, Yoyoh pulang sejenak dan pukul 5:30 pagi dia sudah kembali berada di lokasi. Di ujung hari itu, dua hal mengganjal di benaknya: wajahnya yang kusam berminyak setelah bertugas sepanjang hari akan muncul di televisi, dan dia melewatkan salat dari zuhur sampai isya. “Saya terus berdoa saja, Ya Allah saya belum salat, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan,” kenangnya.

Langkah Pasca-kejadian

Mengingat ancaman kekerasan yang sedemikian besar, sepertinya sulit dipercaya hanya beberapa orang saja yang cedera ringan dan beberapa bangunan yang rusak terkena batu. Pada apel penutup operasi, Yoyoh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh pasukan yang telah

bekerja keras melakukan pengamanan. Dia ingat ketika itu seorang anggota Brimob yang dia perintahkan untuk memimpin doa terlihat menangis haru. “Saya juga kaget, biasanya anggota Brimob itu kan kuat dan tegar,” kata Yoyoh.

Tapi kerja keras Yoyoh tak berhenti di situ. Seusai kejadian, Yoyoh bergerilya mengunjungi pondok pesantren dan tokoh masyarakat. Setiap minggu dia berkeliling ke tiga sampai empat pesantren. Dia meminta Kabag Ops mengatur jadwalnya. Yoyoh mengibaratkan masyarakat saat ini seperti kodok di air yang dipanaskan pelan-pelan, tak terasa mati perlahan. Tanpa disadari orang sudah terpengaruhi paham radikal sehingga mudah sekali terhasut dan bertikai, bahkan dengan keluarga sendiri.

Yoyoh juga menelusuri sumber konfliknya, yang rupanya berasal dari warga Manis Lor sendiri. Dia memerintahkan anak buahnya untuk terus mengikuti dan memantau pentolan ormas setempat. “Pokoknya kalau ada ribut lagi, bapak yang saya angkat ke Polres, saya tidurkan di Polres”, tegasnya kepada sang provokator. Sejak itu belum pernah terjadi lagi aksi besar-besaran yang melibatkan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah di Manis Lor.

Keberhasilan Yoyoh ini diakui Buldan Burhanudin, Mubalig Ahmadiyah Cirebon, yang setelah peristiwa 2010 juga gencar melakukan *rabtah* atau silaturahmi ke pihak luar. Dalam video dokumentasi JAI Manis Lor yang disebut sebelumnya, Burhanudin mengakui bahwa selama ini jemaatnya kurang berkomunikasi dengan pihak luar. Setelah silaturahmi, keadaan mulai berubah dan pihak luar

sudah lebih melunak. “Ini bukan hanya kerja keras dari pihak jemaat tapi juga pihak polisi. Polres luar biasa bekerja keras”, katanya.

Dari mana sumber percaya diri itu

Tindakan Yoyoh dalam peristiwa tersebut membuatnya kerap dituduh melindungi dan memanjakan kelompok Ahmadiyah. Tapi Yoyoh tak menghiraukan tuduhan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak sedang melindungi Ahmadiyah tapi melindungi warga masyarakat. “Mau umat apa pun tugas polisi adalah mengamankan”, kata Yoyoh.

Yoyoh teringat dalam suatu pertemuan, seseorang menuduhnya memanjakan Ahmadiyah dan tidak pernah menengok kiai yang ketika istigasah terinjak sampai sakit. Yoyoh hanya tersenyum karena kiai yang dimaksud juga hadir di pertemuan tersebut dan dia bisa mengonfirmasi langsung bahwa tuduhan tersebut tidak benar. “Sebelum kejadian itu pun saya sering bersilaturahmi ke kiai dan masyarakat. Akhirnya orang itu malu sendiri”, kata Yoyoh.

Beberapa kalangan menyangsikan jika Yoyoh akan mengambil tindakan yang sama jika warga Ahmadiyah di Manis Lor hanya segelintir saja. Mereka menilai saat itu Yoyoh tak punya pilihan selain harus mengamankan karena dia tidak mungkin mengevakuasi kelompok sasaran sebagaimana di banyak kasus anti-Ahmadiyah lainnya. Tapi terlepas dari terpaksa ataupun tidak, Yoyoh menjalankan langkah-langkahnya dengan cukup mengesankan.



Yoyoh Indayah ketika menjadi inspektur upacara pada peringatan ulang tahun ke-65 Bhayangkara di Mapolres Kuningan, 1 Juli 2011 (Sumber: Humas Setda Kab. Kuningan).

Pandangan Yoyoh sendiri terhadap Ahmadiyah sebenarnya tak jauh berbeda dengan opini arus utama yang menganggap mereka kelompok menyimpang. Ketika menjelaskan desa Manis Lor, misalnya, Yoyoh menggambarkan mana wilayah penduduk “Ahmadiyah” dan mana wilayah penduduk “Islam”. Dalam satu kesempatan, Yoyoh juga pernah menyebut Ahmadiyah sebagai aliran sempalan. Yoyoh mengetahui Surat Keterangan Bersama dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat yang melarang kegiatan Ahmadiyah, juga keputusan Bupati untuk menutup masjid Ahmadiyah. Dia sendiri malah mendampingi Kepala Satpol PP ketika melaksanakan penyegelan masjid Ahmadiyah. Yoyoh juga mengaku jengkel dengan beberapa pemuka Ahmadiyah dari luar Manis Lor yang menurutnya

tidak kooperatif dan malah memperkeruh suasana. Tapi semua itu tidak membuatnya enggan untuk melindungi warga Ahmadiyah yang terancam.

Pengetahuan agama Yoyoh lebih banyak diperoleh dari keluarga serta pengajian di surau desa dan sekolah agama. Dia menolak dikaitkan dengan salah satu ormas atau aliran. Yang penting baginya dalam beragama adalah selalu mengingat bahwa manusia tak akan hidup selamanya dan kelak yang tersisa hanya amalan. Dia juga ingin agar agama jangan hanya menjadi baju atau gincu tapi harus benar-benar terasa manfaatnya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Yoyoh sadar bahwa tafsir agama bukan urusan polisi. Seperti banyak polisi lainnya, dalam soal ini Yoyoh menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tapi dia tidak mau dipusingkan dengan perdebatan soal fatwa atau kedudukannya dalam hukum tata negara. Menurutnya polisi cukup berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002. “Pokoknya tugas kita mengamankan dan menyelamatkan seluruh warga, siapa pun itu. Semua adalah umat Tuhan dan punya hak hidup.”

Payung hukum itulah yang membuat Yoyoh berani menindak siapa pun yang melanggar. Bagi Yoyoh, jika sudah masuk ranah hukum maka itu menjadi tanggung jawab individu, meskipun aksi di Manis Lor dilakukan berkelompok. “Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab pribadi. Sama ketika kita di akhirat itu tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita,” kata Yoyoh.

Sebagai warga asli Kuningan dan mantan intelijen, Yoyoh tampak sangat menguasai karakteristik penduduk dan peta kerawanan daerah yang dipimpinnya. Yoyoh juga tidak gentar menghadapi para pemrotes karena sudah mengenal dan mengetahui sepak terjang mereka. Dia misalnya sudah lama mengendus bisnis gelap pimpinan Gerakan Reformasi Islam (GARIS) yang gencar menolak Ahmadiyah. Benar saja, pada 2015 lalu, ketua organisasi ini beserta anaknya dipidana, masing-masing karena penipuan dan penadahan.

Tapi pengetahuan dan penguasaan situasi saja tak akan berdampak apa-apa jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tegas. Di sini Yoyoh menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Saat instansi pemerintah lain di Kuningan selalu mengeluh “tidak ada bensin” dan menyerahkan semua urusan kepada polisi, Yoyoh tampil dengan percaya diri. Dia memberikan pelajaran berharga bahwa ketegangan di masyarakat dapat diredakan jika pemimpin mau turun tangan.

Yoyoh juga tidak canggung memimpin pasukannya yang mayoritas pria. Di tengah kekisruhan dia menolak dievakuasi dan tetap memimpin pasukan di lokasi. Tapi dia juga tidak “sok kuat” sebagaimana kepala polisi lain yang seringkali merasa gengsi untuk meminta bantuan kepada atasan. Yoyoh tidak segan meminta bantuan dan *back-up* pasukan dari Polda dan Polres sekitar ketika diperlukan.

Salah satu kiat Yoyoh dalam memimpin anggotanya yang kebanyakan pria adalah dengan menganggap mereka sebagai rekan. Sejak kanak-kanak, Yoyoh sudah terbiasa

bermain dengan temannya yang lawan jenis. Dia mahir melakukan permainan khas anak laki-laki seperti “*getok lele*” atau gatrik dan “*kukutiwan*”. Permainan yang terakhir ini semacam petak umpet berkelompok pada malam hari. Anak-anak dibagi ke dalam dua kelompok kemudian salah satunya mencari anggota kelompok lain yang bersembunyi di sekitar kampung. Semasa remaja, Yoyoh juga bergiat di Karang Taruna desa.

Ketika Yoyoh berbicara di depan peserta istigrasah, ada seseorang yang menceletuk dan meremehkannya. Tapi Yoyoh tidak gentar dan menjelaskan, “saya berdiri di hadapan bapak bukan berarti saya imam, tapi saya adalah penanggungjawab keamanan di Kuningan.” Yoyoh juga tidak ciut ketika ada yang mempertanyakan keislamannya. “Mohon maaf, saya naik haji 2007, walau kepala saya tak berjilbab, insya Allah hati saya berjilbab. Karena kondisi kedinasan saja yang tak membolehkan saya berjilbab,” jelasnya. Yoyoh kini berjilbab setelah dua tahun lalu Polri membolehkan Polwan menggunakan jilbab. Tidak hanya itu, Yoyoh dan keluarganya juga sudah tiga kali umroh, terakhir pada 2016.

Menjadi Dirbinmas, Memperluas Cakupan Kerja

Meski tak lama menjabat sebagai Kapolres, masa kepemimpinan Yoyoh cukup membekas di benak para koleganya. Upacara serah terima jabatan dan perpisahan Yoyoh di Polres Kuningan diwarnai isak tangis haru para anggotanya. Walau sudah berpindah tugas, Yoyoh masih

sering dimintai pendapat dan masukannya mengenai persoalan-persoalan di Kuningan. Hubungan Yoyoh dengan sejawatnya sangat baik, beberapa bahkan sudah seperti saudara dan dekat dengan anak-anaknya, Dewi dan Devin.

Yoyoh menilai perpindahan jabatannya adalah promosi biasa. Meski mengakui bahwa polisi wanita masih sering mendapat perlakuan berbeda, dia merasa bahwa dibanding masa sebelumnya, saat ini Polri semakin memandang penting peran polisi wanita.

Setelah lima tahun lebih menjabat Wadirbinmas Polda Jabar, pada 2016 Yoyoh diangkat menjadi Dirbinmas Polda Sulawesi Barat yang menaikkan pangkatnya menjadi Kombes Pol. Menurutnya tantangan Kapolres memang lebih berat, tapi dia menikmati peran barunya itu karena bisa dekat dengan masyarakat yang memang adalah *passion*-nya.

Dia bisa memperluas bidang garapan kerja yang sudah lama menjadi perhatiannya seperti soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga soal kelestarian lingkungan. Dia juga mendapat tantangan baru karena di daerah tertentu di Sulawesi Barat, Muslim adalah minoritas. Dia, misalnya, bisa bersilaturahmi ke tempat terpencil seperti Mamasa yang jaraknya 12 jam dari Mamuju di tengah malam Natal sebagai Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) dan menyambangi tokoh-tokoh masyarakat.

Pada 2013 nama Yoyoh masuk dalam daftar 20 pegiat perdamaian yang dicalonkan *Koran Tempo* untuk diulas dalam edisi khusus Hari Kemerdekaan. Tapi Yoyoh tersisihkan karena setelah pindah ke Polda, dia dinilai



Kombes Yoyoh Indayah memakai seragam lengkap Dirbinmas Polda Sulawesi Barat (Foto: Dokumentasi Pribadi Yoyoh Indayah).

kurang terlihat perannya dalam membela minoritas agama. Posisi barunya memang tak seleluasa saat menjadi komandan wilayah. Tapi di posisi barunya itu Yoyoh terlibat dalam persoalan masyarakat yang lebih luas serta bersentuhan dengan lebih banyak kelompok terpinggirkan seperti masyarakat miskin dan anak jalanan. Kepedulian yang melampaui tugas pokoknya sebagai polisi ini sudah dia tunjukkan sejak menjabat Kapolres.

Banyak yang berandai-andai terobosan apa yang akan Yoyoh buat jika dia menjadi Kapolda Jawa Barat. Sejak Kombes Rumiah dilantik menjadi kapolda perempuan pertama pada 2008 lalu di Banten, belum ada lagi polisi

wanita yang menjadi kapolda. Harapan agar ada lebih banyak polisi wanita yang menjadi kapolda ini pernah disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian sendiri. Yoyoh yang sudah 35 tahun mengabdikan diri di Polri dan berprestasi mestinya bisa menjadi salah satu kandidat. Usia kariernya mungkin tinggal beberapa tahun lagi, tapi Yoyoh masih bercita-cita untuk menempuh Sespimti dan menyematkan tanda bintang Perwira Tinggi.

Penutup

Perjalanan hidup dan karier Yoyoh dilatari oleh berbagai perubahan sosial-politik dan perubahan institusional kepolisian, terutama pasca-demokrasi. Naiknya intoleransi, konflik keagamaan dan sekian tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya itu muncul ketika Polri tengah berbenah setelah berpisah dengan TNI. Di tengah berbagai kabar dan citra miring mengenai Polri, mulai dari “polisi gendut” (ketidakcakapan) sampai “rekening gendut” (korupsi), Yoyoh memberikan secercah harapan.

Yoyoh menunjukkan bahwa polisi bisa menjadi bagian penting dalam proteksi minoritas, dan dia menunjukkannya dengan keteladanan dan strategi bertahan yang menarik. Dia berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan tokoh agama, serta menghadapi kultur kepolisian yang didominasi laki-laki. Dia juga bisa mengurus karier dan keluarganya tanpa harus mengorbankan salah satunya, serta mendamaikan pandangan keagamaan pribadinya dengan tugasnya sebagai polisi untuk melindungi segenap warga negara.***

Mengagungkan Tuhan, Memuliakan Manusia: Kiprah Ahmad Syafi'i Mufid dalam Binadamai

Siswo Mulyartono

“**S**aat ini, Ibu Pertiwi memanggil kita para tokoh-tokoh agama, pemuka agama sebagaimana di dalam naskah Sumpah Pemuda. Ayo kita bersama-sama membangun kembali komitmen kebangsaan kita. Mari sama-sama membangun dan ciptakan suasana aman-damai untuk Jakarta, sehingga juga bisa menyebar di seluruh kawasan Indonesia. (*Ahmad Syafi'i Mufid, Tugu Proklamasi Jakarta, Kamis, 24 November 2016, viva.co.id “Demo 2 Desember, FKUB DKI Serukan Jakarta Aman dan Damai”*)

Beberapa polisi mendatangi rumah salah satu warga Kavling Bina Marga Rawa Lumbu Bekasi. Kedatangan anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya itu untuk koordinasi dengan Ahmad Syafi'i Mufid Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta menjelang pengamanan aksi bela Islam jilid satu: 14 Oktober 2016.

Penggunaan isu agama dalam pemilihan gubernur Jakarta menimbulkan polarisasi tajam di masyarakat. Puluhan bahkan ratusan ribu orang dari dalam dan luar Jakarta mengikuti demonstrasi berjilid-jilid menuntut aparat keamanan menangkap salah satu calon gubernur. Situasi tersebut, membuat Syafi'i makin sering mengumpulkan pimpinan majelis-majelis agama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mendinginkan suasana.

Namun, upaya Syafi'i menyerukan damai di Jakarta bukan hanya saat situasi panas menjelang pemilihan. Bukan pula karena semata-mata sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi. Ia telah lama mendedikasikan hidupnya untuk binadamai dan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya di Jakarta. Bekasi dan Purwakarta juga menjadi tempat lain pengabdianya.

Mengembangkan Forum Kerukunan

Ia mulai terlibat dalam lembaga kerukunan Jakarta ketika Sutiyoso menjabat gubernur periode kedua. Tepatnya 2004. Kala itu belum ada FKUB. Namun, Jakarta sudah punya wadah untuk menampung aspirasi umat beragama. Namanya Forum Komunikasi dan Konsultasi Umat

Beragama (FKKUB) yang sudah ada sejak 5 Mei 2000.

Forum tersebut beranggotakan 28 orang yang berasal dari pimpinan majelis-majelis agama dan beberapa tokoh organisasi etnis di Jakarta. Syafi'i dipercaya sebagai ketua forum itu sejak 2004. Saat itu, ia juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta dan peneliti utama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (sering disebut PBM 2006) sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDN-MAG/ Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Syafi'i adalah salah satu anggota tim Kemenag yang merumuskan PBM 2006. Ia juga terlibat dalam penyusunan buku Tanya Jawab PBM 2006 dan sosialisasi di tingkat nasional. Beleid tersebut mengatur mekanisme pendirian tempat ibadah dan pembentukan FKUB di tingkat provinsi dan kotamadya serta kabupaten.

FKKUB Jakarta melakukan rapat konsultasi kepada gubernur dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi DKI Jakarta untuk merespon PBM 2006. Pada 2007, mereka sepakat membentuk FKUB tingkat provinsi dan kotamadya/kabupaten di Jakarta. Pimpinan majelis agama



Ahmad Syafi'i Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta (Foto: Media Indonesia)

Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu menunjuk Syafi'i sebagai ketua FKUB Provinsi. Awalnya ia menolak. Tapi karena majelis-majelis agama memintanya untuk terlibat dalam forum kerukunan Jakarta, Syafi'i menerima amanat itu.

Ia mafhum kalau forum tersebut amat rentan disalahgunakan kelompok mayoritas untuk mendominasi minoritas. Sebab, PBM 2006 membatasi jumlah anggota FKUB. Porsi keterwakilan suatu majelis agama di FKUB pun ditentukan berdasarkan jumlah umatnya. Jakarta mayoritas Muslim. Otomatis Islam paling banyak mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota FKUB. PBM 2006 juga tak mengatur mekanisme pembentukan pengurus FKUB. Karena itu tak jarang di daerah-daerah lain, posisi-posisi kepengurusan FKUB yang strategis dikendalikan majelis agama yang mayoritas.

Dari 21 anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta, 14 mewakili muslim. Keuskupan Agung Jakarta (Katolik) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Kristen) masing-masing memiliki dua wakil. Sisanya mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jakarta, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Anggota FKUB provinsi menyerahkan sepenuhnya kepada Syafi'i untuk menentukan susunan kepengurusan. Ia bisa saja menempatkan anggota yang seiman duduk di jabatan strategis. Namun, ia tak mau seperti itu. Posisi wakil ia percayakan kepada salah satu perwakilan dari Keuskupan Agung Jakarta.

Perwakilan Matakin ia tempatkan sebagai koordinator dialog dan pemberdayaan umat beragama. Tugas sosialisasi regulasi keagamaan di Jakarta ia amanatkan kepada perwakilan Walubi. Jika ada umat beragama ingin menyalurkan aspirasinya, mereka harus menemui anggota FKUB provinsi dari PHDI selaku Koordinator Komisi Aspirasi.

Syafi'i melakukan itu supaya FKUB menjadi organisasi perdamaian antar agama yang berjalan sehat dan tidak saling mencurigai. Ia tak pernah mengambil keputusan secara *voting*, melainkan musyawarah. Ia wajibkan semua anggotanya hadir di FKUB seminggu dua kali. Entah itu dalam rangka pemberian rekomendasi izin tempat ibadah atau mendiskusikan masalah kerukunan ibu kota.

Ia juga mendorong anggotanya untuk meningkatkan

kapasitas dalam membina perdamaian. Mengutus mereka sebagai peserta atau narasumber di acara dialog lintas keagamaan, pelatihan kepemimpinan, dan membaca buku atau literatur keagamaan dan perdamaian. Ia juga rutin membuat buku laporan tahunan kegiatan dan penggunaan anggaran FKUB sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Di lingkup eksternal, Syafi'i berusaha mendorong FKUB menjadi jembatan komunikasi antar agama. Ia rutin mengadakan dialog lintas agama. Dialog bertemakan kebangsaan dalam peringatan Natal atau hari besar keagamaan lainnya bisa dijadikan contoh. Tiap kali mengadakan dialog, ia lebih banyak mengulas masalah kebangsaan. Bukan masalah perbedaan atau pun kesamaan agama-agama.

Ia melihat bahwa keragaman Indonesia perlu dirajut melalui kebangsaan. "Ada apa dengan kita? Di mana komitmen kebangsaan kita? Padahal kita telah bersepakat berpancasila dan berbhinneka," ujar dia. Karena itu, dalam dialog maupun kerjasama lintas agama ia selalu menekankan perlunya meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. "Kalimat itu [meneguhkan kembali komitmen kebangsaan] saya jadikan etika dalam kerja sama antar anak bangsa yang berbeda-beda agama dan golongan."

Ia mengundang jemaat dari Islam maupun non-Muslim dan *stakeholder* pemerintahan DKI Jakarta ketika mengadakan dialog. "Pemerintah dan masyarakat harus dilibatkan dalam dialog kebangsaan dan kerukunan umat

beragama karena menjaga Indonesia adalah tugas bersama,” kata dia.

Buku “Kontroversi Gereja di Jakarta” (CRCS UGM 2011) yang meneliti dua belas gereja di wilayah Jabodetabek menemukan bahwa keberhasilan dan kegagalan menangani konflik pendirian tempat ibadah salah satunya ditentukan oleh tindakan FKUB. Lembaga-lembaga pemantau Hak Asasi Manusia di Indonesia kerap mengkritik keberadaan FKUB. Karena, institusi ini sering menghambat kebebasan beragama terutama dalam mendirikan rumah ibadah.

FKUB yang berfungsi sebagai pemberi rekomendasi sebelum kepala daerah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), kerap kali menolak mengeluarkan surat rekomendasi. Kesulitan memperoleh surat tersebut kerap menimpa kelompok minoritas, meskipun semua syarat administrasi sudah terpenuhi.

Merujuk PBM 2006, kewenangan pemberian rekomendasi ada pada FKUB kabupaten dan kota madya. Bupati atau walikota yang memberikan IMB. Namun, di wilayah DKI Jakarta, tak hanya FKUB kotamadya, FKUB Provinsi juga bisa mengeluarkan rekomendasi dan hanya gubernur yang mengeluarkan IMB.

Syafi'i tak menampik fakta bahwa banyak anggota FKUB maupun pejabat pemerintah di Jakarta belum paham tentang regulasi pendirian tempat ibadah. Karena itu, mereka kerap mempersulit bahkan melanggar kebebasan beragama.

Bagi Syafi'i, FKUB dan pemerintah harus netral dan memfasilitasi umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadah. "Jika terjadi penolakan dari warga sekitar, FKUB dan pemerintah wajib memediasi mereka. Bukan memprovokasi dan menjadi bagian masalah". Indeks kerukunan Jakarta belum baik: masih ada tempat-tempat ibadah yang dipermasalahkan warga dan politisasi SARA yang terjadi belakangan ini. "Ini tantangan buat FKUB dan pemerintah Jakarta."

Terkait rumah ibadah di Jakarta, ia mengedepankan dialog ketika terjadi masalah. Ia akan mengundang dan mendatangi FKUB kotamadya serta pihak-pihak yang bertikai. Jika situasi konflik mengarah ke kekerasan, ia akan mengerahkan sumberdaya yang ia miliki. Contohnya, ia akan menggunakan identitas sebagai pengurus MUI Jakarta untuk mendekati umat Islam yang menolak pembangunan rumah ibadah atau masalah lainnya. Ia sebagai ketua FKUB provinsi juga akan meminta ketua PGI atau KWI, misalnya, untuk mengendalikan umatnya.

Syafi'i berusaha mencegah konflik tempat ibadah di Jakarta menjadi benturan sosial atau kekerasan fisik. "Pernah ada penolakan gereja di Kampung Duri Jakarta. Kami pertemukan pihak-pihak yang berselisih. Bisa selesai di meja wakil Gubernur. Tanpa keterlibatan seperti itu akan lama selesainya. Di Kepulauan Seribu, pernah ada masalah juga. Hampir terjadi kekerasan. Tapi kita bisa ajak dialog. Bisa minta tolong PGI. Masalah bisa selesai."

Bukan hanya ribut antar agama. Syafi'i juga pernah

menangani masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pada 6 Februari 2011, tiga anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dihakimi warga hingga tewas. Insiden ini merembet ke beberapa daerah. Masjid-masjid Ahmadiyah di beberapa daerah Indonesia disegel dan beberapa kepala daerah mengeluarkan surat pelarangan terhadap Ahmadiyah. Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dipegang Fauzi Bowo berencana mengeluarkan surat keputusan pelarangan Ahmadiyah di Jakarta.

Tak lama setelah insiden Cikeusik, Syafi'i mengumpulkan para tokoh agama. "Jangan sampai ada satu genteng pun rusak dan setetes darah anggota Ahmadiyah tertumpah di Jakarta," kata dia di forum pertemuan tersebut. Ia juga merekomendasikan kepada gubernur supaya tidak mengeluarkan surat pelarangan terhadap Ahmadiyah Jakarta. Gubernur Fauzi Bowo batal mengeluarkan surat tersebut. Bagi Syafi'i, penganut Ahmadiyah Indonesia adalah warga Indonesia yang harus dilindungi.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2012 membatasi kepengurusan atau anggota FKUB selama dua periode. Beberapa anggota meminta pemerintah daerah mengubah beleid tersebut supaya Syafi'i tetap memimpin FKUB. Namun, ia menolak permintaan itu.

Syafi'i memahami kegelisahan anggotanya: takut FKUB diurus orang-orang yang tak tepat. Maksudnya, anggota atau kepengurusan yang baru merusak kerja-kerja kerukunan

yang sudah dibangun. Karena itu, ia menggagas Sekolah Agama dan Binadamai (SABDA) untuk merekrut calon anggota FKUB. Tujuan lainnya ialah membuat jaringan lintas iman dari semua unsur komunitas agama di Jakarta dan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peran agama di dalam memperkuat demokrasi dan perdamaian kepada majelis-mejelis agama.

“Jakarta merupakan tempat bertemu berbagai kelompok kepentingan yang bisa berujung pada kerja sama dan konflik. Bagaimana mengelola serta menyelesaikan konflik merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki seluruh anggota FKUB di semua tingkatan dan wilayah. Karena itu, perlu menyiapkan kader-kader binadamai yang siap dan mampu menjadi anggota FKUB DKI Jakarta melalui SABDA,” kata Syafi’i dalam sambutan pembukaan SABDA angkatan pertama di Balai Kota DKI Jakarta pada 8 Juni 2015.

SABDA melibatkan para pakar konflik dan perdamaian dari akademisi, peneliti, dan aktivis sebagai pengajar. SABDA mengundang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Paramadina. Peneliti PUSAD Paramadina dan aktivis sosial dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ma’arif Institute, Wahid Institute, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, juga menjadi pengajar SABDA. Selain mereka, pengajar SABDA berasal dari anggota FKUB, Kementerian Agama, dan Kepolisian.

“Saya memperoleh banyak sekali pengetahuan tentang



Ahmad Syafi'i Mufid (ketiga dari kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pengurus PGI Wilayah Jakarta dalam Pembukaan Sidang Wilayah VII PGI Wilayah DKI Jakarta 2015 di Balai Kota DKI Jakarta (Foto: Reza/Beritajakarta.com)

agama-agama melalui SABDA. Saya juga memperoleh pengetahuan bagaimana agama-agama yang berbeda-beda itu bisa saling mengenal, memahami, dan menerima, sehingga terwujud persaudaraan dan kebersamaan yang dilandasi perdamaian satu sama lain,” kata Pendeta Frida Yulianita Situmorang, alumni SABDA III dari PGIW DKI Jakarta.

Para peserta dibekali materi-materi tentang tugas dan fungsi FKUB, manajemen konflik dan dialog, pemberdayaan masyarakat, dan beberapa materi lain seputar regulasi dan konflik keagamaan di Indonesia. Para pengajar sekolah ini menggunakan metode dialog (tanya-jawab), penekanan kepada partisipasi peserta, diskusi kelompok, dan *role*

playing yang melibatkan *stakeholder* pemerintah dan anggota FKUB dalam menangani sengketa keagamaan, ketika menyampaikan materi.

Sekolah ini berlangsung selama lima hari dan sudah menghasilkan lima angkatan, kurang lebih 350 alumni. Mereka berasal dari majelis-majelis agama yang ada di Jakarta. SABDA juga mengundang peserta dari Ahmadiyah, Baha'i, FPI Jakarta dan kelompok penghayat, serta para penyuluh agama yang bertugas di wilayah Jakarta. SABDA mulai dijalankan pada Juni 2015. Sejak saat itu, SABDA menjadi agenda rutin tahunan FKUB Provinsi DKI Jakarta.

Sekolah ini juga cermin kerja sama antar agama, antar lembaga baik pemerintah maupun swasta. Disebut demikian karena biaya pelaksanaan sekolah ini sebagian ditanggung majelis-majelis agama. Misalnya, SABDA angkatan I yang menjadi tuan rumah adalah PGI wilayah Jakarta. Pihak PGI menyiapkan tempat pelaksanaannya. Majelis agama lain memberikan konsumsi kegiatan. FKUB juga menggandeng PUSAD Paramadina dan Pemda dalam pembiayaan kegiatan untuk mengundang narasumber.

SABDA tidak berhenti di aktivitas kelas. Para alumni SABDA juga membentuk jaringan alumni dan sejumlah kegiatan alumni sesudah mengikuti kelas SABDA. Minimal satu bulan sekali, para alumni SABDA berkumpul dan mengadakan kegiatan di masyarakat. Alumni SABDA membentuk media komunikasi berupa grup Whatsapp alumni.

Sejauh pengamatan penulis, grup tersebut tak hanya

berfungsi sebagai media penyebaran informasi kegiatan FKUB. Tapi juga sebagai *sharing* informasi untuk mencegah konflik kekerasan di Jakarta. Saat demo anti-Ahok pada 4 November 2016 rusuh, beberapa anggota grup mengabarkan situasi Jakarta, terutama di lokasi-lokasi tempat ibadah milik non-Muslim. Informasi tersebut penting supaya konflik tidak meluas ke tempat ibadah di Jakarta dan anggota FKUB bisa berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Pemberdayaan Masyarakat

Syafi'i tak lagi muda. Ia lahir pada 4 Juli 1950 di Desa Jungpasir, Demak, Jawa Tengah. Ia besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Ia menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat di desa tetangganya, Mutih Kulon. Ia juga sempat mengenyam pendidikan madrasah diniyah di desanya.

Setelah menamatkan sekolah dasar, ia mendalami ilmu agama (*nyantri*) di Pondok Pesantren Kulon Banon, Kajen, Pati, Jawa Tengah. Syafi'i juga menamatkan pendidikan menengahnya di pesantren tersebut. Menjelang akhir pendidikan menengah atasnya, situasi di Jawa Tengah sedang mengalami ketegangan akibat peristiwa 30 September 1965. Kondisi ekonomi orangtuanya memburuk. Orangtuanya meminta dia tetap *nyantri*. Akhirnya Syafii memutuskan meninggalkan pesantren, kuliah ke Semarang.

“Kalau saya ke pesantren [tetap *nyantri*], lalu pulang dari pesantren saya mau ngapain? *Kan*, di kampung itu [desa dia] masjid hanya ada empat, dan sudah ada kiainya. Jumlahnya juga ada empat orang. Lalu saya di mana? Orangtua saya

mempersilahkan [kuliah]. Tetapi dengan catatan kondisi ekonomi orangtua seperti ini [tak ada biaya].”

Ia mengayuh sepeda ontel menuju Semarang untuk daftar kuliah. Ia berhasil memperoleh sarjana muda pada 1975 di Fakultas Hukum IAIN Semarang. Gelar tersebut ia raih dengan susah payah dan sebagai langkah awal untuk melanjutkan pendidikan serta karier berikutnya.

Pada saat di Semarang, Syafi'i bergaul dengan siapa saja. Bertemu dengan banyak orang. Dari tukang becak, pedagang sayur, guru hingga aktivis organisasi Islam. Ia jumpa tokoh-tokoh Syariat Islam (SI). Dari perjumpaan tersebut, ia tertarik mempelajari pikiran-pikiran dan gerakan HOS Tjokroaminoto.

“Kampung Kulitan namanya. Di situ pusatnya para tokoh SI berkumpul. Rumah yang dipakai adalah rumahnya K.H. Moenawar Cholil. Di rumah itu, saya banyak belajar tentang siapa sosok KH. Moenawar Cholil, dan siapa keluarganya. Di kampung Kulitan ini saya banyak belajar tentang organisasi. Saya belajar tentang Masyumi, belajar tentang SI, juga belajar tentang sosial-budaya Semarang.”

Syafi'i pernah bekerja di Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). “Selain kuliah, sebelum berangkat atau setelah pulang kuliah, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PSII. Jadi di usia muda itu, saya sudah mengenal partai.”

“Saya bertahan kerja di kantor Syarikat Islam sampai kuliah tingkat tiga. Karena selanjutnya, ternyata organisasi PSII mengalami perpecahan antara kelompok Gobel dengan kelompok Hasan Ibrahim. Dari peristiwa ini saya belajar

dan berpikir bahwa ternyata yang namanya PSII dalam perjalanannya sering mengalami perpecahan. Di saat itu saya bersikap: aku tidak suka yang namanya perpecahan. Saya tidak mau lagi kerja.”

Ia memilih aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Di organisasi HMI itu lah banyak orang dipersatukan. Menyatukan anaknya NU, anaknya SI, anak Muhammadiyah,” kata dia. Syafi’i pernah menjadi Ketua Komisariat HMI dan Ketua Dewan Mahasiswa.

Pada 1972, ia putus kuliah karena tak ada biaya. Ia pulang ke kampung halamannya, melakukan pemberdayaan di masyarakat. “Ketika berada di kampung saya tidak berdiam diri. Saya mendirikan sekolah yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). Di antara muridnya itu ada adik saya yang kedua. Dia tamat dari sekolah MWB ini. Pertimbangan dimasukkan ke sekolah MWB karena sekolah umum masih sulit dan mahal. Madrasah ini sekarang sudah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).”

Enam bulan di kampung halaman, Syafi’i memutuskan kembali ke Semarang. Ia tak langsung melanjutkan kuliah, namun mengajar di sekolah Al-Irsyad dan Al-Khairiyah. “Pada tahun 1974, karena sudah merasa cukup penghasilan yang didapat dari mengajar, kemudian saya melanjutkan kuliah lagi. Dan pada tahun 1975, saya mengikuti ujian negara. *Alhamdulillah* ternyata lulus menjadi seorang sarjana bergelar BA [sarjana muda].”

Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (strata satu/S1). Itu ia lakukan pada 1976. Biaya kuliah ke

jenjang tersebut sangat mahal. Namun, Syafi'i tak kekurangan akal. "Jadi di samping mengajar, saya juga memberikan les privat. Padahal waktu itu saya sudah menjadi Kepala Sekolah. Semua kegiatan ini saya lakukan untuk menambah biaya kuliah," kata dia. Ia berhasil menamatkan pendidikan jenjang tersebut pada 1978.

Selain mengajar dan kuliah, ia isi waktunya dengan ceramah-ceramah pengajian di masjid, sekolah, atau kantor desa. Aktivitas tersebut ia namakan sebagai *mulang*. Setiap minggu pagi, misalnya, ia mengisi kuliah subuh. Bahkan sesekali ia mengisi ceramah di luar kota.

Selesai menamatkan kuliah S1, ia menikah. Ia sempat tinggal bersama istrinya di perumahan tipe 33 Perumnas Banyumanik. Di lingkungan tersebut, ia terpilih sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah sekaligus menjadi Dewan Keluarga Masjid (DKM). Syafi'i juga dipercaya untuk menyatukan seluruh masjid-masjid yang ada di sana.

"Saya tidak mengerti kenapa saya bisa terpilih menjadi orang yang menyatukan masjid. Padahal di antara para ketua masjid di sana sudah pada cukup umur. Bahkan ada yang berprofesi sebagai tentara, polisi dan sebagainya. Sungguh pun demikian, mereka itu pada ikut ke saya. Mungkin, karena *mulang* tadi itu. Saya dianggap mampu *mulang* sekaligus *ngemong* (mengasuh) orang. Mampu menghargai orang. Menghormati orang".

Pada 1981, ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Penelitian Aliran Kerohanian dan Keagamaan

Badan Litbang Departemen Agama Semarang. Meski sudah menjadi PNS, ia tak meninggalkan rutinitas untuk mengelola dan berdakwah di masjid-masjid Semarang. Kala menjalankan rutinitas tersebut, Syafi'i bukan tidak memiliki tantangan.

Ia pernah dituduh telah menjadi Muhammadiyah ketika berdakwah di salah satu masjid pada 1982. Di beberapa tempat, perbedaan antara Muhammadiyah dan NU sering menjadi isu sensitif di masyarakat meskipun keduanya sama-sama Islam Sunni. Kedua orangtuanya khawatir kalau-kalau Syafi'i pindah ke Muhammadiyah.

“Bapak saya itu kenal dengan ulama besar NU Semarang, namanya KH. Hilal Sya’ban. Kiai ini bilang kepada bapak saya, Pak Mufid hati-hati, anakmu itu *kok* sepertinya bau-bau Muhammadiyah,” kata dia mengawali ceritanya. Tuduhan tersebut bermula ketika Syafi'i memimpin masjid yang bukan masjid kampung dengan cara-cara bukan NU.

“Saya tidak tahu tradisinya [jemaah masjid itu]. Yang jelas kalau dalam bahasa buku saya, *Tangklukan: Abangan dan Tarekat* [2006], mereka itu orang Tangklukan. Yang kemudian saya lakukan ini merupakan politik dakwah, dalam bahasanya pak [Muhammad] Natsir sebagai *fiqhud dakwah*. Kalau orang-orang yang seperti ini [Tangklukan] saya ajak mereka untuk model tradisi Demak atau NU belum tentu mau. Bagaimana caranya supaya dibuat gampang? *Yuk*, kita sholat tarawih yang 11 rakaat saja.”

Ia tak memilih sholat tarawih model NU yang berjumlah 23 rakaat karena: “*Lha* orang beragamanya saja baru saat

bertemu dengan saya kok! Kata Rasulullah, *Yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunassiru* [gampangkanlah jangan dipersulit, gembirakanlah jangan ditakut-takuti]. Jadi saya itu mengajarkan agama di sini ini, yang gampang-gampang saja, pak!” kata dia ketika menjelaskan kepada ayahnya.

“Setelah mendengar penuturan saya itu, bapak saya hanya berkata, begitu ya? Ya sudah *ngga* apa-apa. *Lha* ini bapak saya. Lain lagi dengan ibu saya: *Syafi'i, engko le aku mati, ko ge ora gelem lungo nang kuburanku. Ora gelem duei aku. Jarene koe Muhammadiyah?* [Syafi'i nanti kalau aku sudah mati, jangan-jangan kamu tidak datang ke kuburanku, tidak mau mendoakan aku karena kata orang kamu sudah menjadi Muhammadiyah].

Syafi'i bukan orang yang mudah puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Sebisa mungkin ia terus mengembangkan pengetahuannya baik melalui bidang profesinya maupun dengan cara melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sekitar 1982, ia mengikuti Program Pelatihan Penelitian Agama yang diadakan Kemenag. Dari situ, ia belajar sosiologi di bawah bimbingan Prof. Harsja W. Bachtiar.

“Setelah saya mengarungi berbagai dunia gerakan, dunia macam-macam itu, dunia syari'ah yang suka pecah belah, pada 1981 saya mengurus aliran. Dan pada 1982, saya bertemu dengan Prof. Harsa Bachtiar. Dari sini, saya mulai menganalisis semua persoalan keagamaan itu dari kacamata sosiologi. Dia membimbing saya untuk meneliti

Syiah. Jadi karya ilmiah saya itu, diawali dengan penelitian tentang Syiah.”

Pada 1986, ia mengikuti Program Pelatihan Penelitian Agama tingkat lanjutan di Jakarta. Kali ini ia belajar antropologi di bawah bimbingan Prof. Parsudi Suparlan. Perjumpaannya dengan antropologi membuat Syafi'i mengerti kenapa ada aliran keagamaan, kenapa ada NU, ada Muhammadiyah. “Itu karena manusia mempunyai pemikiran. Manusia itu berpikir. Dari berpikir itulah kemudian mengkonstruksi menjadi budaya,” kata Syafi'i.

Ketertarikannya kepada antropologi mendorong dia melanjutkan kuliah strata dua (S2) di Universitas Indonesia bidang antropologi. Sejak saat itu, ia mulai menetap di Jakarta. Biaya kebutuhan hidupnya ia tutupi dengan gaji dan honor menulis buku serta artikel di media. Syafi'i juga pernah dikirim ke Amerika untuk belajar manajemen perencanaan. Itu terjadi pada 1992. Ia belajar di The International Training Development, University of Massachusetts, Amerika Serikat, selama dua bulan. Saat itu, Syafi'i bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Kanwil Agama DKI Jakarta.

Ia juga sempat mengajar di Universitas Islam “45” (Unisma) Bekasi dan Universitas Islam At-Thahiriyah Jakarta. Selain sebagai dosen, ia dipercaya sebagai dekan Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas At Thahiriyah. Pada 1993, ia naik pangkat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Jakarta.

Karir PNS-nya tidak berhenti sampai di situ. Ia pernah

dipromosikan sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama sebagai pejabat eselon II dan sekaligus sebagai kepala kantor. Hanya satu tahun ia menjabat sebagai sekretaris Badan Litbang Agama. Selanjutnya ia dimutasi ke Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Ditjen Binbaga), Kementerian Agama, sebagai sekretaris.

Ia juga sempat dipromosikan sebagai inspektur. Namun, ia mengundurkan diri. Memilih untuk melanjutkan kuliah. Pada 2001, Syafi'i mengikuti program strata tiga (S3) di Universitas Leiden, Belanda, yang dikelola International Institute for Asian Studies (IIAS), atau Lembaga Internasional Untuk Kajian Asia, di bawah proyek "Islam di Indonesia: Diseminasi Otoritas Keagamaan Pada Abad 20."

Sejak pindah di Jakarta, ia mulai menempati rumah di Bekasi. Di tempat tinggalnya itu, ia bersama warga dan DKM masjid di Rawalumbu, Kota Bekasi, menggagas "Kampung Madani" pada 2006. Hingga saat ini, kegiatan "Kampung Madani" masih berjalan. Kegiatannya berkaitan dengan keagamaan, kebersihan, dan keamanan.

"Inti dari Kampung Madani adalah saling menghormati satu-sama lain dan menjadikan kawasan atau lingkungan yang indah tertata, dengan warga yang saleh dan keluarga yang sakinah dan masyarakat berjamaah atau gotong royong. Tidak ada pengkotak-kotakan asal usul. Kampung Madani menyatukan perbedaan dengan sikap saling menghormati

antar warga dan melakukan kegiatan secara bersama,” kata ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Prof. Anas Muchtar saat bincang-bincang di Radio Suara Bekasi, 30 September 2013.

Menurut Syafi'i, sebelum ada “Kampung Madani” banyak kasus-kasus seperti pencurian dan penyebaran narkoba serta minum keras menimpa warga Rawalumbu. Satu masjid dengan masjid lainnya di daerah tersebut juga jalan masing-masing, tak ada kerja sama. “Berkat adanya “Kampung Madani” warga bisa bergotong royong mengatasi masalah-masalah tersebut. DKM-DKM masjid juga bersatu meski beda-beda pemahaman keagamaan,” kata dia.

Tahun depan masa jabatan Syafi'i sebagai ketua FKUB Provinsi berakhir. Namun, ia tak akan pensiun melakukan kerja binadamai. Hidupnya mengabdikan untuk binadamai. “Dalam rangka mengagungkan Tuhan, memuliakan manusia. Bukan agama yang [saya] tuju melainkan Tuhan. Agama adalah jalan menuju Tuhan. Kita tak boleh merendahkan manusia karena beda agama. Perbedaan agama justru untuk *musabaqah* inovasi kebaikan. Melalui cara pandang ini, saya bisa berdialog dan kerja sama dengan penganut agama apa pun, bahkan dengan kaum tak beragama.”

Saat ini, ia sedang membangun pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. “Saya akan fokus mengurus pesantren sesudah pensiun dari FKUB.” Yang ia bangun bukan pesantren biasa yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. “Saya akan bekali santri-santri dengan ilmu kewirausahaan,” kata Syafi'i, “Supaya mereka kelak bisa

mandiri ketika berdakwah”. Karena itu, ia namai: Pondok Pesantren Entrepreneur Kiai Demak.

Syafi’i berharap pondok pesantren tersebut bisa bermanfaat bagi warga sekitar dan Indonesia. “Selain belajar agama, mereka bisa belajar usaha,” kata dia. “Lulusannya bisa menjadi orang kaya dan berguna di masyarakat.” Karena bagi Syafi’i, damai juga berkaitan dengan ketidakadilan dan kemiskinan. Adil dan sejahtera bagian penting dalam perdamaian.

“Mereka [ketidakadilan dan kemiskinan] adalah akar masalah konflik kekerasan. Masyarakat perlu diberdayakan supaya adil dan sejahtera bisa dicapai,” kata dia. Prinsip ini mirip yang diidealkan pemikir besar bidang perdamaian, Johan Galtung, tentang perdamaian positif: perdamaian tidak hanya hilangnya kekerasan fisik, tapi juga hilangnya kekerasan struktural. Perdamaian yang berbasiskan keadilan, persamaan, dan kesetaraan.***

Pekerja Profesional, Perawat Binadamai: Kisah Rahmat Syukur Maskawan

Husni Mubarak

Siapa pekerja binadamai (*peacebuilder*) yang Anda ketahui? Anda akan segera menyebut nama-nama besar seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bunda Teresa, John Lennon, dan lain-lain. Seseorang baru disebut pekerja binadamai apabila ia terlibat dalam peristiwa besar yang tercatat sejarah, atau menjadi delegasi pada meja perundingan tingkat internasional, atau mungkin aktivis perdamaian yang tiap hari muncul di layar kaca. Tidak ada tempat di benak kita pekerja binadamai dari kalangan biasa, tidak banyak muncul di media, atau jauh dari keramaian ibu kota.

Pekerja binadamai sangat mungkin tinggal di kampung, tidak pernah muncul di media, atau tak tercatat dalam sejarah nasional. Salah satunya: Rahmat Syukur Maskawan (sehari-hari dipanggil pak Ukun). Ia sehari-hari tinggal di Garut, Jawa Barat. Ia bukan sosok yang sering muncul di media massa. Sesekali ke ibu kota untuk bertemu kolega, bukan tampil di layar kaca. Sebagian penduduk Garut mengenalnya sebagai pengusaha. Ia bukan tokoh peristiwa besar Indonesia. Ia adalah tokoh di Garut yang berusaha menghidupkan nilai-nilai profesional dan merawat binadamai, yang ia warisi dari keluarga dan pelajari dari agama, dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kerjanya terasa istimewa lantaran ia lakukan sepenuh hati.

Siapa sebenarnya pak Ukun? Mengapa ia layak disebut pekerja binadamai? Apa saja pengalaman hidup yang melatarinya? Apa saja yang telah ia lakukan yang menunjukkan kerja-kerja binadamai? Bagaimana ia mengatasi tantangan dan kendala dalam menunaikan usaha binadamai selama ini? Apa saja cara dan upaya yang ia tempuh untuk memperjuangkan dan merawat binadamai itu?

Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, setelah pengantar ini, akan memaparkan perjalanan hidup yang kemudian menginspirasinya bekerja profesional demi merawat binadamai. Bagian kedua akan memaparkan laku binadamai di setiap babak hidupnya. Pada bagian ini juga akan menunjukkan cara dan strategi yang ia tempuh merawat binadamai di lingkungannya. Tulisan ini akan

ditutup dengan mendiskusikan beberapa implikasi kisah ini terhadap masyarakat dan pemerintah.

Pak Ukun lahir di Garut 62 tahun silam dari pasangan Maskawan Mustafa dan Cutamah Maskawan. Ayahnya seorang dokter dan sempat menjadi kepala rumah sakit umum Garut. Ayahnya adalah teladan baginya. Salah satu kisah yang ia teladani adalah ketika usianya masih lima tahun. Saat itu, Garut merupakan markas gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini meresahkan masyarakat. Mereka merampok bahan-bahan makanan dari masyarakat. Di hampir setiap kampung kala itu, anak lelaki termasuk kakak-kakaknya menjadi anggota pasukan pagar betis, pasukan yang dibentuk masyarakat atas dukungan pemerintah, untuk menghalau aksi DI/TII. Ia sendiri terlalu kecil untuk ikut dalam kegiatan pagar betis.

Kerjasama pemerintah dan masyarakat itu kemudian berhasil melumpuhkan DI/TII. Kartosuwiryo, pemimpin tertinggi gerakan ini, tertangkap tahun 1962. Saat itu, pemerintah menugaskan ayahnya merawat Kartosuwiryo. Pak Ukun menyaksikan ayahnya melayani semua kebutuhan medis Kartosuwiryo sepenuh hati, sampai ia dipindah ke penjara lain. “Cerita ini saya ingat terus dan menjadi inspirasi saya sampai saat ini,” tutur pak Ukun. “Atas nama kemanusiaan,” lanjutnya, “ayah merawat orang yang dianggap musuh oleh negara dengan sepenuh hati. Kita wajib membantu siapapun yang membutuhkan, sekalipun

orang yang kita bantu itu adalah musuh.” Baginya, teladan ini tak akan pernah hilang dalam ingatan.

Teladan lain yang ia kagumi dari ayahnya adalah pergaulan yang begitu luas. “Ayahnya berteman dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda,” tuturnya. Makanya, ia tak heran ketika ayahnya dengan sengaja menyekolahkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Daya Susila, sekolah yang dirintis seorang pendeta. Di sekolah itu, ia memperoleh pengalaman bergaul dengan berbagai macam orang. Di sekolah ini, ia berteman murid yang berbahasa bukan saja bahasa Sunda, tetapi juga Tionghoa; beragama bukan saja Islam, tetapi juga Kristen, Budha, Khonghucu dan lainnya; dan, warna kulit yang tidak saja gelap, tetapi juga putih.

Pengalaman ini membuatnya bertanya-tanya ketika sejumlah orang merusak toko milik pedagang Tionghoa pada pertengahan 60-an di Garut. Apa yang salah dengan mereka? Mengapa toko mereka harus dirusak dan dibakar? Selama ia bergaul di sekolah SD maupun SMP tidak sekalipun mereka berbuat jahat (bukan nakal anak-anak) kepadanya. “Apa yang salah dengan penduduk etnis Tionghoa?” demikian pertanyaan retorik yang ia utarakan mengingat peristiwa itu. Di tengah-tengah kegalauan seperti itu, ayahnya memberi contoh baik. “Saat itu,” tuturnya, “ayah sempat menyelamatkan kendaraan milik pengusaha Tionghoa Garut di halaman rumah. Kendaraan itu aman sampai pemiliknya kembali lagi.” Peristiwa ini telah memberinya pelajaran tentang rasa kemanusiaan. Melayani

atau membantu yang sedang membutuhkan tidak perlu melihat latar belakangnya.

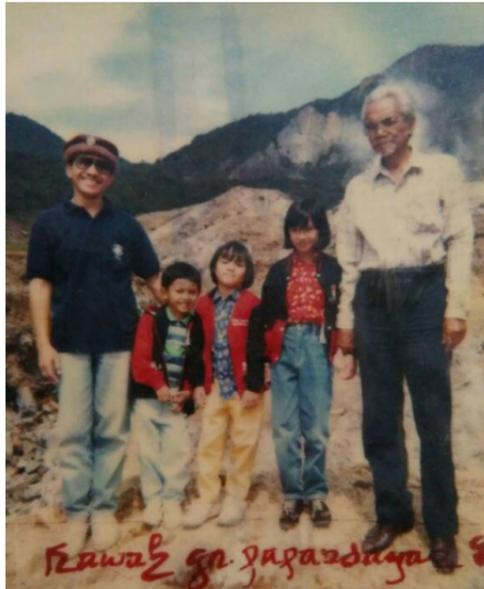
Menginjak usia remaja, sempat setahun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Garut, ia lalu pindah ke Bandung hingga lulus. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan D1, D2 da D3 di NHI (National Hotel Institute-sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung). Sekolah di NHI Bandung, ia wajib magang. Ia kemudian magang di salah satu hotel di Amerika. Ia meraih gelar D1 tahun 1975, kemudian meraih D2 tahun 1977. Ia lalu ambil program D3. Selama program ini, ia magang sebagai staf *front office* di kapal pesiar di Amerika. Ia menyelesaikan program magang pada tahun 1980. Selama mengikuti program, ia memperoleh banyak pengalaman berharga yang kemudian menjadi dasar kerja profesional sebagai pengusaha.

Pelajaran paling berharga selama magang adalah profesionalisme. Di sana ia bekerja dengan orang dari berbagai negara dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Meski berbeda, mereka dipersatukan oleh profesionalisme sebagai nilai dasar dalam bekerja. Semua orang bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing. *Multitasking*, beberapa fungsi dalam satu bidang, tidak menjadi hambatan karena sistem pembagian kerja jelas dan rapi. Aturan main juga diterapkan tanpa pandang bulu. Suatu kali ia berkisah ada staf terlibat penyelundupan obat-obat terlarang. Pelaku “hanya” memindahkan tas dari satu tempat ke tempat lain di atas kapal. Tas tersebut ternyata berisi barang terlarang.

Tanpa peringatan, dia langsung dipulangkan. “Pengalaman ini,” menurutnya, “amat berharga sebagai bekal saya berwirausaha kelak di Indonesia. Kalau mau sukses, ya, harus profesional”.

Ibu adalah sumber inspirasi berikutnya. Dari ibunya, ia memperoleh pelajaran mengenai filosofi air untuk kesuksesan bisnis dan kehidupannya kelak. Suatu hari, ibunya pergi ke Jepang pada tahun 1970-an untuk mengunjungi anak laki-laki nomor empat yang sedang studi di sana. Saat itu, ia berkunjung ke Kuil Emas di Kyoto. Ia terkesan dengan kuil yang dikelilingi kolam air. Sebelum membangun hotel di Garut, ibunya berpesan agar di hotel yang akan dibangun harus ada harus bangun di atas air dan harus ada aliran air. Bagi ibunya, air adalah sumber kehidupan. Ini sudah menjadi bagian dari kearifan *urang lembur* (orang kampung). Unsur air ini kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dalam rencana bisnis perusahaannya. Di manapun, kita akan menjumpai aliran air di area tempat tinggal *urang lembur*. Selain dalam arti fisik, air juga mengandung makna filosofis. Bisnis hotel ini, baginya, harus seperti air yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk termasuk manusia.

Sumber nilai yang juga turut memengaruhi jalan hidupnya adalah ajaran agama Islam. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk mempelajari al-Quran secara sungguh-sungguh setelah kembali ke Indonesia. Ia mempelajari Islam melalui dua cara: pengajian yang diselenggarakan organisasi, Jemaat Ahmadiyah Indonesia



Pak Ukun bersama anak-anaknya di Gunung Papandayan (dok. pribadi).

(JAI), dan otodidak. Sumber utamanya al-Quran versi terjemahan bahasa Inggris oleh Maulana Sheer Ali. Dari sumber ini, ia mempelajari nilai-nilai universal yang kemudian menjadi pijakan dalam berbisnis dan bermasyarakat. Contohnya, seorang pemimpin yang benar menurut Islam adalah mereka yang jujur dan adil. Karenanya, kejujuran menjadi satu terikan nafas dengan nilai profesionalisme.

Ia sendiri adalah generasi kedua pengikut JAI. Sampai SMA, ia tidak begitu serius mendalami ajaran keagamaan aliran ini. Ia bersentuhan kembali dengan ajaran Ahmadi saat ia magang di Amerika. Selama di sana, ia beribadah di masjid milik komunitas Ahmadiyah. Di sana, ia sering

mendengar ceramah ulama dan pemikir Ahmadi dalam banyak tema. Sekembali ke Indonesia, ia mulai aktif di organisasi tersebut. Ia pertama-tama terlibat sebagai pengurus organisasi kepemudaan. Beberapa tahun berikutnya, ia masuk jajaran pengurus pusat di bidang pertanian dan perniagaan. Di wilayah Priangan Timur, yang meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar, ia ditunjuk menjadi Amir Daerah. Sejak tahun 2013, kepengurusan wilayah Garut dan Tasikmalaya terpisah. Ia sejak itu fokus mengurus jamaah di wilayah Garut.

Dari organisasinya itu, ia memegang prinsip bahwa sebagai warga negara kita mesti patuh pada aturan pemerintah. Kepatuhan ini merupakan doktrin yang sangat ditekankan organisasinya, Ahmadiyah Internasional. Di mana pun anggota Ahmadiyah tinggal, ia harus patuh dan mengikuti norma yang berlaku. Berpegang pada ajaran tersebut, pemerintah adalah mitra organisasi yang tidak boleh diabaikan. Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berorganisasi. Saking ketatnya, kisahnya, ada seorang Ahmadi yang ikut dalam imigran gelap, pengurus pusat di Inggris mengeluarkannya dari keanggotaan di Ahmadiyah.

Semua prinsip di atas, yang ia peroleh dari keluarga, pengalaman, dan organisasi keagamaan, menjadi dasar baginya setiap kali akan mengambil keputusan. Tanpa ia sadari sendiri, nilai-nilai itu melekat pada sikap dan keputusan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah di lingkungannya. Upayanya itu, sedikit banyak



Hotel Kampung Sumber Alam, milik Pak Ukun (dok. pribadi).

telah berkontribusi pada terciptanya binadamai di kabupaten Garut, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dunia bisnis.

Prinsip, nilai dan pelajaran hidup yang tertanam sejak kecil hingga dewasa, menurut pak Ukun, harus diperjuangkan. Sebab kenyataannya jauh dari nilai-nilai seperti profesionalisme, kejujuran, dan kepatuhan kepada aturan pemerintah. Hal ini ia lihat sendiri ketika masa awal, sekitar tahun 1980-an, ia mengelola bisnis keluarga, bisnis penginapan di kawasan Cipanas, Kabupaten Garut. Hotel ini semula adalah pemandian atau kamar rendam air panas yang disewakan milik ayahnya. Saat itu, ayahnya membangun delapan kolam pemandian. Kolam-kolam ini bukan sembarang pemandian. Setiap pemandian terdiri dari campuran air panas dan air dingin. Siapa saja bisa menikmati kolam-kolam ini. Bagi pengunjung tertentu,

kolam ini menjadi alat terapi yang belakangan dikenal dengan sebutan *contrast therapy*, yang mengandung air panas dan dingin sekaligus. Terapi ini merupakan bagian dari fisioterapi. Karena permintaan semakin banyak, kala itu, ayahnya membangun rumah panggung untuk setiap kolam pada tahun 1970-an. 10 tahun kemudian, atas seizin keluarga, ia ubah klinik tersebut menjadi hotel.

Berbagai masalah ia jumpai pada masa awal bisnisnya. Ada masalah internal organisasi; ada masalah eksternal, baik dari lingkungan maupun perilaku oknum aparat pemerintah. Ia memutuskan menata dari dalam terlebih dahulu. Ia meyakini jika di dalam organisasi bisnis sudah rapi, solid, dan profesional, menghadapi tantangan dari luar akan jauh lebih ringan. Masalah pertama dan terbesar yang ia hadapi adalah seperti ada negara di dalam negara, ada bisnis di dalam bisnis. Staf yang seharusnya mengikuti aturan main dan menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki bisnis sendiri di dalam. Misalnya mereka menjajakan layanan prostitusi kepada pengunjung tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Di sisi lain, pihak manajemen juga tidak bisa mengontrol praktik haram itu karena kurang konsisten menjalankan aturan main dan nilai perusahaan. Ia mulai dengan ketegasan sebagai pemimpin.

Saat itu, kepemimpinan baru di bawahnya, menindas tegas staf yang terbukti memberi pelayanan prostitusi kepada pengunjung. Ia memecat staf itu. Tak hanya itu, staf yang bekerja tidak profesional pun akan menerima perlakuan yang sama. Misalnya, ia pernah memecat staf yang terbukti

telah mengintip pengunjung di salah satu kamar selama ia bertugas. Perilaku ini jelas merugikan citra perusahaan. Baginya, penginapan bersih dan sehat merupakan nilai jual bagi pengunjung dan kunci keberhasilan jangka panjang. Karena itu, ia bertekad untuk mewujudkannya.

Suatu hari ia dibisiki salah seorang koleganya. “Di sini mah, hotel tidak akan laku kalau bersih dan sehat,” kenangannya ‘Bersih’ dan “sehat” di sini artinya tidak ada prostitusi sama sekali. Saat itu, Cipanas merupakan wilayah yang dikenal sebagai area yang menawarkan bisnis prostitusi di penginapan. Bahkan penginapan yang menyediakan prostitusi secara sembunyi-sembunyi hanya sedikit. Betapa vulgarnya bisnis haram pada masa itu. Ia tidak memercayai bisikan temannya itu. Berdasarkan pengalamannya bekerja di Amerika, ada banyak hotel yang sukses tanpa menyediakan jasa prostitusi.

Sekitar tahun 1990-an, ia mau mengembangkan ruang hiburan untuk pengunjung. Ia akan memperluas ruang karaoke keluarga. Informasi tentang rencana membuka karaoke keluarga ini sampai ke beberapa pihak. Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Garut waktu itu mendatanginya. Sang komandan mengingatkan agar Sumber Alam, penginapan yang pak Ukun kelola, cukup membuka karaoke keluarga dan tidak memperluas cakupan ke pengunjung lebih luas yang identik dengan bisnis. Karaoke di Garut saat itu identik dengan prostitusi. Karenanya, karaoke menjadi sumber penghasilan bagi oknum militer. Mereka memeras pengelola agar tidak ada

yang mengganggu. Namun, Dandenspom tidak seperti oknum militer lainnya. Ia sangat menginginkan Sumber Alam menjadi ikon bagi penginapan bersih dan sehat di Garut. Pak Ukun sangat berterima kasih atas nasihat ini. Ia memenuhi nasihat itu, dan membatalkan pembukaan ruang karaoke yang lebih luas.

Tak semua anggota militer yang menghubunginya untuk tujuan baik seperti Dandenspom. Seorang anggota suatu hari pada pertengahan tahun 1980-an mendatangi pak Ukun di ruang kerja. Anggota tersebut meminta agar pihak Sumber Alam tidak merekrut staf dari luar Cipanas. Dan, apabila hendak merekrut staf harus melaluinya. Ia mengancam akan bertindak jauh kalau tidak dihiraukan. Bahkan, menurut penuturan pak Ukun, orang itu sampai meletakkan senjata di atas meja kerja. Pak Ukun tak gentar menghadapi ancaman seperti itu. Ia bilang, usulan tersebut akan ia pertimbangkan. Keesokan harinya, ia segera menghubungi sahabatnya yang juga anggota militer untuk berlatih cara menghadapi oknum seperti itu. Selain latihan fisik, ia ingin menunjukkan bahwa ia punya teman baik di militer. Sejak saat itu, oknum tadi tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya di Sumber Alam. Pak Ukun kemudian bisa menjalankan bisnis, termasuk saat merekrut staf baru, dengan leluasa untuk memperkuat citra penginapan bersih dan sehat.

Citra penginapan bersih dan sehat itu lambat laun melekat pada penginapan Sumber Alam. Citra ini tidak saja baik bagi kelangsungan bisnis tetapi juga bagi kesejahteraan

pegawai, masyarakat sekitar dan kenyamanan pengunjung. Ia menetapkan insentif yang memuaskan bagi staf yang berprestasi, sekaligus menindak tegas bagi staf yang melanggar aturan main. Sepanjang ia memimpin Sumber Alam, ia telah memecat banyak pegawai. Ia pernah memecat 10 pegawai sekaligus karena bersekongkol menyalahgunakan jabatan. Ia percaya bahwa orang baik masih banyak di luar sana. Ia tidak akan merasa rugi memecat pegawai yang melanggar aturan sebab akan selalu mendapat pengganti yang lebih baik. Saat ini, menurutnya, seluruh staf sudah seperti keluarga. Saling melindungi, saling mengawasi, sekaligus saling mengingatkan. “Sampai sekarang, *alhamdulillah*, kami tidak pernah sepi pengunjung,” jelasnya.

Citra penginapan bersih juga berguna untuk membangun citra bersih kawasan Cipanas Garut yang saat itu dikenal sebagai kawasan wisata birahi. Persepsi ini kadang membuat warga yang sudah bergenerasi-generasi tinggal di sekitar hotel, yang tidak menginginkan prostitusi, merasa tak nyaman. Meski tidak 100 persen hilang, kini muncul persepsi bahwa ada loh penginapan yang bersih dan sehat di Cipanas. Lambat tapi pasti, citra semacam ini menjadi citra yang diperjuangkan bersama pengelola hotel lainnya. Semua menyadari mengenai keberlangsungan jangka panjang. Sampai pada titik ini, ia tidak lagi bicara bisnis keluarganya, melainkan bicara bisnis dan investasi untuk pembangunan Garut, kabupaten kelahirannya.

Bicara pembangunan daerah, menurutnya, harus disertai bukti bahwa kita turut berkontribusi. Salah satunya

taat pajak. “Alhamdulillah, hampir setiap tahun, dalam tiga tahun terakhir, hotel kami selalu disebut oleh Bupati Garut sebagai perusahaan taat pajak,” tuturnya. Bagaimana bisa menciptakan budaya bersih dan sehat, jika para pebisnis tidak taat pajak. Ia yakin bahwa selain kewajiban, pajak merupakan wujud dukungan masyarakat pada pembangunan masyarakat. Reputasi ini mendorong banyak pihak mendaulat pak Ukun sebagai pengurus dan kemudian ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut. Jabatan ini menjadi jalan baginya untuk mempererat hubungan dengan berbagai pihak, termasuk dengan aparat keamanan dan pemerintah.

Pada masa Orde Baru, di mana polisi dan militer belum terpisah, merupakan batu sandungan besar bagi para pengusaha. Di sini mental profesional dengan mental patron-klien berhadap-hadapan. Ia sering didatangi pejabat yang ingin menginap tanpa mau bayar. Ia resah dengan situasi ini. Sekedar minta diskon masih masuk akal. Namun, tidak mau bayar merupakan petaka bagi bisnisnya. Ia utarakan keresahannya itu kepada pejabat pemerintah dan aparat yang berwenang melalui berbagai forum, khususnya forum yang diadakan PHRI. Berbagai kesempatan diskusi dan berbagai pikiran yang berlangsung sampai sekarang, membuka peluang saling memahami dan mengubah pola komunikasi. Sehingga sekarang, baik pejabat maupun aparat dalam berbagai kesempatan sering mengatakan ‘kalau ada oknum yang menyalahgunakan wewenang, akan saya tindak tegas.’

Jaringan baru dan reputasi tersebut merupakan buah dari konsistensi pak Ukun dalam menerapkan prinsip dan nilai yang ia yakini. Ia akan memperjuangkannya, seberat dan sekuat apapun tantangan, dari dalam maupun luar. Kuncinya, tuturnya, konsistensi. Keteguhan memperjuangkan prinsip dan nilai itu juga tercermin dalam menghadapi sejumlah tantangan sebagai penganut dan pengurus JAI Kabupaten Garut. Menjadi penganut dan pengurus JAI di Garut tidak mudah, khususnya hidup pasca-reformasi.

Garut adalah di antara daerah yang dilaporkan telah mengalami beberapa kali insiden kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah. Insiden sudah terjadi sejak tahun 1990-an, semasa Orde Baru berkuasa. Insiden pertama terjadi pada tahun 1993. Pada waktu itu, menurut pak Ukun, Kadanramil (Komandan Komando Rayon Militer) terlibat dalam aksi perusakan masjid Ahmadiyah di Sukawening. Ia nampak berada di barisan warga yang merusak masjid. Insiden kedua terjadi tahun 1998 di Kecamatan Samarang. Kedua insiden tersebut, sebagaimana insiden lainnya di Indonesia, tidak mendapat perhatian publik karena media massa tidak bisa menyiarkan berita tanpa sensor pemerintah atau militer rezim Orde Baru.

Setelah reformasi, situasi tidak lebih mudah. Reformasi memungkinkan semua orang di negeri ini buka mulut. Semua orang diperbolehkan mengemukakan pendapat. Secara

normatif, reformasi seharusnya juga membuka peluang jamaah Ahmadiyah lebih bebas menjalankan keyakinan dan organisasi. Namun, pada saat yang bersamaan, kelompok yang tidak suka dengan JAI juga mendapat tempat untuk memprotes keberadaannya. Puncaknya, protes terhadap keberadaan JAI di depan gerbang kampus Mubarak, Parung, Jawa Barat, tahun 2005. Insiden ini berakhir ricuh. Ujung dari serangan ini adalah keputusan menutup kampus dan tidak diperbolehkan mengadakan aktivitas.

Saat itu, pak Ukun telah masuk sebagai pengurus pusat JAI. Ia menghadiri rapat terbatas pimpinan nasional Ahmadiyah di Bogor. Saat itu, sulit sekali berhubungan dengan warga Ahmadi di Garut. Mereka berusaha menghubunginya melalui telepon. Tapi, komunikasi tidak mudah. Warga di Garut waswas. Mereka khawatir insiden ini terjadi di Garut. Saat itu, memang tidak ada insiden susulan. Pemerintah kabupaten Garut mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Ahmadiyah. Surat edaran ini dikeluarkan agar tidak ada aksi main hakim sendiri warga atas keberadaan komunitas Ahmadiyah di Garut. Kenyataannya, sebaliknya. Justru SKB ini menjadi alasan warga mulai mempertanyakan keberadaan anggota JAI di lingkungannya.

Dua tahun setelah SKB keluar, 2007, insiden perusakan terhadap masjid Ahmadiyah terjadi di Bayongbong. Sesudah itu, perusakan berikutnya terjadi di Samarang tahun 2008. Lalu, insiden perusakan juga terjadi lagi di Cigedug dan Cibatu pada tahun 2011. Insiden paling dekat, tahun 2013,

terjadi di Ngamplang. Perusakan ini mengakibatkan tiga cabang Ahmadiyah di Kabupaten Garut non aktif. Masih ada jamaah, tetapi tidak punya masjid sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas peribadatan dan pendidikan secara bebas. Ada juga cabang yang jamaahnya pindah setelah perusakan masjid akibat tekanan begitu besar.

Situasi semakin berat setelah pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, tahun 2008, tentang Ahmadiyah. Regulasi ini mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan jamaah Ahmadiyah dan pihak-pihak yang tidak suka. Di antaranya, anggota JAI tidak boleh menyebarluaskan tafsir atas ajaran Islam yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Poin lain adalah memerintahkan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan menghindari tindakan atau aksi yang melawan hukum. Jika kedua point di atas (untuk anggota JAI dan masyarakat lain) tidak dipenuhi, regulasi ini telah menyiapkan sanksi sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Regulasi di atas merupakan bagian dari pendekatan baru pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Pada masa Orde Baru, penanganan konflik sosial selalu *top-down*, dari pejabat paling atas kasih perintah ke pejabat di bawah. Setelah reformasi, jarang sekali model *top-down*. Menurut pak Ukun, aparat keamanan saat ini cenderung dimanfaatkan kelompok yang tidak suka untuk menekan Ahmadiyah. Aparat keamanan dan pemerintah pasca-reformasi,

dalam pandangannya, cenderung “netral”, tetapi lemah. Kenetralannya bisa menjadi masalah tergantung siapa yang dianggap paling kuat. Meski demikian, ia masih menaruh harapan pada perkembangan wacana Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah lokal dalam mengambil keputusan. Menurutny, hal ini merupakan peluang yang bisa diraih untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman mengenai Ahmadiyah.

Meluruskan kesalahpahaman tidak mudah sebab Ahmadiyah tidak jarang menjadi objek demonstrasi untuk kepentingan politik tertentu. Misalnya, unjuk rasa tahun 2011 menolak Iman Ali Rahman menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Garut. Massa menilai Iman adalah penganut Ahmadiyah dan karenanya tidak patut menjabat sebagai Sekda. Iman kala itu kandidat paling kuat karena ia meraih nilai tertinggi hasil uji kelayakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut pak Ukun, massa yang berunjuk rasa berasal dari lawan politik Iman yang menggunakan narasi Ahmadiyah menjadi senjata paling ampuh untuk melumpuhkan lawan politik. “Apakah pak Iman seorang Ahmadi atau bukan, kita tidak bisa tahu isi hati seseorang,” tuturnya.

Insiden terakhir yang dilaporkan media adalah peristiwa tahun 2013 di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu. Insiden ini berawal dari salah seorang warga sekitar masjid Ahmadiyah meninggal dunia. Keluarga ingin menyalatkan jenazah di masjid tersebut. Pengurus masjid menolak karena jenazah bukan pengikut Ahmadiyah.

Dipicu masalah ini, warga menuntut agar MUI mengambil alih masjid tersebut. MUI mengambil alih masjid tersebut yang ditandai dengan shalat Jumat yang khatibnya dari MUI. Tak hanya berhenti di situ, ketegangan sempat melebar ke isu pembubaran Ahmadiyah. Namun, pertemuan yang mewakili beberapa pihak menurunkan tensi di lokasi tersebut.

Setelah kejadian Cilawu, tidak ada berita di media massa yang melaporkan insiden lain di Garut sampai saat ini. Jemaah Ahmadiyah di 10 cabang di Garut bisa menjalankan aktivitas keagamaan, meski seluruh masjid tidak menggunakan pengeras suara keluar dan tidak memasang papan nama. Dalam dua tahun terakhir, Ahmadiyah Garut tidak masuk dalam laporan tahunan kebebasan beragama di Indonesia yang dikeluarkan the Wahid Institute dan Setara Institute. Ini artinya, Ahmadiyah Garut relatif lebih aman dibanding daerah lain di Jawa Barat, seperti Tasikmalaya atau Kuningan.

Sebagaimana menjalankan bisnis, pak Ukun juga memegang prinsip profesionalisme dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Apa yang dialami jemaah Ahmadiyah, baginya, tidak jauh berbeda dengan apa yang ia hadapi dalam berbisnis. Ada soliditas internal organisasi yang harus diperkuat; ada juga pemahaman pihak lain keliru mengenai Ahmadiyah; dan, ada juga masalah komunikasi antara jemaah Ahmadiyah dengan pihak-pihak lain,

termasuk pemerintah, yang harus diperkuat. Sebagaimana mengelola bisnisnya, air yang mengalir menjadi filosofi dasarnya. Seperti air, penting sekali untuk menjalani semua proses dengan jujur dan bersih.

Keyakinannya itu yang mendorong pak Ukun terus menerus meyakinkan anggota Ahmadiyah bahwa semua insiden yang mereka alami perlu disikapi dengan tenang. Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana doktrin JAI internasional, setiap anggota JAI harus tunduk dan patuh kepada peraturan dan regulasi negara setempat. Ia dan rekan-rekannya menyerahkan semua insiden tersebut kepada aparat penegak hukum. Meski kecewa karena tidak ada insiden kekerasan yang diproses secara hukum, ia tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah. Ia percaya bahwa pemerintah bisa berubah.

Selain meyakinkan anggota, ia bersama jajaran pengurus Ahmadiyah Garut mengupayakan agar warga yang terpaksa pindah dari kampung halamannya memperoleh tempat tinggal baru di lokasi baru. Di samping tempat tinggal, mereka mendapat pemberdayaan ekonomi agar bisa menghidupi keluarganya. Sementara itu, mereka menahan diri untuk merenovasi masjid yang sudah rata dengan tanah atau yang dirusak sebagian. Merenovasi masjid penting, tetapi, menurut pak Ukun, jamaah bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan lancar tidak kalah penting. Untuk itu, ia bersama pengurus lain perlu menyusun strategi komunikasi yang lebih baik dengan pihak luar.

Oleh karena itu, salah satu keputusan internal organisasi yang signifikan pada masa itu adalah perubahan strategi komunikasi, dari teologi ke kerjasama sosial. Setelah insiden Parung tahun 2005, dan insiden susulannya di berbagai daerah, pengurus Ahmadiyah meyakini bahwa pihak-pihak luar salah paham mengenai apa itu Ahmadiyah, bagaimana ajaran dan organisasinya. Untuk menjawabnya, mereka menggunakan pendekatan teologi. Jamaah Ahmadiyah di manapun akan memberitahu doktrin dan ajaran Ahmadiyah kepada pihak-pihak yang dinilai masih salah paham. Mereka tunjukkan tafsir dan argumen teologi atas apa yang anggota Ahmadiyah yakini.

Strategi ini belakangan berubah. Menurut penuturan ustad Ridwan Ahmad, mubalig Ahmadiyah Kabupaten Garut, pendekatan yang mereka gunakan saat ini menekankan pada kerjasama sosial daripada debat teologi. Penekanan pada aspek sosial, pada dasarnya, telah menjadi anjuran khalifah Ahmadiyah ke-4. Pak Ukun mengamini kecenderungan ini. Meluruskan kesalahpahaman aspek teologi Ahmadiyah memang penting, tetapi kerjasama sosial dengan masyarakat luas tidak kalah penting dan strategis untuk keberlangsungan komunitasnya. Itulah sebabnya, JAI Kabupaten Garut melakukan sejumlah kegiatan yang tidak langsung bicara teologi dan argumen keagamaan tentang Ahmadiyah, melainkan lebih banyak silaturahmi.

Bersama pengurus lain, ia berinisiatif mengadakan pengobatan gratis untuk warga sekitar di masjid Ahmadiyah Karacak setiap hari Jumat. Pada saat pengobatan itu, dokter

melayani konsultasi pasien, mendiagnosa penyakit dan memberikan obat secara gratis. Pelayanan ini terbuka untuk umum. Tidak sedikit warga bukan anggota Ahmadiyah yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis ini. Layanan kesehatan lainnya adalah layanan konsultasi penyakit dalam setiap hari Selasa dan Kamis di Hotel Sumber Alam. Dokter yang memberikan layanan ini, kakak kandung pak Ukun. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan, khususnya karyawan Sumber Alam.

Selain itu, jamaah Ahmadiyah sudah cukup lama bekerjasama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Garut untuk melatih calon petinju. Salah seorang anggota JAI adalah pelatih di sasana tinju di bawah Kodim Garut itu. Kerjasama ini membuahkan hasil, salah satu petinju di sasana ini menjadi juara tingkat provinsi. Tanpa disebut, semua orang tahu bahwa pelatih petinju itu anggota Ahmadiyah.

Donor darah adalah jenis kerjasama pemuda Ahmadiyah dengan GP Anshor di Kabupaten Garut yang cukup rutin. Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai macam kesempatan: ulang tahun Kabupaten Garut, ulang tahun GP Anshor, dan kesempatan lainnya. Dalam setahun, kegiatan donor darah bisa lebih dari lima kali. Kerjasama mereka tidak berhenti di sana. Mereka kerjasama membuka posko kesehatan bersama saat mudik lebaran di Nagreg, Bandung. Jalur ini setiap tahun merupakan daerah titik kemacetan jalur selatan paling parah.

Setiap bulan puasa, pak Ukun memfasilitasi buka

bersama dengan berbagai komunitas kepemudaan di Garut. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya kerjasama dengan Pergerakan Pemuda Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut. Silaturahmi tahunan ini menjadi ajang saling berbagai informasi, pengalaman dan kemungkinan-kemungkinan kerjasama. Tak hanya komunitas muslim, berbagai organisasi non Muslim lainnya juga selalu hadir dalam kegiatan ini.

Sementara itu, komunikasi dengan pemerintah dilakukan dengan berbagai cara. Menurutnya, cara terbaik yang ia lakukan adalah menunjukkan prestasi. Ia bersyukur misalnya bisa berkenalan lebih jauh dengan pemerintah karena bisnis hotelnya selalu menjadi teladan dalam membayar pajak. Daulat sebagai ketua Badan Promosi dan Pariwisata Daerah Garut juga menjadi modal sosial untuk pergaulan lebih jauh. Misalnya, bersama PHRI, secara rutin mengadakan forum silaturahmi dengan jajaran Muspida Kabupaten Garut. Meski tidak membicarakan, semua orang yang ada di ruangan itu tahu bahwa dirinya Ahmadiyah.

Ia juga menjadi anggota kehormatan polisi (*honorary police*), bersama sejumlah orang lain. Pengurus polisi kehormatan itu datang dari berbagai pihak, termasuk MUI di dalamnya. Organisasi ini secara rutin juga mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah dan situasi terkini di Garut. Pertemuan juga seringkali diadakan dalam rangka perpisahan dengan pejabat di kepolisian yang akan pindah ke wilayah lain, sekaligus menyambut pejabat baru yang menggantikannya. Forum seperti itu kadang diadakan di

kantor Polres Garut, kadangkala di Hotel Sumber Alam. Dalam rangka silaturahmi, ia juga tidak jarang mengundang pejabat tokoh-tokoh Garut berdiskusi tentang berbagai hal di Sumber Alam. Misalnya, Kapolres Kabupaten Garut yang baru sempat mengunjungi hotelnya untuk sekedar mengobrol atau sekedar berendam air panas. Ia meyakini bahwa silaturahmi selalu akan membawa keberkahan bagi semua pihak. Lagi-lagi, tanpa harus menceritakan lebih rinci, mereka tahu bahwa ia adalah anggota JAI Garut.

Jalur komunikasi lain yang tengah dirintis melalui seni dan budaya. Salah satunya, anak-anak JAI mendaftar dan menjadi murid di perguruan silat Gajah Putih Garut. Perjumpaan anak JAI dengan anak-anak lainnya diharapkan menjadi sarana untuk menjalin komunikasi lebih akrab di antara mereka. Perbedaan di kemudian hari tidak menjadi masalah untuk tetap menjadi sahabat. Perjumpaan melalui media seni dan budaya termasuk pendekatan baru bagi JAI Garut.

Kegiatan sosial terakhir adalah penanganan banjir bandang pada 21 September 2016 di Garut,. Pak Ukun bersama pengurus lainnya membentuk tim bantuan sosial. Beberapa jam setelah kejadian, bersama komunitas lain, JAI Garut menampung dan menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Mereka turut membantu membersihkan rumah yang sudah kotor. Beberapa bulan berikutnya, JAI Garut bekerjasama dengan perangkat desa Cigedug, daerah yang pada tahun 2007 terjadi perusakan masjid Ahmadiyah, menanam pohon di sekitar bukit Cigedug. JAI menyumbang



Pengurus Ahmadiyah Garut memberi bibit pohon untuk ditanami di daerah rawan bencana setelah banjir bandang 2016 (dok. JAI Garut).

1600 pohon Jabon dan Suren, dan untuk kelurahan sendiri diberi tambahan 300 pohon. Silaturahmi ini sangat penting untuk menjalin komunikasi yang sempat putus akibat kesalahpahaman tentang Ahmadiyah. Silaturahmi serupa tengah dijajaki dengan pesantren yang pada tahun 2008 turut serta menyerang masjid Ahmadiyah.

Pendekatan-pendekatan non teologi untuk membina kerjasama dengan berbagai pihak cukup strategis. Kerjasama dan komunikasi non teologi paling tidak mengurangi kecenderungan reaksi orang debat kusir mengenai benar tidaknya gagasan dan interpretasi Ahmadiyah terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, semua pihak memungkinkan suasana saling percaya dan membuka peluang kerjasama lebih luas. Kerjasama seperti ini menjadi

jalan pemeliharaan dan pembinaan kedamaian antar kelompok masyarakat di Indonesia.

Sungguh tidak berlebihan jika kita menyebut pak Ukun sebagai juru binadamai dari Garut. ia memang bukan tokoh-tokoh perdamaian yang sering muncul di layar kaca, media massa atau studi-studi literatur binadamai. Ia bukan juru damai konflik besar di Indonesia. Ia adalah seorang pengusaha sekaligus anggota JAI yang dengan segala sumber daya yang dimiliki berusaha membina hubungan masyarakat yang lebih baik.

Mengawali karir sebagai pengusaha, ia berusaha sekeras dan sekonsisten mungkin memperjuangkan dan menerapkan nilai kejujuran, profesionalisme dan kepatuhan kepada pemerintah. Ia telah melawati semua tantangan yang menghadang. Usaha dan keteguhannya kini telah berbuah. Citra pariwisata birahi di Garut, khususnya Cipanas, kini telah berubah. Bisnis pariwisata berlomba-lomba menjual pelayanan yang bersih dan sehat kepada calon pelanggan. Ketegangan akibat bisnis prostitusi sedikit banyak telah mulai sirna. Meski tidak semua, kontribusi pak Ukun untuk hal ini tidak bisa dianggap kecil.

Keberanian dan kegigihan serupa ia tunjukkan sebagai warga negara yang ingin semua warga negara bebas menjalankan ibadah dan berorganisasi, khususnya anggota organisasinya, JAI Garut. Ia berusaha meyakinkan anggotanya untuk lebih percaya diri menjadi warga

masyarakat. Selain memperkuat kapasitas internal organisasi, ia juga bersama pengurus lain mulai menjajaki beberapa pendekatan komunikasi baru. Mereka mulai menggunakan pendekatan sosial ketimbang debat teologi. Sejumlah inisiatif ini berbuah. Sejumlah komunikasi dengan pihak yang dulu memusuhi kini sudah terbuka. Kontribusi pak Ukun dan rekan-rekannya atas keberhasilan-keberhasilan kecil ini, yang akan menjadi langkah lebih jauh dalam usaha binadamai, tidak bisa dianggap remeh.

Kisah pak Ukun ini memberikan kita sejumlah pelajaran. Pertama, pekerja binadamai (*peacebuilder*) bisa siapa saja, dimulai kapan saja dan dilakukan di mana saja. Tak perlu menunggu orang lain untuk menyebarkan kesadaran cara berpikir yang terbuka dan toleran; tidak perlu mengharap ada momen khusus untuk mengkampanyekan arti penting kebhinnekaan; dan, tidak perlu di tempat yang dianggap rawan konflik kekerasan besar-besaran. Siapa, kapan dan di mana saja setiap kita perlu merawat binadamai, sekecil apapun kontribusi kita.

Kedua, tokoh-tokoh besar yang dikenal sebagai pekerja binadamai dunia tentu merupakan sumber inspirasi. Meski demikian, inspirasi bisa datang dari mana saja: keluarga, teman kerja, lembaga pendidikan, dan organisasi. Binadamai pada kenyataannya bukan hasil kerja satu orang, melainkan kerjasama berbagai pihak. Semakin banyak orang biasa yang mengkontribusikan dirinya pada usaha binadamai, semakin besar peluang tindakan preventif potensi konflik masyarakat dilakukan.

Ketiga, konsistensi melaksanakan prinsip menjadi kunci keberhasilan-keberhasilan kecil, yang akan berkontribusi pada binadamai yang lebih besar. Binadamai adalah usaha jangka panjang dan pelan-pelan. Binadamai tidak mungkin hanya dilakukan satu kali, lalu jadi. Binadamai membutuhkan konsistensi para pegiatnya untuk membangun jembatan-jembatan antar-komunitas untuk saling memahami dan saling kerjasama. Dengan demikian, pencegahan konflik dimungkinkan.

Keempat, tokoh agama merupakan sosok yang potensial menjadi juru binadamai. Ajaran agama memuat prinsip-prinsip dasar mengenai pentingnya merawat kedamaian di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh agama adalah orang yang tingkat pemahaman mengenai ajaran keagamaan, termasuk pentingnya binadamai, paling mendalam dibanding masyarakat awam. Meski demikian, godaan dari pihak-pihak yang tengah berebut kepentingan dan kekuasaan adalah tangan terbesar tokoh agama untuk berlaku konsisten.

Terakhir, pemerintah tingkat kabupaten kota di Indonesia seyogyanya mulai menyusun profil pekerja binadamai di wilayahnya. Perhatian dan dukungan pemerintah kepada mereka akan sangat membantu proses binadamai bertahan lama, melibatkan lebih banyak pelaku, dan memiliki daya tahan dari godaan fitnah yang sedemikian cepat. Kerja pemerintah akan lebih mudah apabila pekerja binadamai bekerja tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.***

Merawat Alam, Menjaga Damai: Kiprah Nisya Wargadipura dan Ibang Lukmanurdin di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, Garut

Siti Nurhayati

Halaman itu terlihat lusuh, tak terurus. Tanaman liar dan akar-akar pohon berserakan, bahkan cenderung tak elok dipandang. Namun siapa sangka, semua disengaja, tidak ada maksud lain kecuali berupaya menata ekosistem alam serta menghadirkan keseimbangan.

Prinsip keseimbangan itulah yang dipegang kuat oleh Nisya Sa'adah (Teh Nisya) dan sang suami tercinta, Ibang Lukmanurdin (Kang Ibang), dalam mengelola pesantren

Ath-Thaariq, Garut. Terletak di tengah persawahan, pesantren tersebut berupaya menjauh dari hingar bingar kehidupan kota Garut. Posisi seperti itu sengaja dipilih Teh Nisya dan Kang Ibang karena dengan itulah ketenangan akan mereka peroleh. Tenang dari hiruk pikuk keangkuhan rezim yang selalu setia mengejar mereka sedari muda. Tenang dari pelbagai upaya kapitalisasi pendidikan yang umumnya berlaku di kota-kota besar. Memperoleh ketenangan berarti akan menjaga kesetiaan pada satu prinsip yang mereka jalani, hidup harus bermanfaat tidak hanya untuk sesama manusia tapi juga bagi alam.

Titik Beranjak dan Lingkungan Sosial

Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama tahun 2015 mencatat, Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan angka kerukunan rendah (72,6 persen) dari angka rata-rata nasional kerukunan umat beragama 2015 yakni 75,36 persen. Rangkaian kasus intoleransi yang terjadi di beberapa kota, semisal, Depok, Bogor, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, Indramayu, menyumbang peran cukup besar dalam rendahnya angka kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Alih-alih toleran, Jawa Barat dinilai oleh sebagian kalangan—berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan—sebagai wilayah dengan angka intoleransi tertinggi di Indonesia. Setara Institute mencatat 44 kasus intoleransi terjadi di Jawa Barat selama tahun 2015. Sedangkan Wahid Foundation menyebutkan telah terjadi 46 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat sepanjang 2015.

Angka tersebut tentu sangat kontradiktif dengan fakta bahwa kultur masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi toleransi. Dikenal sebagai masyarakat yang agamis, warga Jawa Barat sejauh ini selalu berupaya memegang prinsip mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah: “*Herang Caina Beunang Laukna*” (menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru). Tak terhitung banyaknya kearifan lokal masyarakat Jawa Barat yang memperlihatkan kuatnya mereka mempertahankan komitmen atas nilai-nilai kebajikan. Pepatah “*ulah ungut kalinduan, ulah gedag kaanginan*” (konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyasikan antara hati nurani dan rasionalitas), atau “*sing katepi ku ati sing kahontal ku akal*” (sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama), setidaknya memperlihatkan betapa masyarakat Jawa Barat sangat mencintai hidup damai, tanpa sekat dan nihil konflik.

Buruknya persepsi masyarakat luar, termasuk media massa, terhadap Jawa Barat menjadi pukulan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, tak terkecuali pasangan Teh Nisa dan Kang Ibang.

Profil Singkat

Terlahir di Garut, 23 Februari 1972, Nissa Wargadipura (nama Wargadipura adalah nama kakeknya serta nama kepanjangan ayahnya—nama tiga generasi—) merupakan salah seorang tokoh perempuan di tingkat lokal yang mampu membawa pengaruh di tingkat nasional. Berasal

dari keluarga pendidik—Ayah, Ibu, Paman Nisya semuanya PNS berprofesi guru—Nisya tidak pernah membayangkan dirinya menjadi aktivis lingkungan yang sekaligus pengasuh pesantren seperti sekarang. Cita-citanya semasa kecil adalah menjadi Camat yang bisa pergi berkeliling desa dan bicara tentang banyak hal di depan umum. Jika ia sekarang menjadi penggiat pangan berbasis kearifan lokal, itu disebabkan karena ayahnya juga dikenal sebagai mantri pertanian di Garut. Dari ayahnya, Nisya mengenal dunia pertanian. Sehingga sejak kecil, Nisya mulai belajar otodidak cara bertani organik dan mempromosikan bahan makanan sehat.

Sementara itu, Ibang Lukmanurdin, terlahir di Garut, 18 Oktober 1971, merupakan sosok penuh karisma yang sepanjang hidupnya sangat setia dengan prinsip kesederhanaan. Jika Nisya berasal dari keluarga pendidik (PNS), Ibang adalah anak dari Kyai Agus Nurdin, seorang kyai terpendang di Garut. Kakeknya adalah KH. Ahmad Safawi, pemilik Pondok Pesantren Sukarasa Bayongbong, Garut. Semasa kecil, Kang Ibang diasuh oleh neneknya. Tak banyak yang diketahui Kang Ibang kecil mengenai ayahnya. Ia baru mengetahuinya ketika beranjak dewasa dari seorang teman ayahnya—diceritakan sebelum ayahnya meninggal—bahwa sang ayah merupakan seorang ustadz yang memiliki jiwa aktivisme. Selain sebagai aktivis angkatan 66, Kyai Agus Nurdin, juga tercatat sebagai aktivis Pemuda Islam Indonesia (PII). Mengkritik kebijakan pemerintah, menggerakkan demonstrasi, melakukan pendampingan kepada masyarakat yang bermasalah dengan pihak pemerintah adalah sederet

aktivitas yang dijalani Kyai Agus Nurdin. Tak heran jika dengan ragam aktivitas tersebut, Kyai Agus Nurdin seringkali keluar masuk penjara karena dianggap subversif terhadap rezim Orde Baru.

Nisya dan Ibang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Garut. Berbeda dari Nisya yang mengambil pilihan sekolah umum—SD Bungbulang II Garut (1984), SMPN Cibatu, Garut (1987), dan SMAN Cibatu, Garut (1990)—Ibang lebih memilih sekolah agama. Berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain menjadi hal yang biasa Ibang lakukan sedari muda. Pesantren Darul Ulum (Jombang), Pesantren An Najah (Garut), Pesantren Al-Barkah (Garut), Pesantren Al-Jumhuriyah (Garut), Pesantren Ma'had Al Hikmah (Jakarta), dan Pesantren Hidayatul Faizien, Urug (Garut) adalah beberapa pesantren yang Ibang jadikan sebagai sumber pencarian pengetahuan.

Pada awal tahun 1990-an, baik Nisya maupun Ibang telah mulai berkenalan dengan dunia aktivis. Keduanya saling bahu membahu mengelola organisasi tani di sekitar Garut. Mereka aktif melakukan advokasi terhadap masyarakat (petani) yang sedang menghadapi permasalahan terkait sengketa tanah. Pada sejarahnya, Nisya dan Ibang turut menginisiasi berdirinya Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut 24 Januari 2000. Lembaga ini sejatinya merupakan kelanjutan dari beragam protes petani dan kerja-kerja pendampingan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan pemuda di Garut sejak akhir tahun 1980-an. Melalui Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Islam

Garut (FPPMIG)—sejak 1989 diubah menjadi Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Garut (FPPMG)—mereka menggarap isu agraria, selain isu lingkungan, buruh dan miskin kota.

Bukan tanpa alasan isu-isu tersebut dijadikan fokus utama gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa di Garut. Faktanya, sejak memasuki tahun 1980-an dan terutama, di sepanjang tahun 1990-an, sederet persoalan agraria mengemuka di wilayah Garut. Beberapa kasus dapat dicatat, antara lain konflik di Desa Dangieng, Desa Sukamukti, dan Desa Mekarmukti antara petani ketiga desa dengan Perkebunan Teh PTPN VIII Nusantara Dayeuh Manggung. Kebijakan PTPN untuk masuk dan menguasai lahan-lahan yang digarap oleh petani dari tiga desa menjadi faktor utama penyulut konflik. Menurut data yang ada, kasus antara kedua belah pihak sudah berlangsung sejak tahun 1958, juga sebab serupa, penguasaan tanah para petani oleh PTPN.¹

¹ Pada tahun 1997, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, petani dipaksa untuk menggarap lahan yang diokupasi PTPN tanpa memperoleh izin. Akhirnya, PTPN memberikan izin dengan sistem sewa per 6 bulan atau 1 musim. Lahan PTPN digarap sejak Mei 1998 hingga Juni 1999, dengan jumlah penggarap penyewa tanah sebanyak 77 orang. Pertengahan 1999, PTPN mereklaim tanah yang tadinya telah disewakan kepada warga. Warga dengan segala keterbatasannya, merasa dikhianati, namun mereka masih segan untuk melakukan perlawanan besar atas nasib yang menimpa mereka. Tentang ini lihat, Nisya Wargadipura “*Bekerja Bersama Anggota Serikat Petani Pasundan dalam Mempengaruhi Kebijakan Reforma Agraria: Studi Kasus Organisasi Tani Lokal Serikat Petani Pasundan di Desa Mekarmukti, Sukamukti, dan Dangieng, Cilawu Garut*”. Penjelasan diperoleh juga dalam wawancara dengan Nisya Wargadipura di Garut, 28 Januari 2017.

Kasus lain terjadi di wilayah Sagara, Cibalong, Garut antara kelompok masyarakat (petani) dengan Perum Perhutani III. Adalah kawasan hutan—dikenal dengan sebutan Kelompok Hutan Pasir Salam—yang menjadi objek perebutan dua pihak. Menurut masyarakat setempat, mereka telah menghuni lokasi tersebut sejak tahun 1960an dan mengelola lahan dalam bentuk kebun campuran (ditanami buah-buahan, jagung serta padi). Tahun 1974 sejalan dengan digalakkannya program Rakgantang (menanam pohon-pohonan), masyarakat menanam kebunnya dengan tanaman jati, namun pada tahun 1978 kebun tersebut diakui secara sepihak sebagai kawasan hutan areal Perum Perhutani III. Saat itu, konflik perebutan tanah berlanjut hingga ke tingkat pengadilan dan keputusan pengadilan menetapkan bahwa tanah yang di sengkatakan bukan milik masyarakat, tetapi juga bukan kawasan hutan (Keputusan PN Garut No 20/1990) akan tetapi sebagai Tanah Negara Bebas.²

Tentu masih banyak kasus lain, semisal kasus Blok Ranca Eceng dan Leuwi Jurig Bunisari Lendra, Blok Jayasena Cikajang, dan Dayeuhmanggung Cilawu, yang terjadi seiring kehadiran BUMN, Perhutani maupun investor asing dalam penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam di Garut. Dan kesemuanya menunjukkan betapa persoalan

² Martua T. Sirait, Saifullah Z.A, dan Ibang Lukman Nurdin, “Lesson Learned RATA Garut dan Bengkuntan: Suatu Upaya Membedah Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan dan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan”, *Working Group on Forest Land Tenure (WG Tenure)*, Volume, April 2009. Penjelasan diperoleh juga dalam wawancara dengan Ibang Lukman Nurdin di Garut, 28 Januari 2017.

agraria di Garut tergolong serius dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam konteks itulah kemunculan Nisya dan Ibang dapat dijelaskan. Sebagai aktivis, keduanya bertekad mendampingi masyarakat (petani) untuk merespon kondisi yang berlangsung. Bersama kelompok aktivis lain di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung, Ibang turut menginisiasi kelahiran Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG). Dengan wadah inilah mereka melakukan upaya pendampingan dan penyadaran pada petani di Jawa Barat, yang diawali dengan pengorganisasian konflik agraria di wilayah Sagara-Garut. Dari kerja-kerja pendampingan ini, pada tahun 1991 beberapa basis petani antara lain dari Garut, Tasik, Ciamis, Sukabumi, Cianjur kemudian bersepakat membentuk Serikat Petani Jawa Barat (SPJB). Merespon dinamika yang berkembang di Garut saat itu, FPPMG selanjutnya mendirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat (Yapemas) di tahun 1995 dan Koperasi Warga Desa (KWD) di tahun berikutnya. Keduanya diarahkan menjadi media utama perjuangan FPPMG. Karenanya, melalui KWD-KWD itulah, upaya kerja pendampingan dan pengorganisasian dilakukan secara lebih intensif, termasuk dalam agenda pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama bagi para petani yang begitu masif dilakukan pada sekitar tahun 1998-1999. Dengan semakin luasnya ranah aksi (tidak hanya di Garut, tapi juga di Tasik dan Ciamis) dan basis konflik (seperti petani Sagara, Pamegatan, Jangkurang, Pakenjeng dan Cisurupan

dari Garut; petani Cibenda Ciamis; dan petani Cieceng Tasikmalaya), disepakatilah untuk membentuk Serikat Petani Pasundan (SPP) yang kemudian dideklarasikan pada awal tahun 2000. Sejak itu SPP bergerak lebih aktif sebagai gerakan petani dan reformasi agraria di tiga kabupaten, yaitu Garut, Tasik dan Ciamis, sebelum menyusul kemudian, Pangandaran.³

Dalam semua proses tersebut Nisya dan Ibang terlibat aktif menggerakkan organisasi dan berbagai elemen kelompok tani untuk terus melakukan perubahan yang utamanya diperuntukkan demi penjagaan atas alam. Meskipun harus berhadapan dengan pihak pemerintah, Nisya dan Ibang tidak pernah merasa takut menjadi *organizer* bagi kelompok petani, khususnya di Garut. Tidak mengherankan, jika selama berstatus sebagai aktivis advokasi agraria, Nisya dan Ibang sempat menjadi buron dan dianggap berbahaya oleh pihak berwajib. Bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain menjadi rutinitas yang mereka lakukan. Dan hal tersebut mereka jalani hingga Era Reformasi hadir di Indonesia. Meskipun beberapa pihak mencoba ‘membeli’ idealisasi mereka—ditawari menjadi anggota dewan ataupun diberi fasilitas mewah—konsistensi perjuangan mereka membela rakyat petani tidak pernah

³ Terkait kiprah Serikat Petani Pasundan, lihat misalnya, Noer Fauzi, “Dari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut, Jawa Barat”, dalam Soediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi (Peny). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

meredup. Keduanya tetap setia menjaga idealisasinya untuk terus merawat alam, memulihkan ekologi, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Demikian Nisya dan Ibang menjalani tahap kedewasaan hidup mereka, bergelut dengan kehidupan para petani di daerah yang sarat konflik agraria selama kurang lebih 15 tahun (1993-2008). Selain dewasa secara sikap mereka pun semakin dewasa secara pikiran. Semakin sering bergumul dengan persoalan ekologi semakin mereka sadar betapa tindakan nyata harus mereka lancarkan. Dalam kasus pertanian, misalnya, mereka semakin paham betapa sistem-sistem pertanian yang dikembangkan di Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia, keliru penanganannya. Mereka mencontohkan, betapa petani dalam sejarahnya sangat tergantung pada biaya produksi untuk benih, pupuk, dan obat-obatan seperti pestisida dan herbisida dari seorang pemilik modal. Begitu pun dalam kasus pemeliharaan hutan. Bagi mereka, banjir terjadi salah satunya karena hutan yang seharusnya ditanami oleh pohon, dialih fungsi menjadi lahan pertanian monokultur. Sehingga, air hujan yang turun, tidak dapat banyak diserap oleh tanah. Belum lagi, sistem pertanian monokultur, dalam pandangan mereka, menyebabkan kerugian untuk petani. Selain membuat harga sayuran fluktuatif dan berbiaya produksi tinggi, sistem pertanian monokultur dalam beberapa kasus juga mengakibatkan penyakit yang berbahaya, seperti diabetes, jantung dan lainnya.

Memilih menjadi aktivis bagi Nisa dan Ibang merupakan ijhtihad terbaik yang mereka ambil. Tak terhitung banyaknya aksi mereka berhadapan dengan aparat. Ancaman, bahkan teror mematikan menjadi sajian hidup yang justru mereka nikmati sebagai anugerah. Tentang ini, Nisa berujar,

“Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut - FPPMG, organisasi tempat kami berkumpul, dianggap sebagai Organisasi Tanpa Bentuk oleh Rezim Pemerintah Baru OTB. FPPMG adalah organisasi yang cukup kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Kegerahan mereka ditampilkan dengan mengerahkan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, AMPI, dll. untuk menekan kami dengan cara menongkrongi sekretariat kami sampai pada mengobrak-abrik (benar-benar melakukan perusakan), ujung-ujungnya adalah mengancam para personal aktivis FPPMG, seperti suami saya Ibang Lukman dan 4 sahabat saya, melalui disembarkannya surat-surat bercap pemerintahan RT/RW dimana kami tinggal, himbauan hati-hati kepada masyarakat bahwa daftar di bawah ini sebagai antek-antek PKI.”

Nisa melanjutkan,

“Pada akhir tahun 1996, ketika kami mengadakan acara Refleksi dan Evaluasi Tahunan FPPMG, acara kami dikelilingi oleh polisi, tentara, dan personil PNS dari sebuah badan pemerintah untuk mengontrol LSM dan Ormas. Usai acara kami, semua aktivis digiring ke Polres Garut, berminggu-minggu menginap dan berkali-kali diwawancara untuk pembuatan Berita Acara atas tuduhan kasus kerusuhan

Tasikmalaya. Semua rumah aktivis ditongkrongi, baik oleh intel maupun OKP (Organisasi Kepemudaan), termasuk rumah saya. Ada juga kasus di mana kelompok pengajian pemuda, yang di organisir dan dipimpin Ibang dan temannya, di Masjid PSII Ciledug, diancam oleh aparat sampai pada puncaknya dibubarkan.”

Jika didata lebih lanjut, tentu masih banyak teror ataupun intimidasi yang diterima Nisyah dan Ibang dalam berbagai bentuk. Namun, alih-alih memudar, semangat dan idealisasi mereka sebagai aktivis terus dijaga hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Akan tetapi, jangan pernah bayangkan pernikahan itu berjalan indah seperti halnya pernikahan kawan-kawan aktivis angkatan mereka. Nikah dalam pelarian. Hal itulah yang mereka jalani. Meskipun tak pernah mereka bayangkan, faktanya mereka menikah dalam pelarian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Peristiwa Tasikmalaya 1997—berhubungan dengan gerakan petani Garut—Nisyah dan Ibang bergegas hijrah ke Jakarta. Dibantu, baik secara moril maupun material oleh para sahabatnya, seperti Noer Fauzi Rahman dan Adnan Buyung Nasution, Nisyah dan Ibang bersembunyi dari tempat ke tempat lain. Dalam kondisi itulah keduanya memutuskan untuk menjalin ikatan suci.

Dalam cekam ketakutan—dibuktikan dengan sedikitnya kerabat mereka yang hadir serta ketatnya penjagaan para intel di lokasi acara serta di gang-gang rumah warga—pernikahan tersebut berlangsung penuh kesyahduan, kesederhanaan, dan tentunya, kesakralan. “Bulan Oktober

1997 ketika kami melangsungkan pernikahan, pemerintahan Soeharto telah jatuh, tapi waktu itu pemerintahan Habibie belum banyak melakukan perubahan, sehingga kelompok-kelompok oportunistis di daerah masih merasa terancam, kami tetap menjadi sasaran kegerahan mereka. Ditongkrongilah pernikahan kami, Menimbulkan ketidaknyamanan dan kegelisahan” demikian Nisya berujar dalam sebuah kesempatan.

Terkait momen bahagia tersebut, Nisya dan Ibang sedikit berbagi kisah. Menurut mereka, ada hal menarik yang sangat membekas dihati keduanya, yakni perihal desain gambar unik dalam undangan pernikahan yang mereka sebar. Mereka membuat kartu undangan yang tak lazim untuk acara pernikahan, yaitu gambar dua ekor burung saling terkait dengan cakar yang diikat dengan rantai dan dikurung dalam terali besi. Desain tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk penggambaran mereka atas situasi yang dihadapi saat itu. Kini setelah hampir dua puluh tahun menikah, mereka dikarunia 3 orang anak: Salmaa Khanzaa (15), Akhfa Nazhat (12), dan Qaramitha Mulia (5).

Merawat Alam: Gagasan dan Aksi

Setelah kurang lebih dua dekade menjalani perannya sebagai aktivis lingkungan, Nisya dan Ibang mulai berpikir lebih strategis. Formulasi seperti apa yang harus mereka rancang guna menyelesaikan persoalan lingkungan yang kian hari kian sulit dibenahi. Menjadi aktivis dengan segala konsekuensinya—dikejar aparat, ditangkap, dan bahkan



Foto keluarga Nisya dan Ibang (Dokumen Pribadi)

diancam oleh pihak lawan—adalah pilihan ideal yang sejatinya mereka ambil. Namun, dengan usia yang semakin bertambah, fisik yang juga tak lagi sekuat dua puluh tahun lalu, Nisya dan Ibang pun harus lebih realistis. Tetap aktif merawat lingkungan adalah prinsip yang tak akan mereka ubah dalam hidup. Hanya saja, mereka perlu menggunakan langkah yang lebih strategis, bukan lagi dengan model advokasi (pendampingan) maupun demonstrasi. Pola tersebut, dalam pandangan Nisya dan Ibang lebih cocok diperankan oleh kelompok aktivis berusia muda, bukan oleh mereka yang secara usia sudah mulai menapaki usia senja.

Setelah berdiskusi secara intensif, termasuk meminta pendapat dari keluarga, kerabat dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, diputuskan bahwa mereka akan mengambil jalur pendidikan sebagai strategi merawat alam. Mereka berupaya memanfaatkan media pendidikan untuk menggerakkan masyarakat akan pentingnya gerakan ‘kembali ke alam’ (*back to nature*) yang muncul

seiring terjadinya kerusakan alam, kebakaran hutan, serta hancurnya ekosistem. Beberapa kasus mereka jadikan latar belakang, di antaranya terkait kecenderungan manusia yang seringkali terjebak dalam sifatnya yang ingin menundukkan dan mengeksploitasi alam secara semena-mena demi memenuhi kebutuhannya. Nisya dan Ibang mengambil contoh kasus masyarakat Dayak, Kalimantan. Menurut mereka, masyarakat Dayak saat ini mulai teralienasi dari dunianya sendiri. Ragam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak kini sudah tidak lagi digunakan.

Di masa lalu, menurut Nisya dan Ibang, para peladang tradisional atau peladang berpindah di Kalimantan (khususnya masyarakat Dayak) menggunakan sistem 'Nataki' untuk membakar hutan dalam rangka membuka lahan. Caranya dengan merobohkan pepohonan, belukar, atau ilalang di sekeliling lahan yang hendak dibakar. Setelah dirobohkan, ilalang atau belukar biasanya disapu ke arah lahan yang hendak dibakar. Itu dilakukan supaya batas api itu benar-benar bersih. Setelah batas api bersih, mereka baru memulai membakar lahan. Sebelum membakar lahan, mereka biasanya juga mengamati arah angin. Mereka akan membakar searah tiupan angin, tetapi ujung lahan biasanya sudah dibakar sedikit supaya jika tiba-tiba angin membesar, api tidak keluar dari batas api. Lahan dibakar selama tiga atau empat hari. Saat abu sudah mengendap, petani baru menanam lahan dengan tanaman pangan atau sayur-sayuran. Akan tetapi, kearifan lokal Nataki tersebut tidak lagi digunakan oleh masyarakat setempat. Dikendalikan

oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan, masyarakat dipaksa untuk melakukan pembakaran hutan dengan metode yang lebih efektif, modern dan jauh dari prinsip-prinsip tradisional. Akibatnya, membakar hutan dilakukan secara serampangan dan akhirnya berdampak pada hancurnya lingkungan alam Kalimantan. Ini baru satu contoh. Di bagian wilayah lain, hal sama berlaku. Alam tak lagi dijaga, kearifan lokal ditinggalkan, dan jalan pintas diambil oleh masyarakat demi mencari keuntungan sesaat.

Di Papua, misalnya, globalisasi telah berhasil menghancurkan tatanan sosial-budaya masyarakat atas alam. Jika dulu hutan bagi masyarakat Papua, ibarat gudang penyimpanan makanan dan sumber obat-obatan tradisional, saat ini kondisinya begitu mengkhawatirkan. Eksploitasi besar-besaran atas hutan terus berlangsung tanpa mempedulikan kondisi masyarakat Papua yang sejatinya memiliki beragam kearifan lokal dalam memperlakukan alam. Pun jika kita melihat kasus Suku Anak Dalam (sering pula disebut Orang Rimba/Suku Kubu) di Jambi. Akibat keserakahan manusia mengeksploitasi alam, mereka menjadi “anak yatim industri” yang teralienasi dari dunianya sendiri. Maraknya perambahan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan—seiring berkembangnya proyek industri perkebunan monokultur di wilayah tersebut—membuat Suku Anak Dalam tergusur ruang hidupnya; terasing dan tersingkir dari tanah kelahirannya. Sementara itu, pemerintah tidak cukup memiliki perhatian atas beragam masalah tersebut, bahkan ketika berupaya

menghadirkan regulasi/peraturan untuk merespon kondisi yang ada, pemerintah pun sulit mengelak dari fakta bahwa regulasi/peraturan tersebut justru dimanfaatkan secara sistemik oleh sebagian kelompok untuk terus mengeksploitasi alam dan menghadirkan kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Bagi Nisya dan Ibang, hal itu dimaklumi karena semua mafhum, setiap regulasi/peraturan merupakan hasil pertarungan ideologi politik, dan sayangnya seringkali dimenangkan oleh kelompok kapitalis yang dengan legitimasi regulasi/peraturan secara percaya diri melancarkan aksinya.

Ragam kondisi itulah yang menjadi kegelisahan Nisya dan Ibang. Keduanya melihat banyak sekali persoalan di sekitar ranah ekologi yang membutuhkan penanganan cepat. Gagasan disusun, aksi pun dilancarkan. Dan, seperti dijelaskan di atas, pendidikan menjadi jalur yang digunakan. Dengan pengalaman Ibang sebagai santri di beberapa pondok pesantren, mereka bersepakat untuk melancarkan gerakan merawat alam melalui pendirian sebuah pesantren ekologi. Bukan tanpa alasan keduanya memilih pesantren sebagai media gerakan. Sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan masyarakat, pesantren memadukan fungsi pendidikan dan fungsi keagamaan. Dikaitkan dengan lingkungan, pesantren dipandang sebagai media paling efektif untuk men-diseminasi ragam ajaran terkait pentingnya menjaga alam/lingkungan hidup.

Hal lain bahwa secara teologis, agama, dalam hal ini Islam, memerintahkan manusia menjaga lingkungan

hidup (Al Araf:10, Al Mukminun: 17, Ar Ruum: 41). Nisya dan Ibang, dalam hal ini merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an, seperti "*Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia (tanpa tujuan)*"(Q.S. As- Shad: 27). Ayat lain yang dirujuk Nisya dan Ibang adalah Q.S. Ibrahim ayat 32 dan Al-Zukhruf ayat 13. Dalam ayat-ayat tersebut, ditegaskan, hubungan antara manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau bukan antara Tuhan dan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Bahwa manusia mampu mengelola alam sejatinya karena anugerah dari Allah SWT. Dengan mendasarkan pada beberapa ayat tersebut, Nisya dan Ibang melihat bahwa sebagai manusia kita diberi amanah untuk menjaga dan merawat alam dengan berbagai cara, salah satunya melalui media pesantren yang pada praktiknya, akan turut serta mengejawantahkan prinsip dan ajaran Islam melalui beragam agenda pelestarian lingkungan hidup yang *notabene* terkait erat dengan syarat ibadah, seperti: *Shalat-berwudu-air bersih; sumber air bersih* (mata air, sungai, hutan, dan seterusnya).

Demikianlah, pada tahun 2008 Nisya dan Ibang mendirikan pesantren Ath-Thaariq di tanah lahir mereka, Garut, Jawa Barat. Idenya berawal dari refleksi Nisya dan Ibang terhadap buruknya kondisi lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan menghalalkan segala cara, manusia dalam pandangan Nisya dan Ibang, telah secara membabi buta mengeksploitasi alam demi kepentingan

sesaat. Didukung oleh penggunaan ideologi pembangunan yang sangat kapitalistik, manusia menghadirkan kerusakan lingkungan yang selain mengganggu ekosistem alam juga menafikan sebagian manusia lain yang memiliki hak hidup serta hak memanfaatkan alam. Alih-alih diposisikan sebagai subjek, alam oleh manusia didudukkan sebagai objek yang selalu dieksploitasi secara tidak bertanggungjawab.

Nisya dan Ibang melihat bahwa Indonesia memiliki modal alam melimpah yang menjanjikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Namun akibat minim pengetahuan dan tidak mampu mengoptimalkannya dengan baik, masyarakat menjadi terlihat acuh terhadap lingkungan. Karenanya, ketika sebuah tantangan global hadir, masyarakat tidak mampu merespon dan justru menjadi korban. Gerakan Revolusi Hijau, misalnya. Akibat tidak mampu menjawab tantangan global tersebut, masyarakat khususnya kelompok petani menjadi korban. Tentang ini, Ibang bertutur,

“Abi dan Umi adalah orang yang lahir dari kampung, dan mengetahui persis bagaimana dan seperti apa Revolusi Hijau. Gerakan tersebut membawa dampak besar bagi kami yang tinggal di kampung-kampung. Revolusi Hijau telah menyerang kampung-kampung, dan sayangnya tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Secara terstruktur revolusi hijau berhasil menciptakan situasi di mana para petani kalah sebelum berperang. Jika mereka tidak menggunakan pupuk urea, benih hibrida, atau benih IR, maka petani akan dipanggil ke balai desa dan diinterogasi. Menggunakan dalih pembangunan, semua orang, utamanya para petani, diminta

untuk melakukan swasembada pangan. Namun karena tidak diimbangi dengan pemberian ragam pengetahuan, mereka justru gagal. Dari luar agenda swasembada pangan memang tampak berhasil, namun dari dalam, mental para petani yang dikorbankan. Terutama sejak tahun 1980-an, terjadi demoralisasi di kampung-kampung. Sementara orang kota menikmati hasil kerja para petani di kampung, para petani berangsur bermasalah secara mental. Mereka, misalnya, ketagihan menggunakan benih-benih hibrida dan pupuk yang sudah mulai diindustrialisasi. Alih-alih semakin mandiri, para petani justru dimanjakan oleh ketersediaan bahan. Ketika panen, petani bawa uang dan langsung ke pasar untuk selanjutnya membeli benih dan pupuk yang sudah dikapitalisasi. Kondisi tersebut pada gilirannya membentuk menjadi petani yang instan dan konsumtif tanpa pernah berusaha memanfaatkan keanekaragaman benih yang terdapat dikampung-kampung.”

Sebagai pesantren ekologi, Ath-Thaariq mengajarkan tidak hanya ilmu agama kepada para santrinya, tapi juga tentang pertanian, termasuk mengolah makanan lokal, dalam hal ini yang sesuai dengan budaya Sunda. Menjaga alam dan lingkungan sehat menjadi prinsip dasar yang dipegang oleh pesantren yang namanya diambil dari salah satu ayat dalam al-Qur'an ini.

Bermodal lahan seluas 7.500 meter persegi, pesantren Ath-Thaariq menjadi laboratorium sekaligus tempat praktik bertani para siswa dalam konteks penguatan kedaulatan pangan. Terbagi dalam enam petak sawah, lahan tersebut



Aktivitas berkebun oleh siswa-siswi pesantren Ath-Thaariq Dok.Pribadi Nisya Wargadipura

ditanami padi pada setiap petaknya. Dengan penanaman organik, dari satu petak sawah dihasilkan sekitar 2 ton sekali panen.

Sistem pertanian polikultur menjadi pilihan yang dikembangkan Nisya dan Ibang. Maka selain padi, ditanam pula sumber karbohidrat lain, seperti ganyong, talas, dan pisang muda, termasuk pula sayuran kenikir, pegagan, ruku-ruku, daun kelor, beligo, labu kuning, tomat ranti, dan ceri monyet. Sistem ini dipilih karena dianggap mampu menjamin ketersediaan beragam pangan secara berkelanjutan. Praktik ini menjadi otokritik atas sistem pertanian monokultur, terutama hortikultura, yang selain kerap sekadar memenuhi permintaan pasar juga tak jarang merugikan para petani, khususnya ketika terjadi gagal panen.

Pertanian yang mengembangkan kebahagiaan dan kecintaan, demikian Nisya menyebut model pertanian yang dikembangkan oleh pesantren Ath-Thaariq. Prinsip

dasarnya bahwa hasil panen sebesar besarnya harus mengutamakan kebutuhan keluarga, bukan pasar. Penuhi dulu gizi dan nutrisi keluarga, bila bersisa boleh dikeluarkan sebagai ekonomi alternatif, dengan kualitas yang sama yang ditanam dengan rasa kemanusiaan, dibagikan untuk tetangga dan masyarakat yang membutuhkan, ujar Nisya dalam sebuah kesempatan.

Kenapa harus dengan rasa kemanusiaan? Tentang ini Nisya melihat, petani saat seringkali menanam tidak berdasar pada rasa kemanusiaan, perubahan iklim dan dalam banyak kasus berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Dampaknya, kepanikan melanda para petani dan itu berpengaruh pada pola bertani yang dilakukan. Didorong ketakutan gagal panen, para petani menggunakan pestisida dan pupuk urea dengan tidak menyesuaikan takaran yang seharusnya, bahkan di antara mereka banyak yang menggunakan dosis berlebih. Mereka tidak ingat bahwa hasil panen mereka dimakan oleh keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya sesama manusia, alhasil dari tanaman yang dikonsumsi setiap hari oleh para konsumen, terdapat banyak sekali penyakit bawaan, yang paling mengerikan adalah ibu-ibu yang melahirkan dengan jalan *caesar*, hampir semua anak bayi yang dilahirkan harus dirawat lebih lama karena *billyrubin/kuning*, jumlah meningkat anak-anak autisme dan *down syndrome*, serta penyakit mengerikan lainnya.

Penting dicatat, lahan pekarangan pesantren Ath-Thaariq sejauh ini telah dikembangkan sebagai apotik hidup



Bertani memanfaatkan lahan seadanya di Teras Pesantren Ath-Thaariq (Dok. Pribadi Nisya Wargadipura)

dengan menanam tanaman obat keluarga (TOGA) dan gizi dengan menanam berbagai kacang – kacangan, buah-buahan dan sayuran. Demi mengendalikan dan mencegah adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman, pesantren menanam beragam jenis tanaman, tindakan ini pun mempermudah keluarga untuk mendapatkan akses makanan sehat dengan mengembangkan system bertani organik, sekaligus berperan pula dalam pelestarian lingkungan berupa kesejukan, kesegaran, keindahan, biodiversitas, dan bahkan membantu memitigasi gas rumah kaca (produk *intangible*) di kawasan pemukiman secara berkelanjutan.

Pekarangan Pesantren Ath-Thaariq mampu memenuhi sebuah gerakan berbentuk intensifikasi. Pekarangan sebagai warung hidup, yaitu pekarangan yang memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber vitamin yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh, kebutuhan vitamin sangat penting artinya bagi tubuh manusia. Fungsi lain yaitu sebagai sumber mineral,

sumber penganekaragaman (diversifikasi) makanan, serta sebagai sarana kesehatan. Dalam hal ini, Nisya meyakini, lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yaitu warung hidup dan apotik hidup, menambah pendapatan keluarga, memberikan keindahan lingkungan tempat tinggal, juga mampu dijadikan aset berharga bagi pengembangan usaha tani skala rumah tangga. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dapat dijadikan basis usaha pertanian tanaman sayuran dan tanaman obat dalam rangka memberdayakan sumberdaya keluarga serta meningkatkan kedaulatan pangan dan kecukupan gizi yang sehat, alami dengan sistem bertani yang sangat ramah lingkungan.

Demi menjaga keberlangsungan sistem pertanian, Nisya dan Ibang berinisiatif untuk mengembangkan sendiri bibit tanaman yang hingga kini berjumlah sekitar 450 benih, mulai dari padi Ciherang dan Sarinah hingga bunga telang ungu dan beligo. Tidak hanya sampai proses bertani, pasca bertani pun menjadi *concern* Nisya dan Ibang. Para siswa tidak hanya diajarkan cara menanam dan panen, tapi juga mengolah hasil panen menjadi bahan makanan. Targetnya, para siswa akan memiliki pemahaman tentang gizi dan khasiat makanan yang akan dikonsumsi.

Mereka yang tergabung dalam pesantren umumnya berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Setiap tahunnya, demi alasan efektivitas dan kualitas, Nisya dan Ibang bersepakat untuk menerima siswa tidak lebih dari 30 orang dengan batas umur yaitu kelas 1 SMP dan batas



Suasana berkebun para siswi pesantren Ath-Thaariq (Dok. Pribadi Nisya Wargadipura)

akhir mahasiswa semester akhir. Artinya, mereka masih berstatus pelajar SD belum bisa diterima di Pesantren Ath-Thaariq. Alasannya sederhana, usia SMP dianggap sudah bisa mandiri dan tentu saja, mampu mengikuti sistem yang digunakan oleh Pesantren Ath-Thaariq.

Di masa awal pendirian, pesantren ini hanya diikuti oleh 6 orang siswa. Namun seiring semakin kokohnya konsep yang ditawarkan, dengan hanya fokus pada ranah ekologi, banyak masyarakat yang akhirnya melirik pesantren ini. Dimulai dari warga sekitar, pesantren berhasil meyakinkan masyarakat di wilayah Garut, dan bahkan di beberapa wilayah lain di Jawa Barat, untuk menitipkan anaknya di pesantren.

Sekolah alternatif. Barangkali itu istilah yang dapat diberikan kepada Pesantren Ath-Thaariq. Sebab, pola pembelajaran pesantren ini tidak seperti layaknya di sekolah formal. Terkait hal ini, Nisya berujar,



Kunjungan mahasiswa asal Thailand dan Myanmar di pesantren Ath-Thaariq pada 2016 (Foto Marnoto, <http://gapuraindonesia.com>)

“Pesantren Ath-Thaariq tergolong pesantren salafiyah. Tidak membangun sekolah formal agar dia tidak disebut eksklusif. Sengaja dibuat itu, santri-santrinya sekolah di negeri dan swasta, sekolah milik pemerintah dan milik organisasi Muhammadiyah, NU dan Persatuan, agar santri santrinya bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan dunia luar. Siswa-siswi sengaja juga disebar di sekolah-sekolah tersebut agar mereka tahu, bahwa hidup tidak sendirian. Santri-santri itu setelah belajar, pulangnya baru ke Pesantren.”

Di Ath-Thaariq, pembelajaran siswa tidak hanya dilakukan di dalam ruang dengan patokan jam pelajaran. Materi yang disampaikan secara bertahap mulai dari Subuh dengan materi pengajian al-Qur'an. Seperti diungkapkan oleh Nisya, siang harinya, siswa menimba ilmu di sekolah formal yang tidak jauh dari lingkungan pesantren. Pulang



Kang Ibang menerima kunjungan dari SD IT Al Mubarak Garut, 14 April 2015 (Dok. Pribadi Nisya Wargadipura)

sekolah, sekitar pukul 15.00 WIB, pembelajaran ekologi kembali dilakukan secara teori maupun praktek. Kegiatan yang dilakukan berupa pembenihan, penanaman, perawatan tanaman, memanen hingga pengolahan pasca panen.

Dalam kesehariannya, pesantren selalu mengedepankan prinsip keterbukaan (inklusif) dan universal. Terbuka dalam arti bahwa pesantren menerima berbagai pihak—meski berbeda suku, agama, atau ras—untuk bergabung belajar bersama. Dengan prinsip ini, hampir setiap bulan pesantren kedatangan tamu, baik individu maupun kelompok, yang berniat mendalami ilmu-ilmu ekologi. Dalam hal ini, Nisya dan Ibang langsung menjadi mentor para tamu yang menurut catatan berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Sedangkan prinsip universal dipegang teguh oleh pesantren jika sudah berhadapan dengan pelbagai hal

terkait pemahaman keagamaan. Meskipun Nisya dan Ibang beragama Islam, mereka selalu berpikir secara universal. Mereka yang datang ke pesantren sangat tidak dianjurkan untuk membincang 3 hal: Tuhan, Kitab Suci, dan Nabi. Nisya dan Ibang menyadari, membahas 3 hal tersebut di pesantren akan sangat rentan menimbulkan perbedaan pemikiran bahkan keyakinan. Menurut Nisya,

“Meskipun diramaikan oleh banyak perbedaan, pesantren tetap menjunjung tinggi penghormatan atas perbedaan itu. Tidak ada pertengkaran dalam meyakini ajaran-ajaran yang diterapkan yang didapatkan di sekolah. Kami selalu berusaha meluruskan bila ada pertengkaran atas perbedaan, menjelaskan dan berdiskusi sedetail mungkin, tentang penghargaan tertinggi adalah menghormati keyakinan masing-masing.”

Prinsip universal itu pula yang dalam sejarahnya menjadi awal gagasan pendirian pesantren. Menurut Nisya dan Ibang, pesantren dihadirkan justru ingin memperkuat pengetahuan masyarakat atas persoalan ekologi yang notabene bersifat universal, tidak ‘berjenis kelamin’, dan tidak terkotak-kotak secara keagamaan ataupun kesukuan. Di dalam lingkungan pesantren, yang akan diperbincangkan seluruhnya adalah perihal ekologi, perihal bumi yang hari ini diinjak, dihirup, dilihat, dipegang, ditiduri, dirawat, dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Mencivil Optimisme: Visi dan Harapan

Dengan motto “peduli bumi, peduli sesama, dan peduli masa



Siswa-siswi SMA Kanisius Jakarta ketika berkunjung dan mempraktikkan cara memberi pupuk alami di pesantren Ath-Thaariq (Dok. Pribadi Nisya Wargadipura)

depan”, pesantren Ath-Thaariq memiliki harapan jangka panjang untuk tetap mampu berdiri di barisan terdepan dalam menjaga lingkungan alam melalui pendekatan agama. Kehancuran ekologi akibat ulah manusia hanya mampu diperbaiki dengan terlebih dahulu memperkuat moralitas agama setiap orang. Peduli masa depan, sesuai motto yang ada, dimaksudkan agar para alumni pesantren nantinya akan tetap memegang teguh prinsip penjagaan atas alam di masa depan. Karenanya, ketika nanti mereka menanam, hal itu dilakukan tidak hanya sekedar untuk manusia atau binatang, tapi juga untuk semesta alam sebagai investasi di masa depan. Hal lain yang diharapkan, selepas belajar dan berpesantren, santri-santri Ath-Thaariq mampu mengembangkan dirinya secara mandiri. Mereka diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungannya. Berhubungan dengan salah satu konsep pendidikan yang dikembangkan yaitu

manajemen kepemimpinan. Mereka dididik untuk menjadi pemimpin, kelak menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing, paling sedikit memimpin komunitasnya, atau jika berkesempatan, menjadi kepala desa, atau anggota DPR, yang selalu menggunakan perspektif penyelamatan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.

Nisya dan Ibang mafhum, persoalan lingkungan tidak mungkin terselesaikan tanpa keseriusan. Sederet kebijakan yang dihadirkan pemerintah jika tidak diimbangi dengan komitmen tentu akan sangat sia-sia, terlebih terkait lingkungan yang *notabene* memiliki beragam celah permasalahan. Melalui pesantren Ath-Thaariq, Nisya dan Ibang menebarkan pesan, lembaga pendidikan, meskipun berstatus non-formal sekalipun, masih sangat diperlukan sebagai media diseminasi nilai-nilai kebajikan. Melalui lembaga pendidikan semisal Ath-Thaariq, diharapkan muncul sebuah formulasi pengembangan etika lingkungan yang akan merubah pandangan kosmologis yang awalnya sangat eksploitatif terhadap alam menjadi bersahabat dengan alam. Pun melalui Ath-Thaariq, diharapkan muncul pemahaman komprehensif terkait cara merawat alam. Bahwa terpenting adalah menyatukan semua unsur makhluk hidup (flora, fauna, dan bahkan manusia) dalam sebuah kesatuan ekosistem. Semua demi terjaganya kelestarian alam dengan tetap memberikan ruang bagi semua makhluk hidup untuk terus berdampingan dan terintegrasi.

Alhasil, menyebarkan pengetahuan dan mencetak kader

agro ekologi yang berpandangan pada penyelamatan dan kepedulian terhadap bumi, manusia dan masa depan adalah visi pesantren Ath-Thaariq. Dengan visi tersebut, pesantren Ath-Thaariq bergerak dengan misi menjadikan pesantren sebagai pusat tersebarnya sistem pengetahuan pertanian berkelanjutan yang berpandangan pada penyelamatan dan kepedulian terhadap bumi, manusia dan masa depan, serta menjadi contoh di Indonesia, yang mampu mengeluarkan berbagai produksi hasil pertanian tanpa merusak ekosistem yang ada, menjaga habitat, menjaga keanekaragaman hayati, memanen, dan memasarkannya dengan harga yang adil, sebagai bagian dari gerakan sosial, ekonomi dan ekologi yang berkeadilan.

Merawat Tradisi, Menggugat Diskriminasi: Profil Dewi Kanti Setyaningsih

Ali Nursahid

Situasi dan modal sosial keluarga membentuk Dewi Kanti tumbuh berkembang. Orang tua, para sesepuh adat Sunda Wiwitan memberikan banyak contoh bagaimana menghadapi perlakuan diskriminatif dengan cara-cara yang fleksibel dan tidak konfrontatif. Kanti belajar bagaimana berbagi, berempati, dan juga sambung rasa.

Dewi Kanti Setyaningsih (41), perempuan kelahiran Bandung 1975, menghabiskan masa kecilnya di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Putri bungsu pasangan Emalia Wigarningsih dan Pangeran Djatikusuma ini harus melewati pergolakan batin, mengalami sejumlah kekecewaan akibat

menghadapi situasi “panas” tahun 1980-an. Saat itu kaum Sunda Wiwitan baru saja melepaskan diri dari identitas Katolik, kembali ke identitas adatnya dengan membentuk Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Upacara adat *Seren Taun* dilarang oleh pemerintah. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan pembekuan ajarannya. Tuduhan pemurtadan dan penodaan agama pun dialamatkan pada Pangeran Djatikusuma beserta para pengikutnya.

Demi mengurangi tekanan, bersama sang kakak, Kanti kecil akhirnya melanjutkan Sekolah Menengah hingga kuliah di Jakarta. Kekhawatiran orang tuanya, jika sekolah di Kuningan, akan ada tekanan semacam “Madrasis phobia” dari kelompok masyarakat. Namun di sekolah terkadang Kanti masih saja menerima sindiran dari guru. Situasi mendebarkan tiba ketika menghadapi ujian atau praktek agama. Kanti merasa ada perasaan tertekan, kikuk dan stres. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dikerjakanlah sekadarnya, sehingga nilai hasil akhir ujiannya jeblok, tidak memenuhi standar. Ujung-ujungnya sang wali dipanggil ke sekolah. “Bagaimana mau praktek sholat, orang tidak hafal-hafal,” celetuknya sembari tersenyum.

Setelah pendidikan menengah dijalani di Tangerang Selatan, perkembangan remaja Kanti berlanjut bekerja di sebuah bank di Jakarta. Di sela-sela dunia kerja, seperti layaknya remaja yang tumbuh, ada pemuda yang ingin berhubungan kasih secara serius. Namun pergolakan batin terjadi, ketika keluarga sang pemuda tahu berhubungan dengan keluarga yang punya keyakinan berbeda. Hubungan

mereka pun akhirnya kandas.

Setelah kuliah di jurusan perbankan pada Universitas swasta, Kanti bekerja di sebuah bank hingga 1997 di Jakarta. Aktivitasnya sebagai *frontliner* di sebuah bank, berhubungan dengan *customer*, dan berupaya memberikan *service* terbaik pada nasabah menjadi salah satu modal dasar berkomunikasi dalam pergaulan Kanti berikutnya. Dari situlah Kanti banyak belajar berdiplomasi, belajar mendengar keluhan, dan lain sebagainya.

Namun, Kanti muda merasa “kehilangan masa” di mana sebenarnya persoalan ketidakadilan dihadapi oleh komunitasnya. Dia melihat ayahnya seolah berjuang sendirian, sementara dia menjauh dari persoalan tersebut. Periode remaja Kanti adalah periode anak muda yang ingin mencari aman, dengan berusaha untuk menutupi identitasnya.

Pergolakan Kanti bermula ketika diajak sang ayah, Pangeran Djati Kusuma, bertemu dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di PBNU dalam rangka meminta dukungan untuk persoalan yang kakaknya alami. Saat itu sang kakak, Gumirat Barna Alam dan Susilawati, akta nikahnya diganjal Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Timur pada Mei 1997. Alasan catatan sipil adalah pernikahan pasangan tersebut tidak dilangsungkan menurut agama yang diakui pemerintah.

Kanti membantu ayahnya membawakan tumpukan berkas saat bertemu Gus Dur di kantor PBNU. Pertemuan tersebut berlanjut silaturahmi dan *sharing* soal problem

pernikahan kakaknya yang berujung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adanya empati Gus Dur memberikan kesan Kanti bahwa ada harapan atas persoalan yang dihadapi keluarganya. “Saya berfikir ngapain kita *nyari* aman untuk *mikiran* diri sendiri, padahal tanggungjawab di komunitas juga cukup berat,” ungkapnya. Dari diskusi bareng sang ayah tersebut Kanti ketemu jaringan lain, hingga membentuk *Indonesian Conference on Religion on Peace* (ICRP), Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA). Kanti mulai turut terlibat, aktif berproses dan belajar bersama.

Proses pertumbuhan Kanti dirasakan bertahap. Awalnya, dia juga tidak punya kemampuan untuk bicara di forum-forum dan terbata-bata jika berhadapan dengan orang banyak. Namun Kanti berusaha untuk terus melatih diri berani dan mengungkapkan pendapat pada setiap forum. Itu semua dialami Kanti akibat sekian lama menghindar dari persoalan yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Boleh dibilang, periode remaja Kanti adalah fase ketika dia berusaha mencari aman.

Dari memfotokopi dokumen-dokumen berkas kasus kakaknyalah akhirnya Kanti mempelajari banyak hal. Dari dokumen tersebut Kanti memahami bagaimana kaum adat dijebak harus memilih salah satu agama tertentu, sampai bagaimana dampak perkawinan tersebut pada sejumlah hak-hak anak nantinya. Kebulatan tekadnya menggumpal untuk turut mengambil resiko, menjadi bagian dari perjuangan kaum Sunda Wiwitan.

Dewi Kanti berjumpa dengan pasangannya, Okky Satrio, saat sama-sama intens mengadvokasi kalangan penghayat dan konsolidasi masyarakat adat pasca reformasi. Meskipun sejak Okky menjadi aktivis zaman Orde Baru pun kerap menjumpainya “ngumpet” di Cigugur dan berdiskusi dengan ayahnya hingga larut malam. Saat menikah, mereka mengukirkan cinta kasihnya lewat cara adat pada Maret 2002. Dengan posisi Okky tetap menganut Katolik dan Kanti dengan keyakinan adatnya, disaksikan tokoh-tokoh lintas agama. Perkawinan beda agama dijalani kedua pasangan tersebut dengan seolah “menantang negara”, dengan menghadirkan beragam tokoh-tokoh lintas agama.

Lebih jauh, pergulatan menghadapi problem kependudukan dialami Kanti saat mengurus perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sewaktu tinggal di wilayah Jakarta Selatan 2010 silam. Dalam KTP sebelumnya, kolom agama diisi strip. Namun begitu KTP baru jadi, Kanti pun dibuat kaget karena kolom agamanya dituliskan Islam. Akhirnya dia melayangkan surat protes ke kelurahan Cilandak atas kekeliruan dengan menyertakan bukti rekaman video percakapan dengan petugas. Pada saat itu, dalam empat hari, dicetaklah tiga KTP atas nama Kanti.

Dari pertemuan dengan banyak komunitas adat lainnya Kanti mendapatkan banyak kisah serupa. Dewi Kanti belajar dari keberhasilan kelompok adat lain yang berhasil mendapat legalitas dari pemerintah. Beberapa kali Kanti diundang ke Kajang (Ammatoa), Parmalim, untuk saling berbagi, menguatkan, dan saling belajar dari praktik-

praktik baik dalam mengelola keragaman. “Semakin kami mengidentifikasi, membuka dengan banyak kalangan, maka makin banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi dukungan solidaritas daerah lain juga makin mengalir,” paparnya.

Kanti menyadari bahwa saat ini dia mempunyai keberanian karena ada upaya untuk terus menambah wawasan. Berinteraksi dengan banyak lembaga masyarakat menjadi salah satu bekal untuk ditularkan pada anak-anak muda dalam memperjuangkan hak-hak konstitusi. “Kita bisa dan mampu. Dan ini bukan diperjuangkan oleh orang lain, tapi terlibat mengambil bagian dari sebuah tim yang turut sama-sama berjuang”, tegas Kanti. Bagi dia, ini bukan tergantung pada siapa yang melakukan, tapi bagaimana masing-masing dapat berperan, mengambil sikap, sesuai fungsi dan kemampuan.

Dalam konteks mengembangkan ajaran Sunda Wiwitan Kanti bersama delapan saudara lainnya berbagi peran. Kanti lewat tembang, ada yang dengan tari, lalu saudara lainya lewat seni batik Sunda, mengumpulkan manuskrip, sastra dan lain-lain. Ada juga dari sekian kakaknya yang menjadi penopang pembiayaan kegiatan bersama. Pembagian tersebut tumbuh alami, berangkat dari kecenderungan pribadi masing-masing. “Bapak dan ibu kami tidak mendoktrin, tapi lewat praktek laku dan nilai,” tegas Kanti.

Menyelamatkan Lingkungan

Paska reformasi, Kanti kerap bolak-balik Jakarta-Kuningan jika ada pertemuan bulanan. Namun pada pertengahan

2012 memantapkan diri menetap di Kuningan karena terkait munculnya kasus Geothermal di Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, dan Majalengka, Jawa Barat. Bersama sang suami, Okky Satrio, menggalang warga sekitar mengajukan keberatan atas rencana eksplorasi geothermal oleh Chevron. Eksplorasi panas bumi tersebut dikhawatirkan akan mengancam lingkungan dan menggusur lahan pertanian warga sekitar.

Proyek senilai 60 miliar tersebut mulai dijalankan oleh PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) sejak Gunung Ciremai ditetapkan sebagai wilayah kerja pertambangan oleh menteri ESDM pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan pelelangan pada tahun 2012. Wilayah kerja Pertambangan Ciremai ini direncanakan mencapai luas 24.330 hektar yang terdiri dari 350 titik, dengan sebagainya berada di wilayah Taman Nasional/Hutan konservasi.

Bagi Kanti, kasus Gheothermal tidak bisa dianggap sepele. Selain prosesnya yang tidak transparan dan minim sosialisasi oleh pemerintah, kekhawatiran muncul jika ada eksplorasi ini akan mengakibatkan kualitas dan debit air menurun. Berkaca dari pengalaman daerah serupa seperti wilayah Dieng, Jawa Tengah dan Kertasari, Bandung, bahwa Gheothermal adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan tidaklah terjadi. Kerusakan hutan dan potensi gempa menjadi dasar penolakan warga sekitar Ciremai.

Bersama sang suami akhirnya Kanti berjibaku membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persoalan penyelamatan lingkungan. Konsolidasi pada

masyarakat terdampak dilakukan dengan menggandeng sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat seperti, pesantren, pesilat, penjaga situs, dan lain-lain. Informasi dampak lingkungan juga dikumpulkan dengan mendatangkan sejumlah ahli/akademisi.

Dari persoalan tersebut Kanti menjadi tahu banyak hal terkait problem sosial di Kuningan. Pada saat bersamaan, sekitar 25 dosen IAIN se-Indonesia melakukan *live in* di beberapa dusun di Kuningan. Kanti menjadi tahu sejumlah problem mendasar di Cigugur adalah banyaknya anak muda yang terbius kegiatan di Kota, sehingga meninggalkan kampung halaman mereka. Lewat metode proses penelitian *Participatory action research* (PAR), Kanti terlibat banyak menggali persoalan, memetakan potensi, dan sebagainya. Mulai dari problem air, tanah, sawah yang mulai banyak dijual oleh masyarakat demi menyekolahkan anaknya ke luar. Kanti melihat pada akhirnya banyak masyarakat kehilangan alat produksi. “Kita kehilangan akar sebagai masyarakat agraris,” simpulnya.

Dampak lainnya, semenjak *Seren Taun* dilarang (1982-1999) masyarakat yang menanam *varietas* (tanaman) lokal menjadi sedikit. Mereka menjadi berfikir ulang secara kegunaan, dan akhirnya beralih menjadi peternak. Ada pemikiran di masyarakat jika menanam nanti buat apa? Padahal dalam pertanian ada keguyuban. Sejak mulai mengolah tanah, menanam, hingga memanen, ada proses pembentukan karakter sosial (komunal) di masyarakat. Terkait dengan problem tata ruang di Kuningan tersebut

Kanti menjadi semakin banyak berdiskusi dengan generasi muda. Kanti melihat puluhan tahun pola pikir anak muda dibentuk kesadaran bahwa seseorang mempunyai harga diri itu jika bekerja di kota, bukan bertani di Kuningan. Ini menjadi tantangan tersendiri dan tidak mudah.

Kanti bersuamikan seorang aktivis Okky Satrio yang memahami peran, dan mempunyai visi yang sama. Albertus Satrio Repuntrato, lelaki yang kerap disapa Okky ini dikenal sebagai aktivis demonstran pada era sebelum tumbangannya kekuasaan Orde Baru. Dalam aktivitasnya itu, kini laki-laki yang pernah kuliah di fakultas Sosial-Politik, Universitas Dr. Mustopo Jakarta ini mengorganisir sejumlah kelompok masyarakat dalam penolakan Geothermal.

Problem konsolidasi masyarakat yang beragam kelompok berusaha dipecahkan Kanti bersama suaminya. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan sejumlah elit masyarakat di lokal Kuningan sangatlah penting. Menurut dia, saat ini masih banyak stigma dan prasangka terhadap kelompok Sunda Wiwitan. Namun dalam menggerakkan isu Geothermal ini Kanti justru melihat banyak perubahan. Adanya persoalan baru ternyata berdampak pada perubahan kembali relasi jaringan, sehingga memori kolektif bisa tumbuh kembali. Misalnya ada beberapa dusun yang punya ikatan emosional bahwa orang tua, kakek, saudara-saudara mereka pernah saling berhubungan. Kanti meyakini jika sebuah gerakan masyarakat itu punya daya tahan yang panjang jika ada kolaborasi antara adat, petani, pesantren dan banyak kelompok masyarakat lainnya.

Saat ini mulai tumbuh ikatan kultural “spirit Cermai” dengan terbukanya kembali mozaik-mozaik sejarah masa lalu. Tercipta kembali tembang-tembang Sunda lama, yang berisi pesan untuk menjaga lingkungan, menghormati situs-situs sejarah. Misalnya sesepuh daerah Malar, pernah menerima pesan ‘harus dihindari kalau ada ular melingkar’, yang maksudnya adalah adanya pipa-pipa Geothermal di wilayah Ciremai. Maka mesti ada upaya penyelamatan bersama. Kemudian antar kelompok masyarakat mulai saling berkomunikasi kembali. Berlanjutlah dengan membangun advokasi penyelamatan lingkungan di tingkat pusat, nasional, berjejaring dengan akademisi, melakukan studi banding dan lain sebagainya dalam rangka menolak keberadaan Chevron.

Merawat Tradisi

Di gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Cigugur, Kuningan, tempat Pangeran Sadewa Alibassa (Pangeran Madrais) menyebarkan keyakinannya sejak 1840. Di sebuah bangunan kuno dengan pilar-pilar kayu jati yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada 1976 tersebut, putri bungsu Pangeran Djati Kusumah, Dewi Kanti, mengisahkan bagaimana para leluhurnya mewariskan ajaran-ajarannya dengan segala tantangannya.

Pangeran Madrais pada tahun 1901–1908 dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah Belanda. Lalu pemerintah Indonesia lewat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem 1961) juga membatasi ritual dan

kepercayaan masyarakat Sunda Wiwitan. Situasi tersebut membuat Pangeran Tedja Buana (putra Pangeran Madrais) pada 1964 menginstruksikan pengikutnya untuk memilih agama dengan simbol “berteduh di bawah cemara putih” guna menyelamatkan komunitasnya dari stigma perkawinan liar. Maka sebagian masyarakat Sunda Wiwitan memilih masuk agama Katolik dan Kristen, dan sebagian kecil lainnya masuk ke Islam.

Periode berikutnya adalah saat ayah Kanti, Pangeran Djati Kusumah, menjadi pemimpin Sunda Wiwitan menyatakan keluar dari Katolik. Akibatnya, melalui Bakorpakem, pemerintah melarang segala kegiatan tradisi Sunda Wiwitan, di antaranya Upacara Seren Taun (syukuran masyarakat pertanian) selama 17 tahun, dari 1982 hingga 1999. Meski begitu, upaya untuk terus mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan dengan membentuk paguyuban berusaha didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelembagaan secara formal dengan membentuk Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Bina Hayat pada 1982.

Namun hasilnya tak banyak membantu mengatasi kesulitan sejumlah persoalan administrasi sipilnya. Misalnya pada proses pembuatan KTP, penganut Sunda Wiwitan tetap saja dianggap tidak beragama, dan kolom agama pun dikosongkan. Dampak lainnya adalah saat pembuatan akta kelahiran anak, hanya pihak ibu yang disebutkan, sedangkan bapak ditulis secara administratif sebagai ayah angkat. Para siswa penganut Sunda Wiwitan juga harus menerima ajaran

agama lain di sekolah. Kesulitan administrasi kependudukan tersebut berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya.

Secara ajaran, Kanti melihat ada kesinambungan antara perjuangan ayahnya, sesepuh, dan seluruh warga. Cipta, rasa, dan karsa diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Terdapat ajaran *Pikukuh Tilu* (tiga yang harus dipegang teguh): 1) *Tatanan Waruga Jagat*, yaitu hukum keterikatan manusia dengan alam; 2) *Tatanan Waruga Manusa*, yaitu bagaimana manusia memanfaatkan daya dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai *Sampurnaning Hirup Sajatining Mati* dan *Sampurnaning Hurip Jatatining Pati* (hidup sempurna, mati sejati).

Ketulusan kaum Sunda Wiwitan dalam menjaga kawasan Cigugur hingga saat ini juga sebuah pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa. Dalam melestarikan Paseban yang ditempati saat ini saja bukanlah hal yang mudah. Selain faktor usia bangunan, hingga kerusakan saat Galunggung meletus tahun 1980-an, merawat dan membetulkan bangunan Paseban dilaksanakan bersama-sama dengan penuh gotong royong. “Saya membayangkan bagaimana masyarakat kecil dengan penuh kesederhanaan itu punya daya juang penuh. Saya tidak bisa duduk diam atau tidak mau mengambil risiko,” tegas Kanti.

Upacara adat tahunan *Seren Taun* bisa terlaksana juga karena kegotongroyongan. Upacara adat pada 22 *Rayagung* (kalender Sunda) menjadi lebih bermakna saat Gus Dur menjadi Presiden dan mengutus litbang Departemen Agama, Johan Effendy, datang ke Cigugur. Setelah tujuh

belas tahun upacara tersebut dilarang, ada suasana batin yang terbayarkan ketika upacara adat itu bisa terlaksana. Kanti melihat ketulusan dan kesabaran orang-orang tua menjalaninya. Mereka hanya punya kesadaran diri bahwa ini milik bersama, kalau bukan kita siapa lagi yang punya tanggungjawab melestarikan. Sesederhana yang mereka miliki mereka sumbangkan. Masing-masing orang menyumbang, ada buah-buahan, padi, tenaga, dan bagi Kanti itu semua adalah kekuatan, contoh guru yang luar biasa. Proses tersebut menancapkan pelajaran Kanti: bahwa hidup adalah pelayanan.

Fitnah dan tantangan juga Kanti hadapi saat pemugaran Paseban pada 2006 lalu. Sebagai putra daerah, Kanti bersama saudara-saudaranya mengupayakan pembangunan ke beberapa institusi untuk merenovasi, antara lain ke Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun keluarga Kanti mesti menghadapi fitnah karena dianggap mengkorupsi uang negara dan lain-lain. Padahal, posisi Yayasan hanyalah sebagai pengelola bangunan, yang statusnya cagar budaya, lalu yayasan melaporkan kerusakannya. Tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum adalah merehabilitasi bangunan bersejarah. Namun tuduhan menikmati uang proyek didengungkan oleh sejumlah orang. Padahal, menurut Kanti, uang jatuh pada kontraktor, bukan pada keluarga. Prosesnya pun lewat tender secara terbuka.

Menurut Kanti, saat bangunan Paseban masih ditopang dengan pohon kelapa, jarang orang yang mau peduli. Setelah Yayasan tertata, berhasil mengusahakan ke Kementerian

Pekerjaan Umum, tuduhan macam-macam dialamatkan. Belum lagi ada keinginan Bupati Kuningan untuk tukar guling, dengan pengelolaan cagar budaya diambil alih oleh pemerintah daerah. Pemkab Kuningan pernah menganggap Yayasan Trimulya sebagai Yayasan yang tidak jelas dan sebagainya.

Bagi keluarga Kanti, Paseban bukanlah monumen mati. Tempat tersebut adalah sejarah hidup yang aktivitas kesehariannya menghubungkan relasi antara masyarakat dengan sesepuh adat. Bukan sekadar bangunan yang menyimpan artefak kuno, tetapi di sini adalah monumen hidup, ada kegiatan kultural, ritual, belajar bersama, saling menguatkan dan juga meneguhkan. Bagi Kanti, pengalaman Itu semua adalah bagian dari periode tempaan hidup, pengalaman bagaimana menghadapi birokrasi, dengan segala perilakunya.

Selain itu, Kanti banyak melihat melihat contoh perilaku orang tuanya. Saat ayahnya menikah pada 1958, maskawin untuk ibunya dipakai untuk membangun sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cigugur, berseberangan dengan Paseban. Sebagai sekolah swasta pertama di Kuningan sekolah SMP tersebut cukup maju. Hal tersebut membuat Kanti melihat bagaimana orangtuanya berkorban, meneguhkan komitmen, konsisten terhadap prinsip. “Saya merasa malu jika tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang di sekitar saya,” ungkap Kanti.

Di Paseban Cigugur kerap diadakan perkumpulan Sunda Wiwitan secara mingguan, ada pula bulanan, rutin. Yang

dipelajari bermacam-macam, tak hanya ajaran Madrais yang melulu teori, tapi dimaknai pada laku dan *lampah*. Tempaan spiritual tekanannya pada bagaimana kesadaran diri selaku manusia, serta diri sebagai bangsa. Bagian dari ajaran Madrais adalah manusia harus punya karakter saling *asah* (*saling belajar*), *saling asih* (*saling menyayangi*), *undak usuk* (tata-krama), pengendalian diri, *rasa tumarasa* (*saling rasa*), *tumarima* (memberi-menerima) dan seterusnya. Dari situ diharapkan muncul kesadaran tentang kemanusiaan dan karakter kebangsaan.

Dalam paparan budaya spiritual yang dibukukan dalam *Pikukuh Tilu*, berisi dasar-dasar tuntunan ajaran Madrais, dijelaskan bagaimana tuntunan tentang Ketuhanan, tentang manusia, tentang alam semesta, dan kesempurnaan hidup. Dasar pengamalan budi luhur atau cara menjadi manusia dan berbangsa dijelaskan dalam konsep *welas asih* (kasih sayang), *undak usuk* (tata karma) *budi daya budi basa*.

Berbagi Peran

Terdapat perbedaan posisi sebagai pengurus Yayasan Trimulya dengan struktur organisasi adat Sunda Wiwitan. Dalam struktur adat lebih cair, di mana Kanti bertugas sebagai *girang pangaping* (pendamping wilayah). Bersama delapan saudara lainnya mengemban tugas masing-masing, ada yang di wilayah Bandung, Garut, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Kanti sendiri mengampu wilayah Kuningan Timur, Cigugur, Cibunut, Citangtu dan Cisantana, dengan jumlah sekitar 150-an kepala keluarga. Advokasi hak-hak

sipil, konstitusi, dan hak-hak kewarganegaraan dilakukan Kanti di lingkungan keluarga Sunda Wiwitan. Selain itu, Kanti juga sewaktu-waktu aktif melakukan advokasi di nasional (Jakarta) mengupayakan penyelesaian persoalan oleh pada pemerintah pusat.

Secara umum, Kanti melihat problem masyarakat Jawa Barat masih menaruh kecurigaan, *phobia*, stigma, dan ada diinformasi sejarah tentang keberadaan penghayat Sunda Wiwitan. Ada informasi yang menggiring seolah-olah kaum adat adalah sekumpulan orang-orang murtad, keluar dari Islam. Maka Kanti berusaha sebanyak mungkin bertemu dengan kelompok masyarakat untuk menjelaskan bagaimana status dan hak masyarakat adat sebenarnya. Selain itu, pihaknya juga berusaha untuk mendokumentasikan praktik pelanggaran konstitusi yang dialami kaumnya.

Strategi kebudayaan digunakan Kanti sebagai bahasa universal yang bisa dikembangkan. Perempuan yang mahir bermain kecapi ini mengajari anak-anak Sunda Wiwitan menembang, dengan menjelaskan makna yang ada dalam setiap liriknya. Bahkan, dalam beberapa pertemuan komunitas yang sedang menghadapi persoalan, seperti GKI Yasmin Bogor, Kendeng Pati, Kanti hadir di tengahnya untuk berdiskusi dan menyanyikan lagu-lagu Sunda Wiwitan. Bagi dia, kidung spiritual bukan sekadar seni tontonan, tapi ada pesan damai di dalamnya. Budaya menjadi perekat, sekaligus ada spirit tuntunan. Terdapat bahasa universal seperti wujud syukur, menjaga lingkungan, cinta kasih, dan penghormatan pada sang Maha Kuasa.

Di sisi lain, penguatan dan pendampingan warga Sunda Wiwitan jika menghadapi persoalan adalah tugas utamanya. Semenjak memasuki sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah siswa Sunda Wiwitan kerap mengalami pengalaman tak menyenangkan di sekolah. Saat pendaftaran sekolah ditanya identitas agamanya, diteriaki “kafir” oleh teman, atau mendapat tekanan psikis lainnya. Maka Kanti melakukan pendampingan langsung ke sekolah-sekolah di Kuningan, Ciamis dan Banjar. Dia menjelaskan pada pihak kepala sekolah maupun guru soal hak-hak warga negara. Tujuannya adalah agar kepercayaan anak-anak bisa tumbuh kembali.

Di tanah Paseban seluas sekitar 6000 meter berderet bangunan milik adat atas nama Yayasan Trimulya yang sudah ditetapkan sebagai hak komunal. Di bangunan cagar budaya tersebut Kanti berbagi peran dengan delapan saudara lainnya. “Kami di sini atas kepercayaan dari warga. Ini agak berbeda dengan komunitas lain, antara sesepuh dan masyarakat tidak berjarak, ada mekanisme bersama juga ada prerogatif kepala adat,” papar Kanti. Terdapat sistem kontrol dalam keluarga. Ada perwakilan sebagai *ais pangampih*, ada tiga *girang pangamping*. Dan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait persoalan Sunda Wiwitan dikonsultasikan pada warga.

Tempat yang mempunyai arti mempersatukan tiga kehendak: cipta, rasa, dan karsa ini tidak pernah sepi dari pengunjung setiap harinya. Terdapat beragam ruangan dan fungsi dengan sejumlah atribut adat Sunda Wiwitan

terpampang di Paseban Tri Panca Tunggal. Kegiatan diskusi, penguatan komunitas, pagelaran budaya, dan keterampilan karya tradisi Sunda kerap dilaksanakan. Di sudut-sudut ruangan berderet gamelan, ukiran akar dan kayu khas Sunda, batik Sunda, peralatan tari, serta arsitektur bangunan dengan simbol-simbol Sunda Wiwitan.

Bagian ujung ruangan Paseban dan aula berfungsi sebagai tempat pertemuan dan persiapan upacara *Seren Taun*. Sementara aula pertemuan di luar dan pondokan berfungsi sebagai penampung dan upacara saat ribuan peserta yang berbondong-bondong dari berbagai kota di Indonesia berdatangan. Sebelum upacara doa syukur atas kelimpahan pertanian dimulai, biasanya persiapan dikerjakan bersama-sama oleh beragam umat beragama, Katolik, Islam, kepercayaan, dengan sukarela tanpa memandang agama.

Di satu sisi, hingga saat ini hak-hak sipil penganut Sunda Wiwitan kerap terhambat. Diskriminasi di dunia pendidikan juga masih terjadi. Di banyak pertemuan dengan komunitas maupun lembaga, Kanti berusaha terus menjelaskan hak-hak konstitusional sesama warga negara. Bagi Kanti, hidup adalah mengabdikan pada nilai kemanusiaan. Konsekuensinya, ketika ada ketidakadilan, maka juga harus disuarakan. Itu yang meneguhkan diri Kanti. “Kalau bukan kita yang menyuarakan, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Waktu tidak berulang,” tegas Kanti.

Sebagai salah satu orang yang bertugas merawat ajaran Sunda Wiwitan, peran Kanti adalah membantu warga jika

terjadi persoalan, dan berdiskusi mewakili kelompoknya di banyak forum bersama kalangan masyarakat. Kemahirannya dalam bermain kecapi dan menembang juga mewarnai berbagai kegiatan pertemuan tersebut. Bagi dia, kebudayaan tak sekadar tontonan, tapi di dalamnya terdapat tuntunan yang mesti dikabarkan.***

Tentang Penulis

ALI NURSAHID adalah peneliti dan koordinator bidang komunikasi pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Selepas lulus dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 2005, dia melanjutkan studi Komunikasi Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta dan lulus pada 2016 dengan tesis tentang “Gerakan Payung Kamisan”. Aktifis yang bergiat di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), sejak 2005-2013 ini terlibat dalam penulisan berbagai laporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat* (2016).

HUSNI MUBAROK adalah peneliti dan manajer program pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan

tingginya di Jurusan Akidah dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan semasa kuliah aktif di Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciputat. Tahun 2012, dia menjadi fellow pada International Summer School “Negotiating Space in Diversity: Religions and Authorities” di Yogyakarta dan Bali. Selain terlibat dalam banyak riset dan publikasi PUSAD Paramadina, dia ikut menulis dalam *All You Need is Love: Cak Nur di Mata Anak Muda* (2008), *Pembaharuan tanpa Apologia? Esai-esai tentang Ahmad Wahib* (2010), *Kontroversi Gereja di Jakarta* (2011), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (2014), dan *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat* (2016).

IHSAN ALI-FAUZI adalah Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar pada Paramadina Graduate School, Jakarta. Dia pernah belajar sejarah dan ilmu politik di Ohio University, Athens, dan The Ohio State University (OSU), Columbus, keduanya di Amerika Serikat. Dia menulis di berbagai media massa nasional seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, *Majalah Tempo*, dan *Jakarta Post* dan jurnal seperti *Studia Islamika* dan *Asian Survey*. Bersama tim PUSAD Paramadina, dia menerbitkan *Disputed Churches in Jakarta* (2011) dan *Pemolisian Konflik Agama di Indonesia* (2014).

IRSYAD RAFSADI adalah peneliti dan koordinator bidang riset pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia lulusan Fakultas Syariah,

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan semasa kuliah bergiat di Forum Mahasiswa Ciputat. Pada 2013, dia sempat mengikuti Monsoon School di India, mengenai hak-hak asasi manusia dan pembangunan, yang diselenggarakan Kosmopolis Institute di Universiteit voor Humanistiek (UvH), Belanda. Selain menulis di *Koran Tempo*, *Majalah Tempo*, *Jakarta Globe*, dan *The Conversation* dia pernah menerjemahkan *Nirkekerasan dan Binadamai dalam Islam* (Pustaka Alvabet, 2010) dan *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (Mizan, 2016) serta ikut menulis *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (2014) dan *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat* (2016). Pada 2014, ia menjadi konsultan penghubung di Komisi Kepolisian Nasional untuk isu pemolisian kebebasan beragama.

RIZAL PANGGABEAN adalah staf pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan peneliti senior pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Dia sempat menempuh pendidikan master pada Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University, Amerika Serikat. Hasil-hasil risetnya diterbitkan antara lain jurnal *World Development*, *Asian Survey*, dan *Journal of East Asian Studies*. Bersama Tim PUSAD Paramadina, dia menerbitkan buku *Pemolisian Konflik Agama di Indonesia* (2014).

SISWO MULYARTONO adalah peneliti dan koordinator bidang advokasi pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi

(PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia lulus dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 2014 dengan skripsi mengenai mobilisasi anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Mantan pegiat Forum Mahasiswa Ciputat ini menulis di *Koran Tempo* dan *Geotimes* dan ikut menulis *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (2014) dan *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat* (2016).

SITI NURHAYATI adalah peneliti dan manajer HRD pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Semasa kuliah ia aktif menjadi peneliti lapangan di Lingkaran Survei Indonesia. Lulusan Sosiologi Agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 2009 ini sempat menjadi asisten dosen untuk mata kuliah statistik di almahaternya dan pernah menjadi asisten peneliti di Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai analis data. Trainer *Living Values Education* (LVE) ini turut menulis *Kontroversi Gereja di Jakarta* (2011) dan *Pendidikan untuk Perubahan* (2015).

Selama ini Jawa Barat sering digambarkan sebagai daerah yang rawan konflik dan tindak intoleransi. Tapi yang belum banyak diketahui, ada orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu di Jawa Barat yang bekerja dalam arah yang berbanding terbalik dengan gambaran tersebut. Mereka, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan dalam bidangnya masing-masing, justru bekerja untuk menegakkan dan memperkokoh kebersamaan di antara berbagai kelompok agama.

Buku sederhana ini kami maksudkan untuk mengungkap kisah personal dan peran sosial mereka – dan seraya menghargai mereka, kami mengajak para pembaca untuk mengambil pelajaran dari mereka dan memperluas panggilan mereka ke tempat-tempat lain. Karena mereka orang-orang biasa seperti kita, kita perlu mengenal mereka lebih jauh, mengapresiasi sumbangan mereka, menjadikan mereka sumber inspirasi kita, dan sebisa mungkin mendakwahkan hasrat, cita-cita dan langkah-langkah aktual mereka, dengan segala kekuatan dan keterbatasannya. Di tengah tantangan yang tak kecil dan dengan sumberdaya seadanya, mereka terus membangun jembatan, tanpa kenal lelah.